

TUGAS AKHIR PROGRAM MAGISTER (TAPM)

PENGARUH STRUKTUR MODAL, *GOOD CORPORATE GOVERNANCE*, LIQUIDITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP POTENSI *TAX AVOIDANCE*



UNIVERSITAS TERBUKA

**TAPM diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh
Gelar Magister Manajemen**

Disusun Oleh :

SIGIT ARGO HANANTO

NIM. 530002171

PROGRAM PASCASARJANA

UNIVERSITAS TERBUKA

JAKARTA

2020

ABSTRAK

Pengaruh Struktur Modal, *Good Corporate Governance*, Liquiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Potensi *Tax Avoidance*

Sigit Argo H.

sigitargo@gmail.com

Program Pasca Sarjana Universitas Terbuka

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh struktur modal, *good corporate governance*, likuiditas, dan ukuran perusahaan terhadap potensi *tax avoidance*. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode tahun 2013 sampai dengan 2017. Hasil penelitian menunjukkan hanya struktur modal dan ukuran perusahaan yang signifikan memengaruhi *tax avoidance*. Sedangkan *good corporate governance*, (melalui proksi kualitas audit, direktur independen, komisaris independen), likuiditas, dan ukuran perusahaan tidak memengaruhi potensi *tax avoidance*.

Keywords : struktur modal, *good corporate governance*, likuiditas, ukuran perusahaan, potensi *tax avoidance*.



ABSTRACT

**The Effects of Capital Structure, Good Corporate Governance, Liquidity
and Company Size on Potential Tax Avoidance**

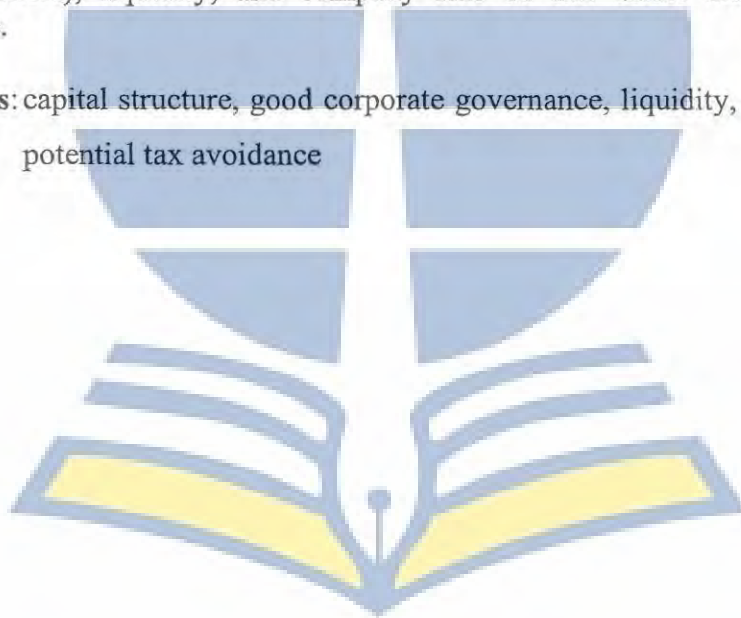
Sigit Argo H.

sigitargo@gmail.com

Open University Postgraduate Program

This study aims to examine the effect of capital structure, good corporate governance, liquidity, and company size on potential tax avoidance. The study examines listed manufacturing companies at the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the period from 2013 to 2017. The results show that only the capital structure and company size significantly affect tax avoidance. In contrast, good corporate governance (through audit quality proxies, independent directors, and independent commissioners), liquidity, and company size do not affect the potential tax avoidance.

Keywords: capital structure, good corporate governance, liquidity, company size, potential tax avoidance



**UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER MANAJEMEN**

PERNYATAAN

TAPM yang berjudul “Pengaruh Struktur Modal, *Good Corporate Governance*, Liquiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Potensi *Tax Avoidance*” adalah hasil karya saya sendiri, dan seluruh sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar.

Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya penjiplakan (plagiat), maka saya bersedia menerima sanksi akademik.

Jakarta, Januari 2020

Yang Menyatakan



Sigit Argo Hananto

NIM 530002171

PERSETUJUAN (TAPM)

Judul TAPM : Pengaruh Struktur Modal, *Good Corporate Governance*,
Liquiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Potensi *Tax Avoidance*

Penyusun TAPM : Sigit Argo Hananto

NIM : 530002171


Program studi : Magister Manajemen Minat Bidang Keuangan

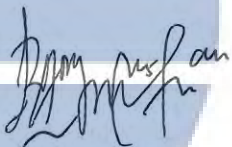
Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2020

Menyetujui:


Pembimbing II,

Pembimbing I,


Dr. Kurniawati, MM
NIDN: 0316097001


Dr. Ramdany, SE.Ak. M.Ak.CA.CPA
NIDN: 0310107202

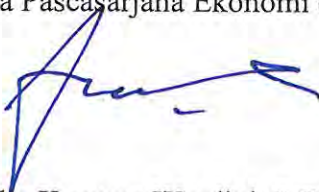
Penguji Ahli


Prof. Tatang Ary Gumanti, Ph.D.

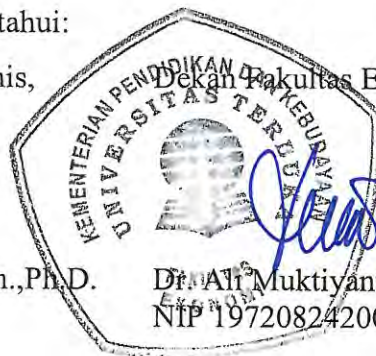
Mengetahui:

Ketua Pascasarjana Ekonomi dan Bisnis,

Dekan Fakultas Ekonomi,


Amala Kusuma Wardini, S.E., M.Com., Ph.D.
NIP 197009182005012001


Dr. Ali Muktiyanto, S.E., M.Si.
NIP 197208242000121001



UNIVERSITAS TERBUKA
PROGRAM PASCASARJANA
PROGRAM MAGISTER MANAJEMEN

PENGESAHAN

NAMA : Sigit Argo Hananto
 NIM : 530002171
 PROGRAM STUDI : Magister Manajemen (Bidang Keuangan)
 JUDUL TAPM : Pengaruh Struktur Modal, *Good Corporate Governance*,
 Liquiditas dan Ukuran Perusahaan terhadap Potensi *Tax Avoidance*

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Penguji Tugas Akhir Program Magister (TAPM) Manajemen Bidang Keuangan, Program Pascasarjana Universitas Terbuka pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 14 Januari 2019

Waktu : 07.45 - selesai

dan telah dinyatakan LULUS

Panitia penguji TAPM

Tanda tangan

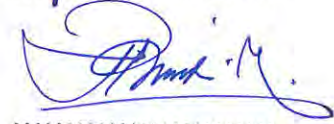
Ketua Komisi Penguji

Nama: Amalia Kusuma Wardini, S.E., M.Com., Ph.D.



Penguji Ahli

Nama: Prof. Tatang Ary Gumanti, Ph.D




Pembimbing I

Nama: Dr. Ramdany, SE.Ak. M.Ak.CA.CPA



Pembimbing II

Nama: Dr. Kurniawati, MM



Pengantar

Puji syukur Alhamdulillah kami panjatkan kepada Allah *subhanallahu wa ta'ala* atas segala nikmat dan karunia yang diberikan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul “Pengaruh Struktur Modal, *Good Corporate Governance*, Liquiditas dan Ukuran Perusahaan Terhadap Potensi *Tax Avoidance*”. Tesis ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat guna mencapai gelar kesarjanaan Strata 2 (S2).

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada semua pihak yang telah membantu baik dalam proses penelitian maupun selama penulisan. Ucapan terima kasih ini disampaikan kepada :

1. Dr. Ramdany, SE.Ak. M.Ak.CA.CPA, selaku dosen pembimbing 1 yang telah meluangkan waktu untuk memberikan ilmu, bimbingan dan arahan selama penyusunan tesis ini hingga selesai.
2. Dr. Kurniawati, MM, selaku dosen pembimbing 2 yang telah meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan ilmu, semangat serta motivasi selama penyusunan tesis.
3. Ibu Amalia Kusuma Wardini, S.E., M.Com., Ph.D., selaku Ketua Komisi Penguji.
4. Prof. Tatang Ary Gumanti, Ph.D, selaku penguji ahli yang telah memberikan arahan, kritikan dan saran perbaikan untuk penyempurnaan tesis ini.
5. Bapak/Ibu dosen yang tidak dapat disebutkan satu per satu atas ilmu yang telah diberikan selama masa studi.
6. Staf akademik Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Terbuka, atas bantuan administrasi dan keperluan akademik selama melaksanakan studi.
7. Isteri dan anak-anakku tercinta Emy Nurdiana, Abdurrahman Haidar, Abdillah Hasna dan Abdullah Haykal.
8. Keluarga besar tercinta di Tulungagung.
9. Teman-teman seperjuangan Program Pascasarjana Magister Manajemen Universitas Terbuka angkatan 2017.2 untuk kebersamaan dan kenangan tak terlupakan selama masa studi.

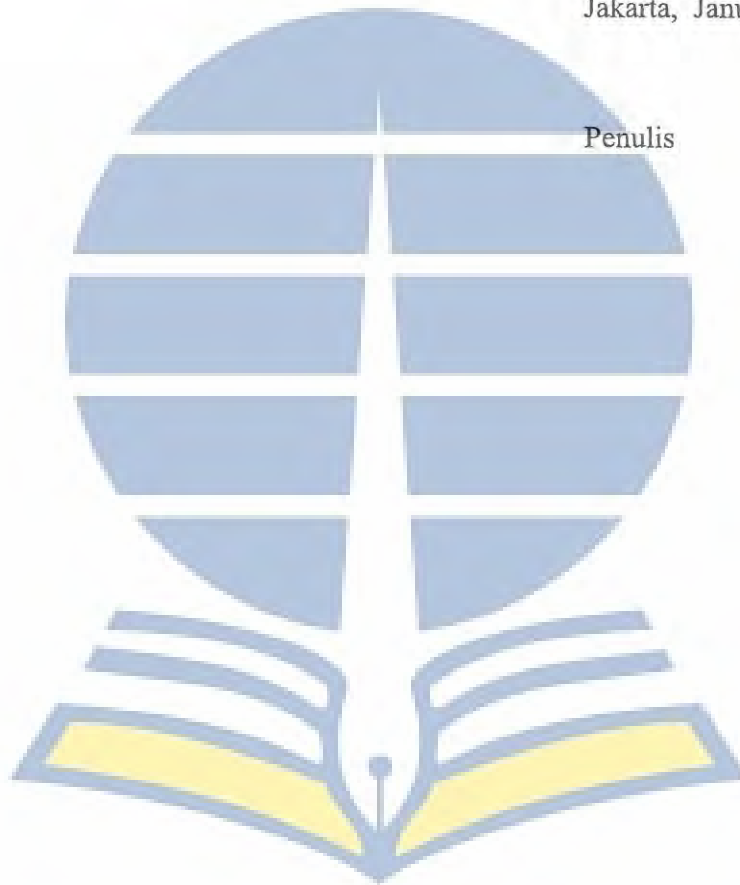
10. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-per satu

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu kami sangat mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun.

Akhir kata penulis berharap semoga tesis ini dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Jakarta, Januari 2020

Penulis



RIWAYAT HIDUP

Nama : Sigit Argo Hananto
NIM : 530002171
Program Studi : Magister Manajemen Bidang Keuangan
Tempat/Tanggal Lahir : Tulungagung, 09 Maret 1980

Riwayat Pendidikan : Lulus SD di SDN Jepun III pada tahun 1993
Lulus SMP di SMPN 01 Tulungagung pada tahun 1996
Lulus SMU Boyolangu Tulungagung pada tahun 1999
Lulus D-III Perpajakan STAN pada tahun 2002
Lulus D-IV Akuntansi STAN pada tahun 2007

Riwayat Pekerjaan : Tahun 2002 s.d. 2005, Staf di KPP Banjarmasin
Tahun 2007 s.d. 2012, *Tax Auditor* di KPP Madya Semarang
Tahun 2013 s.d. 2015, *Tax Auditor* di KPP PMA Dua
Tahun 2015 s.d. sekarang, Staf Tenaga Ahli Pajak Kemenkeu

Jakarta, Januari 2020

Sigit Argo Hananto
NIM. 530002171

DAFTAR ISI

Abstrak	i
Pernyataan Bebas Plagiasi	iii
Lembar Persetujuan	iv
Lembar Pengesahan	v
Pengantar	vi
Riwayat Hidup	viii
Daftar Isi	ix
Daftar Tabel	xii
Daftar Gambar	xiii
Daftar Lampiran	xiv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	17
D. Kegunaan Penelitian	17
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kajian Teori	19
A.1. Teori Struktur Modal	19
A.1.1. Teori Modigliani dan Miller	19
A.1.2. Teori <i>Trade Off</i>	20
A.1.3. Teori <i>Pecking Order</i>	22
A.1.4. Teori <i>Market Timing</i>	23
A.1.5. <i>Debt to equity Ratio</i> (DER)	25
A.2. <i>Good Corporate Governance</i>	27
A.3. Liquiditas	32
A.4. Ukuran Perusahaan	34
A.5. <i>Tax Avoidance</i>	35
B. Penelitian Terdahulu	39
C. Kerangka Berpikir.....	42
D. Operasionalisasi Variabel	43

D.1. Variabel Independen (Variabel Bebas)	43
D.2. Variabel Dependen (Variabel Terikat)	46
E. Hipotesis	46
E.1. Pengaruh Struktur Modal Terhadap Potensi <i>Tax Avoidance</i> ..	46
E.2. Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> Terhadap Potensi <i>Tax Avoidance</i>	48
E.3. Pengaruh Liquiditas Terhadap Potensi <i>Tax Avoidance</i>	53
E.4. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Potensi <i>Tax Avoidance</i>	54
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Desain Penelitian	57
A.1. Pendekatan Penelitian	57
A.2. Desain Penelitian	57
B. Sumber Informasi	57
B.1. Sumber Data	57
B.2. Teknik Pengumpulan Data	58
C. Instrumen Penelitian	58
D. Prosedur Pengumpulan Data	59
E. Metode Analisis Data	60
E.1. Pengujian Asumsi Klasik	60
E.1.1. Uji Normalitas	60
E.1.2. Uji Multikolinearitas	61
E.1.3. Uji Autokorelasi	61
E.1.4. Uji Heteroskedastisitas	62
E.2. Analisis Regresi	62
E.3. Analisis Korelasi	63
E.4. Analisis Koefisien Determinasi	64
E.5. Rancangan Pengujian Hipotesis	64
E.5.1. Penetapan Hipotesis	64
E.5.2. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)	65
E.5.3. Penetapan Tingkat Signifikansi	66

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian	67
B. Hasil Analisis Data	69
B.1. Hasil Analisis Statistik deskriptif	69
B.2. Hasil Uji Asumsi Klasik	70
B.2.1. Hasil Uji Normalitas	70
B.2.2. Hasil Uji Multikolinearitas	76
B.2.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas	77
B.2.4. Hasil Uji Autokorelasi	78
B.3. Analisis Regresi	79
B.3.1. Uji Keباikan Model	79
B.3.2. Uji Parsial (Uji t)	80
C. Pembahasan	83
C.1. Pengaruh Struktur modal terhadap potensi <i>tax avoidance</i>	83
C.2. Pengaruh <i>Good Corporate Governance</i> terhadap potensi <i>tax avoidance</i>	84
C.3. Pengaruh liquiditas terhadap potensi <i>tax avoidance</i>	86
C.4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap potensi <i>tax avoidance</i> . .	86

BAB V - KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	88
B. Saran	89
Daftar Pustaka	91
Lampiran	

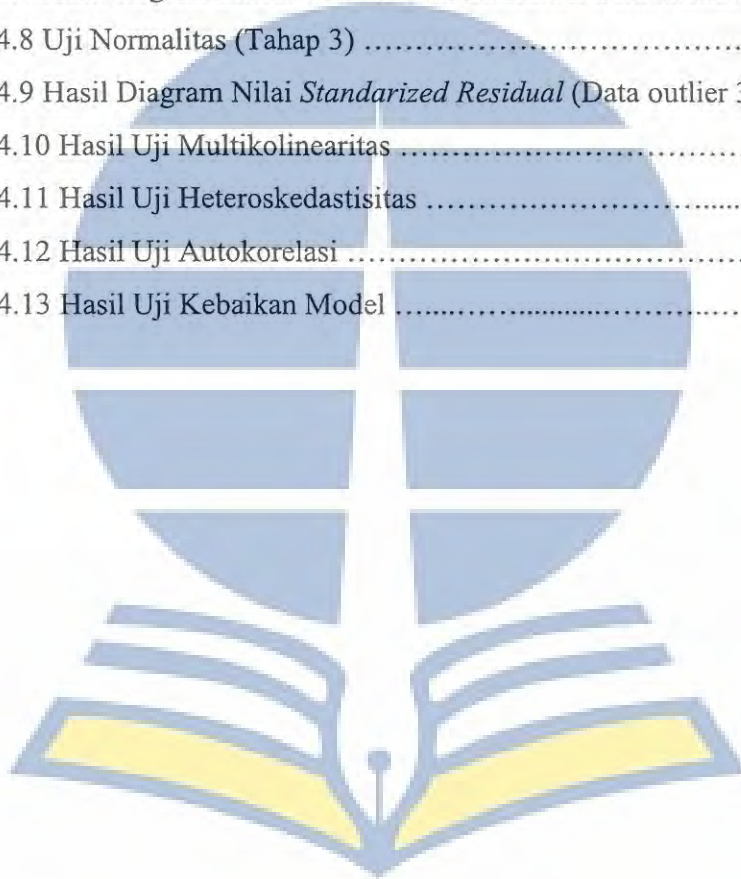
DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 2.1 Pengukuran Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>)	37
Tabel 4.1 Pemilihan Sampel	68
Tabel 4.2 Nilai Minimum, Nilai Maksimum, Rata-rata dan Standar Deviasi	69



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 Hasil Regresi Linear OLS	71
Gambar 4.2 Uji Normalitas (Tahap1)	71
Gambar 4.3 Hasil Diagram Nilai <i>Standarized Residual</i> (Data outlier 1)....	72
Gambar 4.4 Hasil Regresi Linear OLS setelah winsorizing	73
Gambar 4.5 Uji Normalitas (Tahap 2)	73
Gambar 4.6 Hasil Diagram Nilai <i>Standarized Residual</i> (Data outlier 2)	74
Gambar 4.7 Hasil Regresi Linear OLS setelah dilakukan transformasi	75
Gambar 4.8 Uji Normalitas (Tahap 3)	75
Gambar 4.9 Hasil Diagram Nilai <i>Standarized Residual</i> (Data outlier 3) ...	76
Gambar 4.10 Hasil Uji Multikolinearitas	76
Gambar 4.11 Hasil Uji Heteroskedastisitas	77
Gambar 4.12 Hasil Uji Autokorelasi	78
Gambar 4.13 Hasil Uji Keباikan Model	79



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Matriks Hubungan Variabel X_1 , X_2 , X_3 , X_5 , dan X_6 Terhadap Variabel Y (<i>Tax Avoidance</i>)	100
Lampiran 2 Proses Winsorizing pada variabel ETR	117
Lampiran 3 <i>Printout</i> hasil pengolahan E views	119
Lampiran 4 Tabulasi data mentah	123



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pajak adalah pungutan wajib dan bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, yang dibayar rakyat untuk negara dan akan digunakan untuk penyelenggaraan pemerintahan dan kesejahteraan masyarakat umum. Pajak mempunyai sifat tidak ada imbalan/kontrapretasi secara langsung bagi si pembayar pajak, oleh karena itu pembayar pajak tidak dapat merasakan manfaat secara langsung dari pembayaran pajaknya. Pemungutan pajak dapat dipaksakan oleh pemerintah karena dilaksanakan berdasarkan undang-undang. Jika seseorang atau badan hukum sudah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif, maka terhadap orang pribadi atau badan yang bersangkutan telah timbul kewajiban untuk melaksanakan hak dan kewajiban di bidang perpajakan. Undang-undang pajak telah mengatur, jika seseorang atau badan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan atau membayar pajak tidak sesuai ketentuan, maka bagi yang orang pribadi atau badan tersebut akan dikenai sanksi.

Di sisi lain, pajak menjadi beban perusahaan dan mengurangi laba bersih. Pada umumnya manajemen menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin untuk mengoptimalkan laba perusahaan (Mardiasmo, 2018). Upaya manajemen untuk meminimalkan beban pajak dapat ditempuh melalui suatu perencanaan pajak atau *tax planning*. Salah satu metode *tax planning* yang sering dipilih perusahaan adalah metode penghindaran pajak (*tax avoidance*). Metode ini dipilih karena upaya menghindari pajak dilakukan secara legal dan tidak melanggar hukum. Salah satu teknik yang digunakan dalam penerapan *tax avoidance* adalah dengan

memanfaatkan celah hukum (*loop holes*) atas suatu kejadian atau perkara yang belum diatur dalam suatu undang-undang, atau peristiwa tersebut sudah diatur namun belum jelas petunjuk pelaksanaannya (*grey area*), sehingga masing-masing pihak berusaha menafsirkan sesuai persepsi dan kapasitasnya (Pohan, 2013).

Kasus terbaru *tax avoidance* di Indonesia terjadi pada bulan Nopember 2019. Sebuah perusahaan penyedia layanan entertainment *video on demand* yang berbasis di California, Netflix, melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan celah hukum perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pemerintah Indonesia, melalui keterangan resmi Menteri Keuangan, tidak dapat melakukan pemajakan atas penghasilan yang diterima Netflix dari Indonesia dikarenakan Netflix tidak mempunyai sebuah BUT (Bentuk Usaha Tetap) di Indonesia (Detik, 2019). Pemerintah diharapkan dapat menggali lebih dalam aspek perpajakan bisnis Netflix dan memperbarui ketentuan perpajakan yang berlaku di Indonesia untuk menutup celah penghindaran pajak yang terjadi.

Sri Mulyani mengakui peraturan pajak yang ada sekarang tidak mengatur pengenaan pajak secara khusus pada jenis usaha/bisnis seperti Netflix dan perusahaan lain yang serupa. Sesuai peraturan, subyek pajak luar negeri dikenakan pajak di Indonesia melalui sebuah BUT di Indonesia. Terdapat celah hukum (*loopholes*) yang dimanfaatkan Netflix untuk menghindari pajak di Indonesia. Potensi pajak penghasilan Netflix di Indonesia sangat besar. Pada 2017, total pelanggan streaming Netflix di Indonesia mencapai 95 ribu pelanggan dan pada tahun 2019 melejit mencapai 482 ribu (Databoks, 2019).

Peristiwa lainnya, pada bulan Mei 2019 Lembaga *Tax Justice Network* melaporkan bahwa perusahaan tembakau milik British American Tobacco (BAT)

telah melakukan penghindaran pajak di Indonesia melalui PT Bentoel Investama. Kejadian tersebut memberikan dampak kerugian bagi negara sebesar US\$ 14 juta per tahun (Prima dan Kartika, 2019). Bentoel mengambil pinjaman dalam jumlah besar antara tahun 2013 sampai dengan 2015 dari perusahaan yang masih mempunyai hubungan afiliasi di Belanda, Rothmans Far East BV.

Pinjaman antar afiliasi dalam satu grup tersebut memberikan keuntungan dari beberapa segi. Yang pertama, pinjaman dengan nilai yang besar menyebabkan rasio DER melonjak tajam dari tahun sebelumnya 2012 sebesar 260,50% menjadi 946,71% pada tahun 2013. Kondisi tersebut menyebabkan pembayaran biaya bunga atas pinjaman naik drastis dan perusahaan merugi. Akumulasi kerugian menyebabkan net ekuitas menjadi minus sebesar (-) Rp1,397 miliar per 31 Desember 2014 (sumber: Laporan Tahunan 2014 PT Bentoel Internasional Investama Tbk). Selama masa utang, perusahaan membukukan rugi usaha karena laba yang dikumpulkan tergerus untuk membayar biaya bunga pinjaman.

Keuntungan yang kedua, perusahaan Bentoel tidak memotong pajak (PPH Pasal 26) atas penghasilan bunga yang dibayar ke luar negeri (Belanda). Indonesia kehilangan potensi pemajakan sebesar 20%. Hilangnya potensi pajak penghasilan tersebut dikarenakan adanya perjanjian pemerintah Indonesia-Belanda yang menerapkan tarif 0% atas pembayaran bunga yang diterima perusahaan di Belanda. Kondisi riil di lapangan, perusahaan kreditor di Belanda hanyalah perusahaan di atas kertas (*special purpose vehicle*). Kreditor sebenarnya adalah perusahaan BAT lainnya di Inggris. Rekening perusahaan di Belanda menunjukkan bahwa dana yang dipinjamkan kepada Bentoel Indonesia berasal dari grup perusahaan BAT lainnya yang berada di Inggris. Jika melalui skema utang langsung dari perusahaan di

Inggris, Bentoel Indonesia diharuskan memotong pajak dengan tarif 10% (perjanjian Indonesia – Inggris). Namun karena strategi pemberian pinjaman melalui perusahaan yang berada di Belanda, maka tidak ada pajak yang dipotong di Indonesia atas pembayaran bunga ke luar negeri.

Kasus lain yang serupa adalah penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT RNI pada tahun 2014 (Kompas, 2016). PT RNI merupakan sebuah badan usaha yang sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun dari segi struktur modal, perusahaan tersebut memiliki tingkat utang kepada afiliasi yang sangat tinggi. Pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada RNI di Indonesia dan tidak berinvestasi dalam bentuk penanaman modal saham. Mereka memberikan pinjaman dan memperoleh penghasilan dari Indonesia berupa bunga atas pinjaman. PT RNI mencatat utang sebesar Rp 20,4 miliar pada tahun 2014, sementara omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Laba perusahaan tergerus oleh biaya bunga pinjaman dan hal ini menyebabkan PT RNI rugi pada tahun yang sama, senilai Rp 26,12 miliar. PT RNI melakukan penghindaran pajak melalui pembebanan bunga atas pinjaman dengan nilai pinjaman/rasio yang tidak wajar.

Upaya penghindaran pajak juga dilakukan oleh perusahaan global (multinasional) di berbagai negara di dunia, termasuk Indonesia. Perusahaan multinasional memiliki banyak cabang dan anak perusahaan yang tersebar di seluruh dunia. Mereka memiliki sumber daya berukuran besar yang memungkinkan mereka mengatur strategi dan skema-skema transaksi antar perusahaan afiliasi untuk menghindari pajak. Seperti diberitakan (Merdeka, 2013), penghindaran pajak di Uni Eropa diperkirakan merugikan keuangan anggota Uni Eropa 1 triliun euro atau Rp12.000 triliun di tahun 2012. Secara khusus disebutkan, penghindaran pajak

dilakukan secara terstruktur di negara Inggris. Akhir tahun 2012, badan pajak Inggris HMRC (*HM Revenue and Customs*) memeriksa laporan pajak beberapa perusahaan berskala global yang diduga melakukan penghindaran pajak.

Perusahaan yang diduga melakukan penghindaran pajak dan disorot Parlemen Inggris adalah sebuah *franchisor* kedai kopi yang berasal dari Amerika Serikat (AS). Perusahaan tersebut menyatakan rugi sebesar 112 juta pounds selama tahun 2008 sampai dengan tahun 2010. Hal ini menyebabkan selama tahun tersebut perusahaan tidak membayar PPh (pajak penghasilan). *Franchisor* melaporkan omzet sebesar 1,2 milyar pounds (Rp18 triliun) selama tahun 2008-2010. Jumlah penjualan yang dibukukan sangat tinggi namun selama tahun tersebut perusahaan mencatat kerugian dalam kegiatan operasionalnya.

Setelah dilakukan penelitian, ada 3 cara yang dilakukan *franchisor* sebagai modus untuk membuat laporan keuangan menjadi rugi, yaitu: 1). membayar royalti *offshore licensing* yang sangat tinggi atas desain, resep dan logo ke cabangnya di Belanda, 2). membayar bunga utang sangat tinggi, di mana utang tersebut justru digunakan untuk ekspansi kedai kopi di negara lain, 3). membeli bahan baku dari cabangnya di Swiss, walaupun pengiriman barang langsung dari negara produsen, dan tidak masuk ke Swiss. Hal tersebut dilakukan karena Swiss menerapkan pajak dengan tarif rendah. Penghindaran pajak lazim dilakukan perusahaan berskala global dengan cabang/anak perusahaan di berbagai negara. Modus *tax avoidance* yang digunakan termasuk usang tapi selalu berhasil dilakukan (Merdeka, 2013).

Beberapa kasus di atas menimbulkan pertanyaan mendasar yaitu faktor apa saja yang memengaruhi perusahaan melakukan praktik *tax avoidance*. Pajak menjadi beban perusahaan sehingga hal tersebut menyebabkan perusahaan (wajib pajak)

enggan untuk memenuhinya. Penelitian dalam tesis ini secara khusus menguji kembali dan fokus pada beberapa hal yang diduga memengaruhi *tax avoidance*, yaitu struktur modal, *good corporate governance*, likuiditas dan ukuran perusahaan. Penelitian ini berbeda dari penelitian sebelumnya dalam hal ukuran sampel, rentang tahun, dan proksi-proksi yang digunakan.

Ghazouani (2013) menyimpulkan struktur modal adalah komponen/faktor yang memengaruhi *tax avoidance*. Suyanto dan Supramono (2012), Turyatini (2017), Alfina et al. (2018) dan Nabilla dan Fikri, (2018) juga menyimpulkan hal yang sama, bahwa pemilihan struktur modal perusahaan melalui skema utang (*leverage*) memengaruhi perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Salah satu proksi struktur modal adalah rasio hutang terhadap ekuitas (DER). Peneliti-peneliti di atas menyebutkan perusahaan memilih skema utang pada struktur modal karena keuntungan pembebanan biaya bunga atas utang perusahaan. Penelitian ini menggunakan rasio utang atas ekuitas (DER) sebagai proksi struktur modal. *Debt to equity ratio* (DER) menggambarkan besarnya jaminan yang tersedia untuk memenuhi kewajiban perusahaan kepada kreditur melalui skema utang-piutang.

Teori *pecking order* menyatakan pemilihan struktur modal dilakukan sesuai prioritas dan dimulai dari modal sendiri (modal saham, saldo laba, dan cadangan) (Myers dan Majluf, 1984). Jika pendanaan dari modal sendiri dihitung masih kurang (defisit), maka dilakukan pendanaan yang berasal dari luar perusahaan berupa utang. Penggunaan modal dengan skema utang akan menimbulkan sebuah biaya yang disebut sebagai biaya bunga (*interest expense*). Sesuai ketentuan perpajakan, biaya tersebut dapat digunakan sebagai komponen pengurang laba sebelum pajak dan dibebankan untuk menghitung laba-rugi bersih perusahaan.

Pengurangan laba perusahaan akan menyebabkan nilai *effective tax rate* (proksi *tax avoidance*) menjadi besar, sehingga secara tidak langsung pembebanan biaya bunga atas utang dalam laporan laba-rugi akan memengaruhi nilai *effective tax rate/tax avoidance*.

Myers (2001) menyatakan perusahaan lebih memilih struktur modal melalui skema utang dengan alasan dapat membebaskan bunga atas utang dan selanjutnya meningkatkan nilai perusahaan melalui kegiatan investasi dan penghematan pajak (*tax saving*). Tindakan pembebanan bunga untuk mengurangi laba perusahaan yang pada akhirnya memperkecil jumlah pembayaran pajak inilah yang disebut sebagai *tax avoidance*. Tindakan tersebut legal dan diperbolehkan secara hukum pajak. Namun yang perlu diwaspadai adalah bahwa struktur modal dengan komposisi utang yang besar meningkatkan risiko keuangan (*financial distress*). Ada kemungkinan perusahaan akan mengalami kesulitan keuangan untuk membayar utang tersebut di kemudian hari.

Biaya yang timbul sebagai akibat penggunaan utang untuk mendapatkan keuntungan pajak tidak seharusnya lebih besar dari manfaat/keuntungan pajak atas penggunaan utang tersebut (teori *trade-off* Modigliani dan Miller, (1963)). Struktur modal perusahaan berada pada posisi optimal ketika terjadi keseimbangan antara manfaat menggunakan utang (manfaat pajak) dengan biaya yang timbul sebagai akibat menggunakan utang. Ketika pemenuhan struktur modal dilakukan tidak melalui utang, hal tersebut tidak memengaruhi *tax avoidance* (Ghazouani, 2013).

Beberapa teori dan pernyataan di atas menjadi pertimbangan bagi perusahaan untuk memilih skema utang pada pendanaan struktur modal. Pemilihan skema utang dapat digunakan sebagai *leverage* untuk meningkatkan nilai perusahaan guna

mendapat keringanan pajak (*trade-off theory*). Perusahaan didorong berutang untuk memperkecil pembayaran pajak. Pohan (2013) berpendapat bahwa kewajaran utang sebuah perusahaan adalah maksimal tiga kali modalnya, atau rasio utang terhadap ekuitas (DER) adalah sebesar 300%. Skema rasio utang menjadi tidak wajar ketika jumlah utang suatu perusahaan berkali-kali lipat dari jumlah ekuitasnya. Kondisi tersebut umum terjadi pada transaksi utang piutang yang melibatkan pihak-pihak yang saling berafiliasi dalam satu grup perusahaan multinasional. Perusahaan *parent* menjadikan *subsidiary*-nya di negara lain sebagai *cost center* biaya bunga melalui transaksi pinjaman/utang yang tidak wajar. Tingkat utang perusahaan antar afiliasi dapat berjumlah lebih dari 4 kali jumlah nilai ekuitasnya (Bawono, 2019).

Pemerintah Indonesia telah berupaya menutup celah penghindaran pajak tersebut dengan mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan besarnya Perbandingan antara utang dan modal (DER) perusahaan untuk keperluan penghitungan pajak. PMK ini berlaku mulai tahun pajak 2016 dan disebut sebagai *thin capitalization rule*, karena bertujuan membatasi pembebanan biaya bunga pinjaman untuk keperluan penghitungan pajak secara tidak langsung, yaitu melalui pembatasan rasio utang terhadap modal sebesar 4 banding 1 (DER).

Namun, di sisi lain OECD (2015) tidak merekomendasikan penggunaan DER sebagai *thin capitalization rule*. Mereka lebih merekomendasikan penggunaan pendekatan lainnya yaitu melalui *interest limitation rule* atau atau lebih sering disebut pendekatan *earning stripping* (laporan *BEPS Action 4 – OECD*, 2015). Pendekatan ini menggunakan rasio perbandingan bunga dengan EBIT/ EBITDA (*earning before interest, tax, depreciation and amortization*). Pendekatan ini lebih

direkomendasikan OECD karena secara langsung membatasi penggerusan basis pajak dimana wajib pajak tidak dapat mengurangi biaya bunga melebihi batas yang telah ditetapkan secara langsung, berbeda dengan DER yang hanya membatasi penggerusan basis pajak secara tidak langsung melalui rasio utang terhadap modal (Sejati, 2017).

Oleh karena itu, meskipun di dalam PMK-169/PMK.010/2015 telah diatur batasan rasio utang terhadap modal (DER), entitas grup/perusahaan yang mempunyai modal besar dengan mudah dapat memanipulasi hasil rasio DER dengan menambah tingkat modal entitas yang bersangkutan (Sejati, 2017). Pemilihan skema utang dalam struktur modal tetap menjadi pilihan perusahaan dan memengaruhi *tax avoidance*.

Faktor selanjutnya yang diduga memengaruhi *tax avoidance* adalah *good corporate governance*. *Corporate governance* memainkan peran penting sebagai pengawas sekaligus penentu keputusan untuk melakukan penghindaran pajak (Mulyani et al., 2018). *Corporate governance* sebagai tata kelola perusahaan menentukan arah perusahaan sesuai dengan karakter pemimpin perusahaan. Karakter seorang pemimpin memengaruhi keputusan yang dibuatnya termasuk dalam hal penghindaran pajak.

Sebuah perusahaan yang didirikan di Indonesia otomatis menjadi wajib pajak badan di Indonesia dan melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. Secara umum suatu aturan internal terkait *corporate governance* akan memengaruhi cara sebuah perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, tetapi di sisi lain perencanaan pajak (*tax avoidance*) tergantung pada dinamika *corporate governance* yang dilaksanakan dalam suatu perusahaan (Friese et al.,

2011). Beberapa hasil empiris penelitian membuktikan bahwa *corporate governance* memengaruhi *tax avoidance*. Penelitian ini menggunakan kualitas audit, direktur independen, dan komisaris independen sebagai proksi *good corporate governance*.

Kanagaretnam et al. (2016), di awal hipotesis penelitiannya menyatakan bahwa kualitas audit memengaruhi tingkat *tax avoidance*. Kualitas audit, yang diproyeksikan ke dalam hasil audit kantor akuntan publik “the Big N”, mampu memitigasi tindakan *tax avoidance* yang dilakukan manajemen perusahaan. Hal itu dikarenakan sebagian besar dari mereka juga memberikan jasa di bidang perpajakan, selain melakukan jasa audit. Kanagaretnam melakukan penelitian terhadap lebih dari 40.000 perusahaan di seluruh dunia (di luar Amerika Serikat). Mulyani et al. (2018) dan Eksandy (2017) juga menunjukkan hasil yang sama, yaitu kualitas audit memengaruhi *tax avoidance*. Secara umum Kerr et al. (2016) juga menyatakan bahwa semakin besar akuntabilitas (*reporting governance*) dalam sebuah perusahaan maka semakin kecil tindakan *tax avoidance* pada perusahaan yang bersangkutan.

Proksi kedua *good corporate governance* dalam penelitian ini adalah direktur independen. Direktur independen bertugas dan bertanggung jawab untuk memberikan pendapat secara profesional dan independen kepada Dewan Direktur. Tugas direktur independen erat kaitannya dengan penelaahan risiko yang dihadapi perusahaan atas kebijakan dan kegiatan operasional yang telah dijalankan oleh direktur lainnya. Direktur independen merupakan penghubung antara dewan direktur dengan dewan komisaris untuk memastikan kebijakan yang dikeluarkan telah sesuai bersifat independen, tidak bersifat subyektif.

Terkait praktik *tax avoidance* yang dilakukan perusahaan, direktur independen memastikan apakah tindakan yang dilakukan masih dalam batas koridor dan tidak melanggar hukum/peraturan perpajakan. Penelitian Timothy (2010) menghasilkan kesimpulan *good corporate governance*, yang diproksikan melalui kepemilikan saham direktur, dan direktur independen, berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Lanis dan Richardson (2018) juga menunjukkan hasil yang sama bahwa jumlah direktur independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Jensen dan Meckling (1976) menyatakan bahwa semakin banyak jumlah komisaris maka semakin baik mereka mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan manajer (teori keagenan). Premis dari teori keagenan adalah komisaris independen dibutuhkan oleh dewan komisaris untuk mengawasi dan mengontrol tindakan-tindakan manajer, sehubungan dengan perilaku oportunistik mereka. Dewan komisaris terdiri atas komisaris independen dan komisaris non-independen.

Komisaris independen sebagai anggota dewan komisaris yang tidak terafiliasi dengan direksi dan anggota dewan komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan perusahaan (Fadhilah, 2014).

Armstrong et al. (2015) menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Proksi yang digunakan adalah dewan komisaris independen dan intensif bagi manajer. Armstrong menyatakan kesimpulan di dalam penelitiannya bahwa kehadiran komisaris independen dan insentif bagi manajer mampu memitigasi pengaruh perusahaan untuk melakukan *tax avoidance*. Semakin tinggi nilai *good corporate governance* maka semakin

rendah tingkat *tax avoidance*. Hasil penelitian Armstrong et al. (2015) didukung oleh penelitian Winata (2014), Putri (2014), Khoirunnisa (2015), Eksandy (2017), Nugroho dan Agustia (2017), dan Alfina et al. (2018), yang membuktikan secara empiris bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, faktor lain yang diduga memengaruhi *tax avoidance* adalah likuiditas. Oler dan Picconi (2014) melakukan penelitian pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance* secara tidak langsung. Mereka meneliti apakah *insufficient cash* atau *excess cash* memengaruhi keberlangsungan perusahaan di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *insufficient cash* atau *excess cash* memengaruhi *return* dan beban pajak (*tax burden*) perusahaan. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pembayaran pajak perusahaan. Fernández-Rodríguez dan Martínez-Arias (2012) menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai beban pajak besar cenderung melakukan upaya *tax avoidance*.

Pembayaran pajak adalah bagian dari kewajiban jangka pendek perusahaan. Kemampuan perusahaan untuk melaksanakan kewajiban jangka pendek dapat dilihat dari rasio likuiditas. Apabila perusahaan memiliki rasio likuiditas yang tinggi (*excess cash*) maka tidak ada hambatan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban jangka pendek perusahaan mampu dipenuhi apabila rasio likuiditas dalam keadaan yang tinggi dan adanya potensi perusahaan melakukan *tax avoidance* pada kondisi keuangan perusahaan tidak likuid atau *insufficient cash* (Suyanto dan Supramono, 2012). Fajar Adisamartha dan Noviari (2015) dan Indradi (2018) menghasilkan kesimpulan yang sama, yaitu likuiditas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Ukuran perusahaan menjadi faktor terakhir yang diduga memengaruhi *tax avoidance* dalam penelitian ini. Teori yang digunakan sebagai dasar analisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* ada 2, yaitu teori biaya politik dan teori kekuasaan politik. Menurut teori biaya politik, perusahaan besar cenderung meminimalkan laba perusahaan dengan menunda tingkat laba tahun yang bersangkutan (Watts dan Zimmerman, 1986). Hal ini dikarenakan perusahaan besar memiliki ongkos biaya politik yang tinggi sehingga mereka menggeser laba dari tahun berjalan ke tahun-tahun berikutnya. Oleh karena itu perusahaan besar cenderung lebih agresif melakukan upaya-upaya untuk mencapai penghematan beban pajak yang optimal. Zimmerman (1983) menyatakan semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi tingkat *tax avoidance*.

Perusahaan yang mempunyai skala besar akan menggunakan sumber daya yang berlimpah yang dimilikinya untuk tujuan-tujuan tertentu, termasuk upaya melakukan *tax avoidance*. Perusahaan yang tergolong kecil tidak optimal dalam mengelola pajak dikarenakan kekurangan ahli di bidang perpajakan. Hal ini berbeda dengan perusahaan besar yang memiliki sumber daya lebih besar, sehingga dapat dengan mudah mengelola pajak. Perusahaan memerlukan sumber daya manusia yang mahir di bidang perpajakan untuk dapat mengelola pajak perusahaan secara optimal (Nicodème, 2007). Penilaian ukuran perusahaan didasarkan pada total aset perusahaan, nilai pasar saham, tingkat penjualan rata-rata dan total penjualan. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar cenderung mengambil keuntungan dari kelemahan peraturan perpajakan melalui praktik *tax avoidance* (Merslythalia dan Lasmana, 2016).

Teori yang kedua, yang digunakan sebagai dasar analisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*, adalah teori kekuasaan politik. Menurut teori ini, perusahaan dengan skala besar mempunyai sumber daya yang lebih besar untuk memengaruhi kebijakan pemerintah sesuai kepentingan perusahaan, termasuk dalam hal penghindaran pajak (*tax avoidance*). Kondisi tersebut mendorong para manajer perusahaan untuk berlaku agresif, atau sebaliknya menjadi patuh terhadap peraturan perpajakan (Kurniasih dan Sari, 2013). Siegfried (1972) menyatakan ada hubungan negatif antara ukuran perusahaan dan *effective tax rate* (salah satu proksi *tax avoidance*). Semakin besar ukuran perusahaan maka semakin kecil tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan.

Berdasarkan teori agensi, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dapat digunakan oleh agen untuk memaksimalkan kompensasi kinerja agen, yaitu dengan cara menekan beban pajak perusahaan untuk memaksimalkan kinerja perusahaan. Perusahaan yang mempunyai ukuran besar pada umumnya memiliki tingkat pertumbuhan penjualan yang tinggi dan menghasilkan laba. Hal tersebut searah dengan praktik perencanaan pajak dimana perusahaan yang bersangkutan memiliki kemampuan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai peraturan yang berlaku, sekaligus melakukan *tax planning* dalam bentuk *tax avoidance* yang tidak melanggar hukum.

Richardson dan Lanis (2007) meneliti di di Australia dan menyebut ada hubungan kuat antara *effective tax rate* dengan beberapa karakteristik perusahaan, termasuk diantaranya adalah ukuran perusahaan. Gupta dan Newberry (1997), Dharma dan Ardiana (2016), dan Mahidin dan Danastri (2017) menghasilkan

kesimpulan yang sama, yaitu ukuran perusahaan signifikan memengaruhi *tax avoidance*.

B. Perumusan Masalah

Perusahaan cenderung melakukan *tax avoidance* karena tidak melanggar hukum. Tetapi, walaupun tidak ada peraturan yang dilanggar, praktik *tax avoidance* menyebabkan pemerintah kehilangan sejumlah potensi penerimaan pajak. Pemerintah seharusnya dapat memperoleh penerimaan pajak yang lebih besar jika perusahaan tidak melakukan *tax avoidance*.

Praktik *tax avoidance* dilakukan dan terus berkembang sesuai perubahan zaman. Ada beberapa model bisnis baru yang luput dari pajak dikarenakan ketentuan pajak belum *up to date* mengatur pengenaan pajak atas model bisnis baru tersebut. Namun ada beberapa hal yang relevan, dari jaman dahulu sampai sekarang, menjadi faktor pendorong perusahaan melakukan *tax avoidance*. Misalnya, praktik penggunaan skema utang dalam struktur modal untuk menekan beban pajak seperti yang dilakukan PT RNI dan PT Bentoel Investama. Meskipun pemerintah sudah membatasi rasio hutang terhadap ekuitas untuk keperluan pembebanan pajak, namun peraturan tersebut dapat dihindari dengan menambah jumlah ekuitas pada struktur modal perusahaan.

Selanjutnya, faktor ketiadaan unsur *good corporate governance* dalam perusahaan menyebabkan perusahaan tidak membayar pajak. Hal ini seperti yang terjadi di Indonesia berupa kasus penghindaran pajak oleh Netflix. Pemerintah Indonesia tidak dapat memajaki Netflix dikarenakan perusahaan tersebut tidak mempunyai sebuah Bentuk Usaha Tetap (BUT) di Indonesia. Ketiadaan BUT di

Indonesia menyebabkan Netflix tidak melaksanakan prinsip-prinsip *good corporate governance* di Indonesia.

Hal terakhir berupa penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia. Perusahaan besar dengan mudah dapat mengatur dan mengalihkan beban pajak dari satu negara ke negara lain melalui rekayasa skema transaksi dengan mendirikan perusahaan bentukan (*special purposes vehicle*) di negara yang menerapkan tarif pajak lebih rendah. Perusahaan berukuran besar cenderung melakukan *tax avoidance* karena memiliki sumber daya yang melimpah (termasuk tingginya tingkat liquiditas).

Beberapa kasus *tax avoidance* dan penelitian terdahulu mendorong penulis untuk menganalisis dan menguji kembali apakah beberapa faktor seperti struktur modal, *good corporate governance*, liquiditas, dan ukuran perusahaan memengaruhi potensi *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas, rumusan penelitian ini adalah

1. Apakah struktur modal memengaruhi potensi *tax avoidance*.
2. Apakah *good corporate governance*, berupa kualitas audit, memengaruhi potensi *tax avoidance*.
3. Apakah *good corporate governance*, berupa direktur independen, memengaruhi potensi *tax avoidance*.
4. Apakah *good corporate governance*, berupa komisaris independen memengaruhi potensi *tax avoidance*.
5. Apakah liquiditas memengaruhi potensi *tax avoidance*.
6. Apakah ukuran perusahaan memengaruhi potensi *tax avoidance*.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan masalah yang telah ditentukan diatas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Tingkat pengaruh struktur modal terhadap potensi *tax avoidance*.
2. Tingkat pengaruh *good corporate governance*, berupa kualitas audit terhadap potensi *tax avoidance*.
3. Tingkat pengaruh *good corporate governance*, berupa direktur independen terhadap potensi *tax avoidance*.
4. Tingkat pengaruh *good corporate governance*, berupa komisaris independen terhadap potensi *tax avoidance*.
5. Tingkat pengaruh liquiditas terhadap potensi *tax avoidance*.
6. Tingkat pengaruh ukuran perusahaan terhadap potensi *tax avoidance*.

D. Kegunaan Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan beberapa kegunaan atau manfaat sebagai berikut:

1. Bagi akademisi dan peneliti

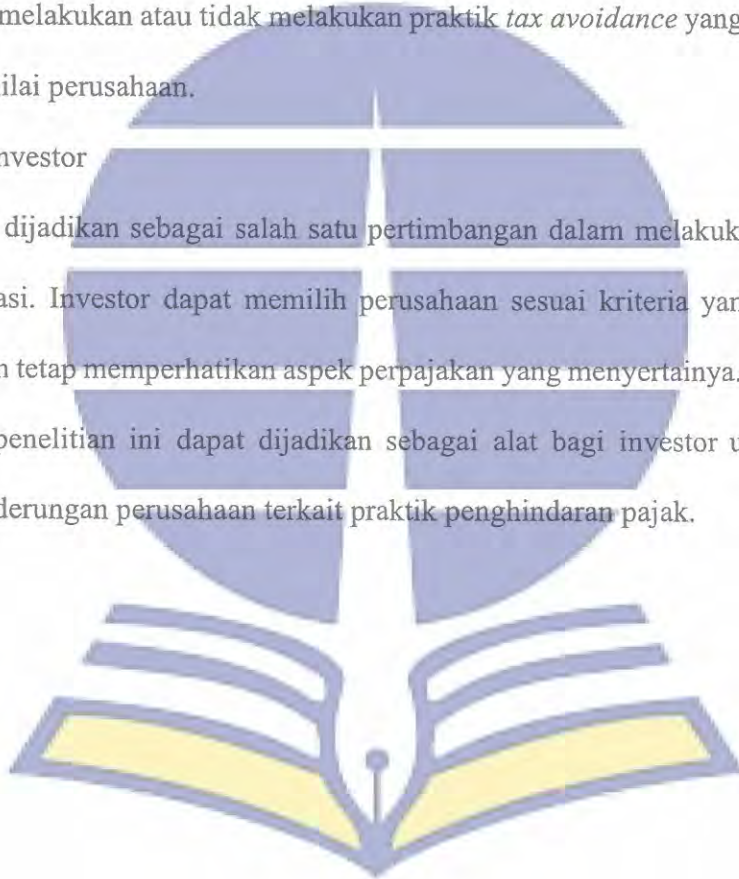
Penelitian ini dapat dijadikan sebagai bukti empiris di bidang manajemen keuangan, khususnya terkait struktur modal, *good corporate governance*, liquiditas dan ukuran perusahaan dalam hubungannya dengan *tax avoidance*. Selanjutnya hasil penelitian ini dapat menjadi rujukan atau literatur bagi penelitian yang akan datang.

2. Bagi perusahaan

Pajak bagi perusahaan adalah hal yang tidak dapat dihindari dan menjadi suatu kewajiban untuk memenuhinya. Namun dalam pemenuhan kewajiban perpajakan tersebut, perusahaan dapat memilih suatu metode untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan, yang disebut sebagai *tax avoidance*. Lebih lanjut, penelitian ini memberikan gambaran bagi perusahaan untuk melakukan atau tidak melakukan praktik *tax avoidance* yang berpengaruh pada nilai perusahaan.

3. Bagi investor

Dapat dijadikan sebagai salah satu pertimbangan dalam melakukan keputusan investasi. Investor dapat memilih perusahaan sesuai kriteria yang diinginkan dengan tetap memperhatikan aspek perpajakan yang menyertainya. Lebih lanjut, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai alat bagi investor untuk melihat kecenderungan perusahaan terkait praktik penghindaran pajak.



BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

A.1. Teori Struktur Modal

A.1.1. Teori Modigliani dan Miller

Modigliani dan Miller mengajukan teori struktur modal (teori MM) pertama kali pada tahun 1958. Mereka berpendapat bahwa struktur modal tidak memengaruhi atau tidak relevan dengan nilai perusahaan. MM mengajukan beberapa asumsi untuk membangun teori mereka, yaitu: a). tidak ada pajak, b). tidak ada *agency cost*, c). investor dapat berutang dengan tingkat bunga yang sama dengan perusahaan, d). investor mempunyai informasi yang sama dengan manajemen mengenai prospek perusahaan di masa depan, e). tidak ada biaya kebangkrutan, f). *earning before interest and taxes* (EBIT) tidak dipengaruhi oleh penggunaan dari utang, g). para investor adalah *price taker* jika terjadi kebangkrutan maka asset dapat dijual pada harga pasar (*market value*).

Dengan asumsi-asumsi tersebut, Modigliani dan Miller mengajukan dua proposisi yang dikenal sebagai proposisi tanpa pajak. Proposisi 1, yaitu nilai perusahaan yang berutang akan sama dengan nilai perusahaan yang tidak berutang. Proposisi 2, biaya modal saham akan meningkat jika perusahaan melakukan pinjaman.

Namun, kondisi di lapangan tidaklah demikian. Asumsi-asumsi yang digunakan hampir mustahil ditemukan (kondisi pasar sempurna: tidak ada pajak, tidak ada biaya transaksi dan tidak ada kebangkrutan). Oleh karena itu pada tahun 1963 Modigliani dan Miller melakukan koreksi teori yang telah diumumkan

sebelumnya. Mereka menghilangkan asumsi tentang tidak adanya pajak. Argumentasi yang mereka kemukakan adalah perusahaan dapat menghemat pengeluaran untuk membayar pajak melalui utang. Hal itu karena ketika perusahaan berutang, maka akan timbul pembayaran bunga yang dapat mengurangi pajak. MM juga menyatakan hubungan positif antara besarnya jumlah utang dengan nilai perusahaan, yaitu semakin besar utang perusahaan maka nilai perusahaan akan meningkat. Perusahaan didorong untuk memperbanyak utang. Implikasi dari teori ini adalah pembiayaan dengan utang sangat menguntungkan dan MM menyatakan struktur modal optimal adalah dengan komposisi 100 persen utang. Implikasi dari proposisi ini adalah penggunaan utang yang semakin banyak akan meningkatkan biaya modal saham.

Teori terakhir yang dikemukakan Modigliani dan Miller mendapat kritikan berupa pernyataan bahwa perusahaan tidak dapat sepenuhnya mendasarkan struktur modal dengan berutang. Ada risiko kesulitan keuangan (*financial distress*) perusahaan ketika berutang. Semakin besar tingkat utang, maka semakin besar risiko *financial distress*. Hal itulah yang mendasari Myers (2001) mengemukakan *trade off theory*, yaitu perusahaan akan berutang sampai pada tingkat utang tertentu, dimana penghematan pajak (*tax shields*) dari tambahan utang sama dengan biaya kesulitan keuangan (*cost of financial distress*).

A.1.2. Teori *Trade Off*

Teori *trade off* pertama kali diperkenalkan oleh (Modigliani dan Miller, 1963) sebagai perbaikan model awal mereka yang sebelumnya, yaitu dengan memperhitungkan adanya pajak perseroan (tetapi tetap mengabaikan pajak perseroan). Pada model pertama, struktur modal tidak memengaruhi nilai

perusahaan. Namun dalam kenyataannya, struktur modal mempunyai pengaruh positif terhadap nilai perusahaan yaitu bertambahnya penggunaan utang akan meningkatkan nilai perusahaan. Pajak memberi manfaat dalam pendanaan yang berasal dari utang, sebesar manfaat pajak dari penggunaan utang diperoleh dari beban biaya bunga utang yang dapat diperhitungkan sebagai elemen biaya yang mengurangi besaran laba kena pajak. Sedangkan pembayaran dividen tidak dapat diperhitungkan sebagai elemen biaya. Jadi, perusahaan (seolah-olah) menerima subsidi dari pemerintah atas penggunaan utang untuk menambah modal. Perbedaan lainnya daripada model pertama adalah dengan adanya pajak perseroan, diperoleh dua manfaat penggunaan utang yaitu utang merupakan sumber modal yang lebih murah daripada ekuitas, dan biaya bunga menjadi elemen pengurang pajak.

Biaya kesulitan keuangan (*Financial distress*) adalah biaya kebangkrutan (*bankruptcy costs*) atau *reorganization*, dan biaya keagenan (*agency costs*) yang meningkat akibat dari turunnya kredibilitas suatu perusahaan. *Trade-off theory* dalam menentukan struktur modal yang optimal memasukkan beberapa faktor antara lain pajak, biaya keagenan (*agency costs*) dan biaya kesulitan keuangan (*financial distress*) tetapi tetap mempertahankan asumsi efisiensi pasar dan *symmetric information* sebagai imbalan dan manfaat penggunaan utang. *Trade-off theory* mempunyai implikasi bahwa manajer akan berpikir dalam kerangka *trade-off* antara penghematan pajak dan biaya kesulitan keuangan dalam penentuan struktur modal. Perusahaan-perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya dengan cara meningkatkan rasio utangnya, sehingga tambahan utang tersebut akan mengurangi pajak.

Menurut Syamsuddin (2013), perusahaan dapat meningkatkan dan menurunkan tingkat keuntungan yang diperoleh dengan mempertimbangkan *trade off* antara profitabilitas dan risiko. Risiko yang dimaksud adalah kondisi perusahaan ketika *technically insolvent*. Kondisi ini adalah kondisi di mana perusahaan tidak mampu membayar kewajiban atau utang pada saat jatuh tempo. Menurut Myers dan Majluf (1984), teori *trade off* menyatakan kondisi dimana perusahaan menyeimbangkan penghematan pajak dari utang dibandingkan biaya kebangkrutan. Perusahaan memanfaatkan besarnya utang sebagai alternatif untuk melakukan penghematan pajak.

Harjito (2011) menjelaskan teori *trade off* menyatakan bahwa hubungan antara struktur modal dengan nilai perusahaan terhadap suatu tingkat *leverage* yang optimal. Berdasarkan teori ini, struktur modal yang optimal dapat dicapai apabila nilai sekarang dari *tax shield* utang adalah sama dengan nilai sekarang dari biaya kesulitan keuangan utang. Apabila perusahaan ingin meningkatkan nilai perusahaan dengan menerbitkan saham (meningkatkan EPS), maka pembiayaan investasi tersebut harus dibiayai dengan utang. Ada tiga ukuran *leverage* yang sering digunakan sebagai proksi dari struktur modal, yaitu rasio *debt to total asset*, rasio *long term debt to total asset*, dan *short term debt to total asset*.

A.1.3. Teori *Pecking Order*

Donaldson (1961) memperkenalkan *pecking order theory*, yaitu pemilihan prioritas dalam menentukan struktur modal suatu perusahaan. Urutan prioritas pemilihan struktur modal diawali dengan saldo laba, kemudian utang kepada pihak ketiga, baik dengan *loan* maupun menjual obligasi, dan terakhir dengan mengeluarkan saham baru. Menurut Myers dan Majluf (1984), teori ini menyatakan

bahwa perusahaan dengan tingkat profitabilitas yang tinggi justru tingkat utangnya rendah, dikarenakan perusahaan yang profitabilitasnya tinggi memiliki sumber dana internal yang berlimpah. Tidak terdapat struktur modal yang optimal di dalam *pecking order theory*. Secara spesifik perusahaan mempunyai urutan preferensi (hierarki) dalam penggunaan dana.

Kondisi di lapangan menunjukkan bahwa tidak semua perusahaan menggunakan urutan (hierarki) penggunaan dana untuk tujuan investasinya sesuai urutan di dalam *pecking order theory*. Penelitian yang dilakukan oleh Singh dan Hamid (1992) menyatakan bahwa perusahaan-perusahaan di negara berkembang lebih memilih untuk menerbitkan ekuitas daripada berutang dalam pembiayaan perusahaan. Hal ini berlawanan dengan *pecking order theory* yang menyatakan bahwa perusahaan akan memilih untuk menerbitkan utang terlebih dahulu daripada menerbitkan saham pada saat membutuhkan pendanaan eksternal.

A.1.4. Teori *Market Timing*

Menurut Copeland (1996), struktur modal adalah pembiayaan permanen yang terdiri dari utang jangka panjang, saham preferen, dan modal pemegang saham. Baker dan Wurgler (2002) mengemukakan *market timing theory* terkait struktur modal. Teori tersebut mengemukakan bahwa perusahaan-perusahaan akan menerbitkan *equity* pada saat *market value* tinggi dan akan membeli kembali *equity* pada saat *market value* rendah. Praktik inilah yang kemudian disebut sebagai *equity market timing*. Menurut Baker dan Wurgler (2002), struktur modal adalah hasil kumulatif dari usaha melakukan *equity market timing* di masa lalu. Baker dan Wurgler menemukan bahwa perusahaan dengan tingkat utang rendah adalah perusahaan yang menerbitkan *equity* pada saat *market value* tinggi dan perusahaan

dengan tingkat utang tinggi adalah perusahaan yang menerbitkan *equity* pada saat *market value* rendah.

Baker dan Wurgler (2002) menggunakan *market-to-book ratio* untuk melihat apakah nilai suatu ekuitas itu *overvalued* atau *undervalued*. Baker dan Wurgler membangun suatu model variabel yaitu *external finance weighted-average market-to-book ratio*. Variabel ini adalah rata-rata tertimbang dari *market-to-book ratio* suatu perusahaan di masa lampau. Variabel ini digunakan oleh Baker dan Wurgler untuk melihat usaha dari suatu perusahaan dalam melakukan *equity market timing*.

Penelitian ini menggunakan teori *trade off* sebagai dasar penentuan variabel struktur modal. Hal ini karena teori *trade off* mempertimbangkan tingkat utang untuk memperoleh keuntungan pembebanan bunga. Teori *trade off* tidak menyarankan penggunaan utang secara penuh pada struktur modal karena ada risiko *financial distress* atau kesulitan keuangan ketika membayar utang. Menurut teori ini, penggunaan utang pada struktur modal akan memperoleh hasil optimal ketika risiko penggunaan utang adalah sama dengan manfaat yang diterima perusahaan atas penggunaan utang tersebut (manfaat pajak). Hal ini berbeda dengan teori MM yang menyebutkan bahwa struktur modal berada pada kondisi optimal ketika komposisi utang adalah 100%.

Peraturan perpajakan memperbolehkan pembebanan biaya bunga atas utang pada laporan laba rugi perusahaan. Perusahaan yang memiliki hutang pada struktur modal akan memperoleh manfaat pajak berupa laba yang berkurang karena adanya biaya bunga tersebut. Laba perusahaan memiliki arah yang linear dengan pajak penghasilan, yaitu semakin kecil laba perusahaan maka semakin kecil beban pajak yang menjadi tanggungan perusahaan.

A.1.5. *Debt to equity ratio (DER)*

Siegel dan Shim (2008) menyatakan *debt to equity ratio (DER)* adalah rasio yang digunakan untuk mengukur besaran struktur modal. *Debt to equity ratio* juga dipergunakan untuk mengukur tingkat penggunaan utang terhadap *total shareholder's equity* yang dimiliki perusahaan. DER disebut rasio *leverage* karena berhubungan dengan utang kepada pihak lain untuk kepentingan perusahaan meningkatkan laba. Modigliani dan Miller (1963) menyatakan nilai perusahaan ditentukan oleh struktur utang, dan utang merupakan salah satu komponen dalam struktur modal. Menurut Modigliani dan Miller, perusahaan dianjurkan untuk berutang sampai titik optimal dan memperoleh manfaat dari utang berupa biaya bunga yang dapat dijadikan pengurang dalam penghitungan penghasilan kena pajak. Struktur modal perusahaan berada pada posisi optimal ketika terjadi keseimbangan antara manfaat menggunakan utang (manfaat pajak) dengan biaya menggunakan utang.

Darsono dan Ashari (2010) menjelaskan *debt to equity ratio* merupakan salah satu rasio *leverage* atau solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio untuk mengetahui kemampuan perusahaan dalam membayar kewajibannya ketika perusahaan tersebut dilikuidasi. Rasio ini juga disebut dengan rasio pengungkit (*leverage*) yaitu menilai batasan perusahaan dalam meminjam uang. Van Horne dan Wachowicz (2009) mengemukakan bahwa *leverage* merupakan penggunaan biaya tetap dalam usaha untuk meningkatkan (*level up*) profitabilitas. Van Horne dan Wachowicz merumuskan *debt to equity ratio* secara matematis sebagai perbandingan antara total utang atau *total debts* dengan *total shareholder's equity*.

Berdasarkan pendapat Sugiono (2009), *debt to equity ratio* menunjukkan perbandingan antara utang dan modal. Rasio ini merupakan salah satu rasio penting karena berkaitan dengan masalah *trading on equity*, yang dapat memberikan pengaruh positif dan negatif terhadap rentabilitas modal sendiri dan perusahaan tersebut. Siegel dan Shim (2008) mendefinisikan *debt to equity ratio* sebagai ukuran yang dipakai untuk menganalisis laporan keuangan untuk memperlihatkan besarnya jaminan yang tersedia untuk kreditur. Sedangkan Kasmir (2010) menyatakan bahwa *debt to equity ratio* merupakan rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas. Rasio ini dicari dengan cara membandingkan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Rasio ini digunakan untuk mengetahui jumlah dana yang disediakan peminjam (kreditur) dengan pemilik perusahaan. Dengan kata lain, rasio ini berfungsi untuk mengetahui setiap rupiah modal sendiri yang dijadikan untuk jaminan utang.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan Antara Utang Dan Modal Perusahaan Untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan. Besarnya perbandingan antara utang dan modal dalam peraturan ini ditetapkan paling tinggi sebesar empat berbanding satu (4:1). Ketentuan ini berlaku mulai Tahun Pajak 2016. Ketentuan ini berlaku bagi Wajib Pajak badan yang didirikan atau bertempat kedudukan di Indonesia yang modalnya terbagi atas saham-saham. Jika rasio utang terhadap modal perusahaan melebihi batasan yang telah ditentukan (4 banding 1), maka ada beban bunga yang dikoreksi fiskal karena melebihi ketentuan tersebut.

Pengertian utang maupun modal dalam peraturan tersebut adalah rata-rata saldo utang atau modal tiap akhir bulan pada tahun pajak yang bersangkutan.

Adapun saldo utang meliputi saldo utang jangka panjang dan saldo utang jangka pendek termasuk saldo utang dagang yang dibebani bunga. Sedangkan Saldo modal meliputi ekuitas sebagaimana dimaksud dalam standar akuntansi keuangan yang berlaku dan pinjaman tanpa bunga dari pihak yang memiliki hubungan istimewa.

Beberapa uraian teori *debt to equity* (DER) di atas, mendorong peneliti untuk menggunakan DER sebagai proksi struktur modal dalam penelitian ini. Rasio DER menceminkan komposisi struktur modal dimana perusahaan dapat mengatur sejauh mana perusahaan menerapkan kebijakan berhutang kepada pihak lain untuk memperoleh manfaat keringanan pajak.

A.2. *Good corporate governance*

Whipple (2018) mendefinisikan teori agensi sebagai kontrak antara satu atau beberapa orang *principal* yang mendelegasikan wewenang kepada orang lain (*agent*) untuk mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Berdasarkan teori agensi, pemegang saham tidak selalu menginginkan manajemen melakukan praktik *tax avoidance* karena terdapat biaya yang harus dikeluarkan. Namun di lain pihak, manajemen perlu melakukan beberapa tindakan yang dapat menaikkan nilai perusahaan, diantaranya dengan memperbesar laba perusahaan. Besarnya laba perusahaan dapat diraih dengan menerapkan *tax avoidance* dan menurut Pohan (2013), salah satu teknik dalam *tax avoidance* adalah menekan biaya pajak seminimal mungkin (*tax shield*).

Teori Agensi

Teori agensi adalah teori utama yang berhubungan dengan *good corporate governance*. Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan keagenan sebagai kontrak yang menyatakan pihak pengelola perusahaan (*agent*) untuk

melakukan jasa tertentu sesuai kepentingan pemilik perusahaan (*principal*) dengan cara pendelegasian wewenang atau otoritas *principal* kepada *agent*. Selanjutnya seorang *agent* mengelola perusahaan dengan baik sesuai keinginan *principal* untuk menghasilkan laba maksimal. *Principal* pada dasarnya menghendaki bertambahnya kemakmuran atau kekayaan, namun *agent* atau manajer sebagai pihak yang diberi wewenang atas pengelolaan perusahaan cenderung melakukan sesuatu yang memaksimalkan kepentingannya dan mengorbankan kepentingan *principal* yang memicu terjadinya masalah keagenan.

Agency theory mengasumsikan bahwa manajer akan bertindak secara oportunistik dengan mengambil keuntungan pribadi sebelum memenuhi kepentingan pemegang saham. Upaya pemilik perusahaan mengurangi konflik kepentingan dengan para manajer tersebut menimbulkan sebuah biaya yang disebut dengan *agency cost*. Biaya keagenan atau *agency cost* setara dengan peningkatan biaya *enforcement* untuk mengurangi kerugian karena ketidakpatuhan. Jensen dan Meckling (1976) menyatakan biaya keagenan yang timbul terdiri atas tiga macam, yaitu: a). *The monitoring expenditure by the principle (monitoring cost)*, yaitu biaya pengawasan untuk mengawasi perilaku dari *agent* dalam mengelola perusahaan, b). *The bonding expenditure by the agent (bonding cost)*, biaya untuk menjamin bahwa *agent* bertindak untuk kepentingan *principal*, dan c). *The residual loss*, yaitu nilai kerugian yang dialami *principal* akibat keputusan yang diambil oleh *agent*, yang menyimpang dari keputusan yang dibuat oleh *principal*.

Good corporate governance secara definitif merupakan sistem yang mengatur dan mengendalikan perusahaan untuk menciptakan nilai tambah (*value added*) untuk semua *stockholder* (Kim dan Im, 2017). Penerapan *good corporate*

governance bertujuan meminimalisasi konflik keagenan. Konflik keagenan muncul apabila tujuan yang ingin dicapai oleh manajer tidak sejalan dengan kepentingan pemegang saham. Pemegang saham mengharapkan pendapatan (*dividen*) yang maksimal atas dana yang mereka investasikan, sedangkan pihak manajemen lebih mementingkan aktivitas operasional perusahaan dengan tidak membagikan *dividen* dan mengalokasikannya sebagai saldo laba. Keselarasan hubungan pemegang saham dan manajer perusahaan akan memengaruhi kebijakan perpajakan yang akan digunakan.

Permasalahan keagenan dapat dikurangi dengan penerapan *corporate governance* yang baik. IICG (2000) menyatakan bahwa penerapan mekanisme *good corporate governance* ditujukan untuk: 1) mengurangi *agency cost*, 2) meminimalkan *cost of capital*, 3) meningkatkan nilai perusahaan, dan 4). Mengangkat citra perusahaan. Lebih lanjut, GCG berperan penting menjaga perusahaan tetap berjalan sesuai aturan yang telah disepakati. Bagi pemegang saham, GCG memberikan harapan bahwa investasi yang telah ditanamkan, dikelola dengan baik dan menghasilkan *return* sesuai yang diinginkan. Sedangkan bagi pemerintah, pelaksanaan GCG dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan (Wahyudi, 2014). Struktur dan dinamika *corporate governance* memengaruhi cara sebuah perusahaan dalam merencanakan pajak dan melaksanakan kewajiban pajak (Friese et al., 2011).

OECD (2004) mengembangkan seperangkat prinsip-prinsip *corporate governance* sebagai berikut:

- a. *Transparency*, yaitu keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan tentang kondisi perusahaan.
- b. *Accountability*, yaitu kejelasan fungsi, struktur, sistem dan pertanggungjawaban perusahaan sehingga pengelolaan perusahaan berjalan secara efektif.
- c. *Responsibility*, yaitu kepatuhan di dalam pengelolaan perusahaan terhadap prinsip korporasi yang sehat dan tidak melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- d. *Independency*, yaitu suatu keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa adanya konflik kepentingan dan/atau pengaruh dari pihak manajemen yang dapat melanggar peraturan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat.
- e. *Fairness*, yaitu perlakuan yang adil dan setara di dalam pemenuhan hak-hak stakeholder yang timbul berdasarkan perjanjian serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Penerapan GCG dalam suatu perusahaan memerlukan suatu mekanisme tertentu. Mekanisme adalah suatu cara kerja tersistem untuk memenuhi persyaratan yang dibutuhkan. Mekanisme *good corporate governance* adalah suatu prosedur dan hubungan yang jelas antara pihak-pihak yang mengambil keputusan dengan pihak yang melakukan pengawasan atas keputusan tersebut. Gillan (2006) membagi mekanisme *corporate governance* menjadi dua, yaitu: mekanisme internal dan mekanisme eksternal. Mekanisme internal berhubungan dengan cara pengendalian perusahaan dengan menggunakan struktur dan proses internal seperti rapat umum pemegang saham, komposisi dewan komisaris, komposisi dewan direksi dan

pertemuan dengan *board of director*. Gillan (2006) menjelaskan mekanisme ini berada di dalam perusahaan dengan pihak komisaris sebagai titik tertinggi yang melakukan sistem pengendalian internal dan pihak manajemen selaku agen perusahaan. Mekanisme eksternal berhubungan dengan cara memengaruhi perusahaan selain dengan menggunakan mekanisme internal (Hastuti, 2011). Mekanisme eksternal dapat berasal dari pasar modal, pasar control perusahaan, pasar tenaga kerja, pemegang saham dan praktik dari aktivitas investor.

Corporate governance merupakan mekanisme pengendalian dalam mengatur dan mengelola perusahaan dengan tujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan yang dapat mewujudkan *shareholders value* (Monks et al., 2001). Pengendalian yang dimaksud di sini diarahkan pada pengawasan perilaku manajer agar tindakannya dapat bermanfaat bagi perusahaan dan pemiliknya. Cadbury (1992) menyatakan penerapan *Corporate Governance* membantu menyelaraskan dan menyatukan berbagai pihak yang memiliki kepentingan berbeda terhadap perusahaan, agar bersama-sama berkolaborasi untuk mencapai tujuan perusahaan.

Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG, 2006) menjadikan dewan komisaris sebagai mekanisme pengendalian internal tertinggi yang bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberi masukan kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Dewan komisaris sebagai wakil pemilik perusahaan melakukan pengawasan terhadap keberlangsungan perusahaan. Mekanisme internal GCG dalam penelitian ini fokus pada struktur dewan komisaris, sedangkan mekanisme eksternal fokus pada kepemilikan institusional. Jensen, M.C. dan Meckling (1976) menyatakan bahwa

kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusional adalah dua mekanisme *corporate governance* yang dapat mengendalikan masalah keagenan. Mashayekhi dan Bazaz (2010) menyatakan bahwa ukuran dari kualitas mekanisme *good corporate governance* adalah seberapa efektif mekanisme tersebut mengurangi konflik keagenan antara pemilik dan direksi.

Richardson et al. (2016) menyebutkan *good corporate governance* mempunyai pengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Perilaku *tax avoidance* dapat dikurangi dengan melaksanakan tata kelola perusahaan yang baik. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Wahyudi (2014), bahwa penerapan GCG juga dapat meningkatkan kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perpajakan. Struktur dan dinamika *corporate governance* memengaruhi cara sebuah perusahaan dalam merencanakan pajak dan melaksanakan kewajiban pajak (Friese et al., 2011).

A.3. Liquiditas

Copeland (1996) menjelaskan rasio liquiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban utang jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Liquiditas merupakan salah satu faktor penting perusahaan dalam penyediaan kebutuhan uang tunai dan sumber-sumber untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancarnya. Menurut Riyanto (2010), liquiditas adalah berhubungan dengan masalah kemampuan suatu perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansialnya yang segera harus dipenuhi. Jumlah alat-alat pembayaran (alat-alat likuid) yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat merupakan kekuatan membayar dari perusahaan yang bersangkutan.

Hani (2015) berpendapat liquiditas adalah kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban keuangan yang segera dapat dicairkan atau yang sudah jatuh tempo. Secara spesifik liquiditas mencerminkan ketersediaan dana yang dimiliki perusahaan guna memenuhi semua utang yang akan jatuh tempo. Sedangkan menurut Rambe (2016) rasio liquiditas merupakan rasio yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya atau *current liabilities* dengan menghubungkan jumlah kas dan aset lancar lain dengan kewajiban jangka pendek.

Liquiditas umumnya diukur dengan perbandingan antara aset lancar dengan utang lancar yang disebut dengan rasio lancar atau *current ratio*. Selain *current ratio* ada beberapa jenis liquiditas sesuai manfaatnya (Harahap, 2013), yaitu:

- 1). Rasio lancar/*current ratio*, yaitu rasio yang menunjukkan sejauh mana aset lancar (*current assets*) menutupi kewajiban-kewajiban lancar (*current liabilities*).
- 2). Rasio cepat/*quick ratio*, yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan aset lancar yang paling likuid (kas, persediaan dan aset paling likuid lainnya) untuk dapat menutupi utang lancar.
- 3). Rasio kas atas aset/*cash to current ratio*, yaitu rasio yang menunjukkan porsi jumlah kas atau dapat juga disebut cash dalam aset lancar yang dapat digunakan perusahaan untuk menutup utang lancar.

Menurut Munawir (2007), tujuan dan manfaat dari rasio liquiditas adalah untuk menganalisis dan menginterpretasikan posisi laporan keuangan jangka pendek, dan membantu manajemen untuk mengecek efisiensi modal kerja yang digunakan

dalam perusahaan. Rasio liquiditas juga berguna bagi kreditor dan pemegang saham untuk mengetahui pembayaran bunga dan prospek dari dividen di masa mendatang.

Peneliti memilih *total current asset* dibagi *total current liabilities* sebagai proksi variabel liquiditas. Kewajiban perpajakan adalah kewajiban jangka pendek dimana untuk memenuhinya diperlukan kemampuan yang bersifat liquid. Hal ini relevan dengan hipotesis yang dibangun dalam penelitian ini bahwa liquiditas memengaruhi potensi *tax avoidance* perusahaan.

A.4. Ukuran perusahaan

Suwito dan Arleen Herawaty (2005) menjelaskan bahwa ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi besar dan kecil dengan berbagai cara seperti total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata penjualan, dan jumlah penjualan. Menurut Indriani (2014) tahap kedewasaan perusahaan ditentukan berdasarkan total aset, semakin besar total aset menunjukkan bahwa perusahaan memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang panjang. Hal ini juga menggambarkan bahwa perusahaan lebih stabil dan mampu menghasilkan laba sekaligus membayar kewajibannya dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki aset yang lebih kecil.

Brigham dan Houston (2011) mendefinisikan ukuran perusahaan sebagai sebuah ukuran besar kecilnya sebuah perusahaan yang ditunjukkan atau dinilai dengan total asset, total penjualan, jumlah laba, beban pajak dan lain-lain. Menurut Hartono (2008) besar kecilnya perusahaan dapat diukur dengan total aset/ besar harta perusahaan dengan menggunakan perhitungan nilai logaritma total aset. Sedangkan menurut Torang (2012), ukuran organisasi adalah menentukan jumlah anggota yang berhubungan dengan pemilihan cara pengendalian kegiatan dalam usaha mencapai

tujuan. Ukuran perusahaan (*firm size*) dapat memengaruhi kinerja sosial perusahaan karena perusahaan yang besar mempunyai pandangan yang lebih jauh, sehingga lebih berpartisipasi dalam menumbuhkan kinerja sosial perusahaan.

Dari beberapa definisi tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa ukuran perusahaan merupakan nilai besar kecilnya perusahaan yang ditunjukkan oleh total aset, total penjualan, jumlah laba, yang dapat memengaruhi kinerja sosial perusahaan dan mendorong tercapainya tujuan perusahaan.

A.5. *Tax avoidance*

Pohan (2013) mendefinisikan *tax avoidance* sebagai upaya mengefisienkan beban pajak dengan cara menghindari pengenaan pajak dengan mengarahkannya pada transaksi yang bukan obyek pajak. *Tax avoidance* ada dua macam, yaitu penghindaran pajak yang diperbolehkan (*acceptable tax avoidance*) dan penghindaran pajak yang tidak diperbolehkan (*unacceptable tax avoidance*). Perbedaan keduanya terletak pada ada atau tidaknya usaha/tindakan yang dilakukan wajib pajak yang sesuai dengan maksud dan tujuan dari undang-undang (pemerintah), serta apakah perusahaan/wajib pajak yang bersangkutan sengaja melakukan transaksi yang direkayasa (Winarno, 2017).

Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)* menyebutkan bahwa terdapat tiga karakter dalam penghindaran pajak, yaitu:

- 1). Adanya unsur *artificial* dimana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.

- 2). Suatu skema yang memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan padahal bukan seperti itu yang dimaksud oleh pembuat undang-undang.
- 3). Kerahasiaan sebagai bentuk dari skema dimana umumnya para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga rahasia.

Ada beberapa macam pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*). Hanlon dan Heitzman (2010) menyebut ada dua belas cara mengukur *tax avoidance*, sebagaimana disajikan dalam tabel 2.1 di bawah ini:

Tabel 2.1
Pengukuran Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)

No.	Pengukuran	Cara Penghitungan	Keterangan
1	GAAP ETR	$\frac{\text{Worldwide total income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Total tax expense per dollar of pre-tax book income
2	Current ETR	$\frac{\text{Worldwide current income tax expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Current tax expense per dollar of pre-tax book income
3	Cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Cash taxes paid per dollar of pre-tax book income
4	Long-run cash ETR	$\frac{\text{Worldwide cash taxes expense}}{\text{Worldwide total pre-tax accounting income}}$	Sum of cash taxes paid over n years divided by the sum of pre-tax earnings over n years
5	ETR Differential	Statutory ETR-GAAP ETR	The difference of between the statutory ETR and firm's GAAP ETR
6	DTAX	Error term from the following regression: $\text{ETR differential} \times \text{Pre-tax book income} = a + b \times \text{Control} + e$	The unexplained portion of the ETR differential
7	Total BTD	$\text{Pre-tax book income} - ((\text{U.S. CTE} + \text{Fgn CTE}/\text{U.S. STR} - (\text{NOLt} - \text{NOLt-1}))$	The total difference between book and taxable income

No.	Pengukuran	Cara Penghitungan	Keterangan
8	Temporary BTD	Deferred tax expense/U.S.STR	The total difference between book and taxable income
9	Abnormal total BTD	Residual from BTD/TAit = β TAit + β mi + eit	A measure of unexplained total book-tax differences
10	Unrecognized tax benefits	Disclosed amount post-FIN48	Tax liability accrued for taxes not yet paid on uncertain positions
11	Tax shelter activity	Indicator variable for firm accused of engaging in a tax shelter	Firms identified via firm disclosure, the press, or IRS confidential data
12	Marginal tax rate	Simulated marginal tax rate	Present value of taxes on an additional dollar of income

Sumber: Hanlon dan Heitzman (2010)

Catatan:

ETD : *Effective Tax Rate*, yaitu penghindaran pajak secara legal atau *tax avoidance* (Swenson, 2007)

BTD : *Book Tax Difference*, yaitu perbedaan jumlah laba akuntansi dan jumlah laba fiskal (Chi, Pincus, & Teoh, 2014)

GAAP : *Generally Accepted Accounting Principle*, (*The Financial Accounting Standard Board/FASB-USA*)

Menurut Dyreng et al. (2010), variabel penghindaran pajak dihitung melalui CETR (*cash effective tax rate*) yaitu kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. Semakin besar CETR mengindikasikan semakin rendah tingkat penghindaran pajak perusahaan. Pengukuran tax avoidance menggunakan *cash ETR* menurut Dyreng et al. (2010) karena *cash ETR* tidak terpengaruh dengan adanya perubahan estimasi seperti penyisihan penilaian atau perlindungan pajak. Selain itu pengukuran menggunakan *cash ETR* dapat menjawab permasalahan dan keterbatasan atas pengukuran *tax avoidance* berdasarkan model GAAP ETR.

Semakin kecil nilai *cash* ETR, maka semakin besar penghindaran pajaknya, dan semakin besar nilai *cash* ETR maka semakin kecil penghindaran pajaknya.

Kim dan Im (2017) menggunakan *total accruals* untuk memisahkan komponen *book tax different* yang disebabkan oleh tujuan pajak dan manajemen laba. Sedangkan Kanagaretnam et al. (2016) menggunakan *discretionary accrual*. *Discretionary accrual* merupakan proksi manajemen laba dengan pengukurannya menggunakan formula dari Dechow et al. (2015). Kanagaretnam et al. (2016) menggunakan *discretionary accrual* tersebut untuk memisahkan komponen dari *book tax different* yang disebabkan oleh manajemen laba untuk tujuan pajak.

Penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR) sebagai proksi *tax avoidance*. Beberapa hal yang menjadi alasan peneliti memilih rumus tersebut adalah: i). ETR mencerminkan beban pajak terhadap laba sebelum pajak, dimana jumlah beban pajak sudah memperhitungkan koreksi fiskal, kompensasi rugi, dan perataan laba tahun sebelumnya, ii). Ada keterbatasan pemilihan rumus lainnya sebagai proksi *tax avoidance* seperti; peneliti tidak bisa memilih rumus *book tax difference* (perbedaan laba komersil dan laba fiskal) dikarenakan keterbatasan akses ke dokumen/pembukuan perusahaan, dan peneliti tidak memilih rumus *cash effective tax rate* (CETR) karena banyak perusahaan merugi selama periode penelitian (tahun 2013 s.d. 2017), sehingga jumlah sampel tidak memenuhi batasan untuk dilakukan penelitian lebih lanjut. Total obyek penelitian sebanyak 177 perusahaan manufaktur, dan hanya 14 sampel perusahaan yang tidak merugi selama periode penelitian. Perusahaan yang mengalami rugi tidak mempunyai kewajiban pembayaran pajak penghasilan sehingga tidak diketahui nilai CETR-nya.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian pada tesis ini mengambil referensi dan literatur dari penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan. Secara ringkas hasil penelitian terdahulu dijelaskan sebagai berikut; Richardson et al. (2016) menyimpulkan struktur kepemilikan berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Penelitian Ghazouani (2013) juga memberikan hasil yang sama bahwa struktur modal yang diteliti berdasarkan teori *trade off* memengaruhi *tax avoidance* secara tidak langsung. Perusahaan akan terus berhutang pada titik optimal mendapatkan manfaat keringanan pajak menurut teori *trade off*, dan itu sesuai dengan hasil penelitiannya.

Hasil yang berbeda ditunjukkan oleh penelitian Irianto, (2017). *Leverage* yang mencerminkan struktur modal perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Penelitian Munandar et al. (2016), yang mengambil sampel beberapa perusahaan manufaktur di BEI selama periode 2013-2015, juga memberikan hasil yang sama bahwa *leverage* tidak memengaruhi *tax avoidance*.

Lebih lanjut, manajemen cenderung memperbesar utang (*leverage*) untuk mendapatkan keuntungan pengurangan pembayaran pajak meskipun dihadapkan pada kondisi *financial distress* (Harrington dan Smith, 2012). Praktek tersebut relevan dengan praktik yang dilakukan perusahaan multinasional (Buettner et al., 2009). Perusahaan berskala multinasional dapat dengan mudah membuat skema utang-piutang antar perusahaan afiliasi untuk memperoleh keuntungan pajak. Semakin tinggi utang jangka panjang maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap *tax avoidance*.

Perusahaan akan selalu menggunakan *tax deductible expense* dalam usahanya melakukan *tax avoidance* pada berapapun pengenaan tarif pajak oleh pemerintah.

Pembebanan biaya bunga akan mengecilkan pajak terutang, dan pajak terutang dalam jumlah kecil menyebabkan ETR (*tax avoidance*) menjadi besar. Jadi secara tidak langsung struktur modal memengaruhi *tax avoidance* (Oktariani dan Lembut, 2019).

Penelitian Kerr et al. (2016) menghasilkan kesimpulan bahwa *good corporate governance* (GCG) memengaruhi *tax avoidance*. Penelitian Xia et al. (2017) juga memberikan hasil yang sama bahwa GCG yang diprosikan dalam *social trust environment* memengaruhi *tax avoidance*. Kanagaretnam et al. (2016) juga memberikan hasil yang sama, yaitu *Good corporate governance* yang diprosikan dalam kualitas audit negatif signifikan memengaruhi *tax avoidance*, artinya semakin baik kualitas audit perusahaan maka semakin rendah *tax avoidance*. Hasil penelitian Lanis dan Richardson (2018) memperkuat 3 penelitian sebelumnya di atas. *Good corporate governance*, yang diprosikan melalui *outside directors* negatif signifikan memengaruhi *CSR performance* dan *tax avoidance*. Kehadiran direktur independen menjadi komponen penting untuk pengawasan operasional perusahaan.

Fama dan Jensen (1983) menyatakan kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen sering bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba bersih adalah dengan menekan biaya-biaya termasuk pajak, dimana hal tersebut dapat mendorong manajer untuk melakukan *tax avoidance*. Semakin besar proporsi

komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula tingkat pengawasan pihak independen terhadap tindakan *tax avoidance* perusahaan yang dilakukan oleh manajemen.

Oler dan Picconi (2014) meneliti implikasi peristiwa yang dapat terjadi di masa depan terkait adanya *insufficient* dan *excess cash* perusahaan. Penelitian tersebut menyebut pengaruh tidak langsung perusahaan yang mengalami kekurangan kas terhadap beban pajak. Penelitian Adisamartha dan Noviani (2015) menghasilkan kesimpulan adanya pengaruh likuiditas terhadap *tax avoidance*. Likuiditas secara positif signifikan mempengaruhi *tax avoidance*. Hal ini berarti semakin rendah tingkat likuiditas perusahaan maka semakin rendah *tax avoidance*. Hasil berbeda ditunjukkan penelitian (Stanfield, 2011) bahwa *cash liquidity* tidak memengaruhi *tax avoidance*.

Fernández-Rodríguez dan Martínez-Arias (2012) menyimpulkan hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan beban pajak (*tax burden*). Perusahaan yang mempunyai beban pajak yang besar tanpa disertai *corporate governance* yang baik cenderung melakukan *tax avoidance* (Angueira, 2018). Ukuran perusahaan mempunyai hubungan positif dan memengaruhi *tax avoidance*.

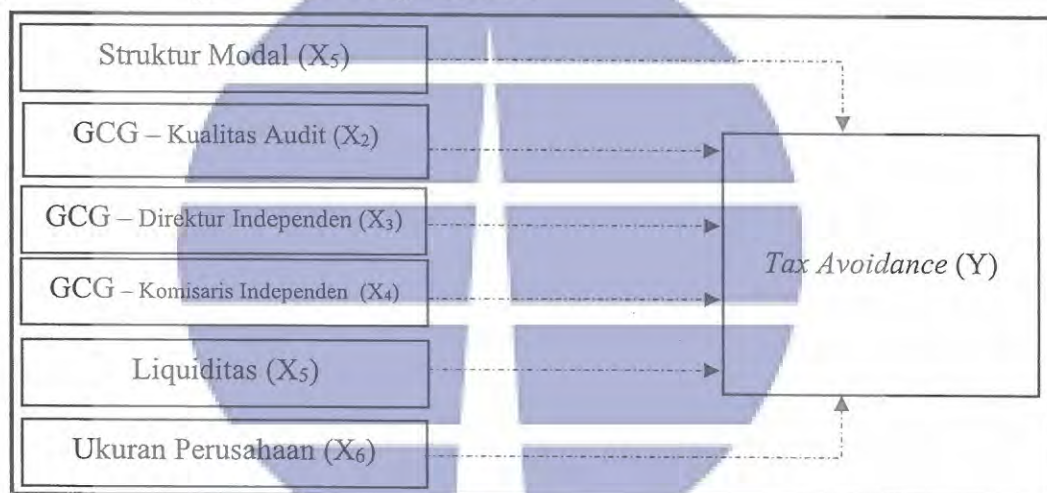
Pratama dan Padjadjaran (2017), dan Kim dan Im (2017) juga menyimpulkan hal yang sama bahwa ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*. Ukuran perusahaan berhubungan dengan aset yang dimiliki. Sebagian besar asset perusahaan adalah berupa aset tetap. Semakin besar aset tetap maka semakin besar beban penyusutan. Beban penyusutan akan mengurangi laba bersih perusahaan dan memperkecil beban pajak yang dibayarkan. Pembayaran pajak linear dengan ETR.

Semakin kecil beban pajak maka semakin besar ETR dan begitu juga sebaliknya. Jadi secara tidak langsung ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*.

Peneliti mengumpulkan beberapa jurnal dan artikel pendukung yang secara lengkap dirangkum ke dalam lampiran tabel 1.

C. Kerangka Berpikir

Berdasarkan kajian teori dan penelitian terdahulu, kerangka pemikiran dari penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Keterangan:

→ Berpengaruh secara parsial

Penelitian ini menganalisis lebih jauh apakah struktur modal, *good corporate governance*, liquiditas, dan ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*. Penelitian dilakukan secara parsial untuk menganalisis pengaruh masing-masing variabel bebas, yaitu struktur modal, *good corporate governance*, liquiditas, dan ukuran perusahaan, dan terhadap variabel terikat *tax avoidance*.

D. Operasionalisasi Variabel

Ada dua jenis variabel dalam penelitian ini yaitu variabel independen X (struktur modal, *good corporate governance*, liquiditas, ukuran perusahaan) dan variabel dependen Y (*tax avoidance*). Di bawah ini disajikan penjabaran masing-masing variabel tersebut.

D.1. Variabel independen (variabel bebas)

- 1) Struktur modal (X_1). Variabel ini menggunakan *debt to equity ratio* (DER) sebagai proksi struktur modal. *Debt to equity ratio* didefinisikan sebagai rasio yang digunakan untuk menilai utang dengan ekuitas (Kasmir, 2010). Rasio ini merupakan perbandingan antara seluruh utang, termasuk utang lancar dengan seluruh ekuitas. Harahap dan Syafri (2013) mendefinisikan *debt to equity ratio* sebagai penggambaran sejauh mana modal pemilik dapat menutupi utang-utang kepada pihak luar. Skala pengukurannya menggunakan rasio sebagai berikut:

$$\text{Debt to equity ratio} = (\text{Total Debt}) / (\text{Total Equity})$$

Sumber: Kasmir (2010), Harahap (2013)

- 2) *Good corporate governance* (X_2 , X_3 , dan X_4). Penelitian ini menggunakan 3 proksi *good corporate governance*, yaitu kualitas audit (KA), Direktur Independen (DI), dan komisaris independen (KI). Perumusan proksi-proksinya adalah sebagai berikut:

- Kualitas hasil audit (X_2), dihitung dengan menggunakan proksi audit yang dilakukan 4 KAP besar, yaitu: Deloitte, PWC, Ernst & Young dan KPMG. Perusahaan yang menggunakan salah satu dari keempat KAP besar

tersebut diberikan skor 1 dan jika tidak menggunakan diberikan skor 0 (*dummy*).

- Direktur Independen (X_3), diukur dengan membandingkan jumlah anggota direktur independen dengan keseluruhan total jumlah anggota direktur (Khan et al. 2017). Direktur independen adalah direktur yang berasal dari eksternal perusahaan. Proksi direktur independen dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\sum \text{Anggota direktur independen}}{\sum \text{Anggota direktur}}$$

- Komisaris Independen (X_4), diukur dengan membandingkan jumlah anggota dewan komisaris independen dengan keseluruhan total jumlah anggota dewan komisaris (Khan et al., 2017). Komisaris independen adalah komisaris yang berasal dari eksternal perusahaan. Berdasarkan peraturan Bursa Efek Indonesia (BEI) Nomor Kep-305/BEJ/07-2004 setiap perusahaan yang telah memiliki komisaris independen sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) dari jumlah seluruh anggota komisaris berarti telah memenuhi pedoman *corporate governance*. Proksi komisaris independen dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$= \frac{\sum \text{Anggota dewan komisaris independen}}{\sum \text{Anggota dewan komisaris}}$$

- 3) Liquiditas (X_5). Penelitian ini menggunakan rasio lancar (*current ratio*) sebagai proksi liquiditas (LIQ). Kasmir (2010) menyatakan bahwa rasio liquiditas adalah rasio yang menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi utang jangka pendek dengan menggunakan aset lancar. Menurut Subramanyam (2012), liquiditas adalah sarana untuk mengevaluasi

kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendek. Sedangkan Sartono (2008) mengatakan bahwa rasio liquiditas menunjukkan kemampuan untuk membayar kewajiban finansial jangka pendek tepat pada waktunya. Rumus liquiditas dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{Current Ratio} = \text{Total Current Asset} / \text{Total Current Debt}$$

Sumber: Kasmir (2010), Subramanyam (2012), Sartono (2008)

- 4) Ukuran perusahaan (X_6). Penelitian ini menggunakan proksi total aset untuk menentukan ukuran perusahaan (SIZE). Menurut Munandar (2016) ukuran sebuah perusahaan mempunyai hubungan negatif signifikan terhadap *tax avoidance*, artinya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah nilai CETR (*tax avoidance*). Menurut R. Murhadi (2013) *firm size* diukur dengan mentransformasikan total aset yang dimiliki perusahaan ke dalam bentuk logaritma natural. Ukuran perusahaan diproksikan dengan menggunakan *Log Natural* (Ln) total aset dengan tujuan mengurangi fluktuasi data yang berlebih. Penggunaan *log natural* akan menyederhanakan jumlah aset yang memiliki nilai ratusan milyar bahkan trilyun, tanpa merubah proporsi dari jumlah aset yang sesungguhnya. Menurut Harahap (2013), ukuran perusahaan diukur dengan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aset (*total asset*) perusahaan. Penggunaan total aset berdasarkan pertimbangan bahwa total aset mencerminkan ukuran perusahaan dan diduga memengaruhi ketepatan waktu. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan logaritma natural (Ln) dari rata-rata total aset (*total assets*) perusahaan untuk menentukan ukuran perusahaan, sebagai berikut:

$$\text{Ukuran Perusahaan/Firm Size} = \text{Ln (Total Asset)}$$

Sumber: R. Murhadi (2013), Harahap (2013)

D.2. Variabel dependen (variabel terikat)

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah *tax avoidance*, yang diukur dengan *effective tax rate* (ETR). Menurut Dyreng et al. (2008), variabel penghindaran pajak dihitung melalui ETR (*effective tax rate*) yaitu biaya atau beban pajak perusahaan dibagi dengan laba sebelum pajak. ETR adalah semua pajak yang dibiayakan atau dibebankan dibagi dengan laba perusahaan sebelum pajak penghasilan. *Effective tax rate* digunakan untuk mengidentifikasi kreasifan perencanaan pajak yang dilakukan manajer karena dianggap perencanaan yang efektif. Hanlon dan Heitzman (2010) menyebut ada dua belas cara mengukur *tax avoidance* dan salah satu pengukurannya adalah menggunakan *current effective tax rate* (ETR). Penelitian ini menggunakan ETR untuk menentukan *tax avoidance* dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = (\text{Tax Expense}) / (\text{Net Income Before Tax})$$

Sumber: Dyreng et al. (2008), Hanlon & Heitzman (2010)

E. Hipotesis

Penulis mengembangkan hipotesis dalam penelitian pengaruh struktur modal, *good corporate governance*, liquiditas dan ukuran perusahaan terhadap potensi *tax avoidance*, sebagai berikut:

E.1. Pengaruh struktur modal terhadap potensi *tax avoidance*

Harrington dan Smith (2012) menyimpulkan bahwa pemilihan struktur modal memengaruhi *tax avoidance*. Manajemen perusahaan cenderung memperbesar utang (*leverage*) untuk mendapatkan keuntungan berupa pengurangan pembayaran pajak meskipun dihadapkan pada ancaman suatu kondisi *financial distress*. Buettner et al. (2009) meneliti pengaruh struktur modal terhadap *tax avoidance*.

Penelitian dilakukan terhadap beberapa perusahaan multinasional yang saling berafiliasi dan menghasilkan kesimpulan bahwa struktur modal, yang sebagian besar berupa pinjaman antar afiliasi, memengaruhi *local tax avoidance*. Perusahaan yang menggunakan utang untuk mencukupi struktur modalnya memperoleh keuntungan berupa pembebanan biaya bunga atas utang dalam menghitung pajak terutang. Artinya semakin tinggi utang jangka panjang maka semakin tinggi pengaruhnya terhadap *tax avoidance*. Alnajjar (2015) melakukan penelitian pemilihan struktur modal berdasarkan risiko bisnis, dimana perusahaan cenderung menggunakan struktur modal yang mempunyai manfaat pengurangan pajak (*tax shields benefit*) terbesar. Nilai dari *tax shield benefit* ini dihitung melalui perkalian pengurangan dengan *effective tax rate (tax avoidance)*. Jadi secara tidak langsung struktur modal memengaruhi perilaku *tax avoidance* perusahaan.

Oktariani dan Lembut (2019) menyebutkan dalam penelitiannya bahwa perusahaan akan selalu menggunakan *tax deductible expense* dalam usahanya melakukan *tax avoidance* berapapun tarif pajak yang dikenakan pemerintah. Perusahaan yang menggunakan utang dalam struktur modalnya akan mempunyai biaya/beban bunga pinjaman yang secara pajak boleh dibebankan (*tax deductible expense*). Pembebanan biaya bunga tersebut akan mengecilkan pajak terutang, dan kecilnya pajak terutang menyebabkan ETR (*tax avoidance*) menjadi besar. Jadi secara tidak langsung struktur modal memengaruhi *tax avoidance*.

Struktur modal dalam penelitian ini diproksikan dalam DER atau *debt to equity ratio*. Penelitian Alfina et al. (2018) menghasilkan kesimpulan bahwa *leverage* yang diproksikan ke dalam *debt to equity ratio* memengaruhi *tax avoidance*. Penelitian dilakukan terhadap 45 perusahaan di Bursa Efek Indonesia. Hasil yang

sama ditunjukkan oleh penelitian Turyatini (2017), bahwa *debt to equity ratio* berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Suyanto dan Supramono (2012) melakukan penelitian pengaruh *leverage* terhadap *tax avoidance*. Hasil penelitian menunjukkan *leverage* mempunyai pengaruh positif signifikan terhadap *tax avoidance*. *Leverage* pada penelitian tersebut diproksikan melalui rasio total utang terhadap total aset.

Nabilla dan Fikri (2018) menyimpulkan bahwa *leverage (debt to equity ratio/DER)* berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Tingkat *leverage* yang besar akan meningkatkan biaya bunga atas utang dan hal tersebut membuat beban pajak semakin kecil. Pajak terutang yang kecil mengindikasikan tingkat *tax avoidance* yang besar (Putri dan Putra, 2017). Tingkat *leverage* yang tinggi akan mengurangi beban pajak perusahaan karena terdapat biaya bunga yang bisa dibebankan untuk menghitung pajak sesuai peraturan. Penelitian dilakukan pada perusahaan terbuka (*go public*) yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

Oleh karena itu berdasarkan uraian penelitian sebelumnya dan pertimbangan penulis, hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₁: Struktur Modal memengaruhi Tax avoidance

E.2. Pengaruh *good corporate governance* terhadap potensi *tax avoidance*

Fama dan Jensen (1983) menyatakan kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi. Dimana dengan semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Manajemen sering bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer. Salah satu cara meningkatkan laba

bersih adalah dengan menekan biaya-biaya termasuk pajak, dimana hal tersebut dapat mendorong manajer untuk melakukan *tax avoidance*. Semakin besar proporsi komisaris independen dalam suatu perusahaan, maka semakin besar pula tingkat pengawasan pihak independen terhadap tindakan *tax avoidance* perusahaan yang dilakukan oleh manajemen.

Armstrong et al. (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh *corporate governance* terhadap perilaku *tax avoidance* selama tahun 2007 – 2011. Hasil penelitian menunjukkan *good corporate governance* mempunyai pengaruh positif terhadap tingkat *tax avoidance* perusahaan. Armstrong et al. (2015) mengidentifikasi 2 atribut *corporate governance* dalam penelitiannya, yaitu: kemampuan *financial expertise* dan *independence* dewan komisaris. *Financial expertise* berhubungan dengan keahlian untuk mengukur biaya dan/atau manfaat yang diperoleh ketika perusahaan melakukan *tax avoidance*, sedangkan *independence* berhubungan dengan kemampuan para dewan untuk memonitor para manajer ketika mereka melakukan *tax avoidance*. Namun pengaruh positif kedua atribut *corporate governance* tersebut berlaku pada level *tax avoidance* yang rendah. Ketika level *tax avoidance* yang tinggi, *financial expertise* dan *independence* tersebut mempunyai pengaruh negatif. Merujuk penelitian sebelumnya, Desai dan Dharmapala (2006) menyebut hal tersebut sebagai *agency problems* antara pemegang saham dan manajer, dimana terdapat ketidaksepakatan antara mereka terkait biaya dan manfaat yang diperoleh dengan melakukan *tax avoidance*. Menurut Desai dan Dharmapala (2006), dengan menambah *independent boards* dapat memitigasi dan mengurangi *the agency problems* tersebut.

Gallemore dan Labro (2015) menunjukkan *corporate governance* memengaruhi perilaku *tax avoidance*. Penelitian tersebut menggunakan ketersediaan informasi dengan kualitas yang tinggi sebagai proksi *corporate governance*. Tingginya kualitas informasi yang tersedia terbukti mampu menekan perilaku manajer dalam melakukan tindakan *tax avoidance*. Penelitian Xia, et al., (2017) menunjukkan hasil yang sama yaitu *good corporate governance* yang diproksikan ke dalam *social trust* dan kepemilikan institusi memengaruhi *tax avoidance*. Nugroho dan Agustia (2017) melakukan penelitian pengaruh kepemilikan institusi (GCG) terhadap *tax avoidance* dan memperoleh hasil bahwa kepemilikan institusi memengaruhi *tax avoidance*. Secara simultan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak/*tax avoidance*.

Kerr et al. (2016) fokus pada perubahan secara radikal *governance system* di Mexico di 2000. Pada tahun tersebut terdapat reformasi yang signifikan dan komprehensif yang terkenal dengan "*Code of Best Governance Practices*". Inti dari pelaksanaan reformasi tersebut adalah upaya untuk menjalankan sistem pengelolaan perusahaan yang baik, salah satunya dengan menguatkan sistem pengendalian internal dan penyampaian laporan keuangan secara lebih terbuka (transparansi). Hasil penelitian menunjukkan perubahan sistem *corporate governance* meminimalkan adanya *tax avoidance*. Upaya penyelenggaraan *good corporate governance* mendorong perusahaan-perusahaan di Meksiko untuk lebih sedikit melakukan *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan penelitian Desai dan Dharmapala (2006) yang menyatakan tingkat *tax avoidance* yang rendah pada

perusahaan yang menerapkan *high-powered equity incentives (good corporate governance)*.

Putri et al. (2016) memasukkan 3 indikator *corporate governance* dalam penelitiannya, yaitu: kepemilikan institusi, dewan komisaris dan komisaris independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perusahaan manufaktur di Indonesia melakukan *tax avoidance* dalam manajemen laba perusahaan mereka. Hanya variabel kepemilikan institusi yang mampu mereduksi efek *tax avoidance* dalam manajemen laba perusahaan, sedangkan dewan komisaris dan komisaris independen menunjukkan hasil negatif yaitu tidak mampu mereduksi efek *tax avoidance* dalam manajemen laba. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Jamei (2017) ketika meneliti hubungan *corporate governance* dan *tax avoidance* pada beberapa perusahaan yang terdaftar dalam Tehran Stock Exchange selama tahun 2011-2015. Dari semua indikator *corporate governance* (jumlah anggota dewan, non-anggota dewan, kepemilikan manajerial dan kepemilikan institusi), diketahui tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap praktik *tax avoidance* perusahaan.

Pratama dan Padjadjaran (2017) menunjukkan *corporate governance* mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance*. *Corporate governance* diprosikan ke dalam: (1) ukuran/jumlah dewan komisaris, (2) proporsi/jumlah komisaris independen, (3) hasil audit perusahaan dan (4) the komite audit. Penelitian dilakukan terhadap perusahaan selama periode tahun 2011 sampai dengan tahun 2015.

Kehadiran direktur independen menjadi komponen *corporate governance* dalam penelitian yang dilakukan Lanis dan Richardson (2018). Hasil yang sama

ditunjukkan penelitian Wahab et al. (2017) di Malaysia. *Corporate governance* pada penelitian tersebut digunakan sebagai variabel yang memoderasi pengaruh koneksi politik terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang terkoneksi politik memiliki tingkat *tax aggressiveness* yang lebih besar daripada perusahaan yang tidak terkoneksi politik dan hasil penelitian menunjukkan *corporate governance* tidak dapat memitigasi pengaruh koneksi politik terhadap tingkat *tax aggressiveness*.

Eksandy (2017) menggunakan proksi komisaris independen, komite audit, dan kualitas audit sebagai indikator *good corporate governance* dalam penelitiannya. Kesimpulan yang didapatkan adalah komisaris independen dan kualitas audit memengaruhi *tax avoidance*, sedangkan komite audit tidak signifikan memengaruhi *tax avoidance*. Proksi komisaris independen diukur menggunakan persentase jumlah komisaris independen terhadap jumlah total komisaris, proksi komite audit diukur dari jumlah komite audit dalam suatu perusahaan, dan proksi kualitas audit diukur menggunakan variabel *dummy*, yaitu jika perusahaan diaudit oleh KAP *the big four* (Price Waterhouse Cooper – PWC, Deloitte, Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) maka akan diberi skor 1, dan jika diaudit selain KAP *the big four* tersebut diberikan skor 0.

Berdasarkan uraian masalah dan penelitian sebelumnya, penulis merumuskan hipotesis kedua, ketiga, dan keempat terkait *good corporate governance* dalam penelitian ini sebagai berikut:

H₂: Kualitas audit memengaruhi tax avoidance

H₃: Direktur independen memengaruhi tax avoidance

H₄: Komisaris independen memengaruhi tax avoidance

E.3. Pengaruh liquiditas terhadap potensi *tax avoidance*

Perusahaan dengan liquiditas yang tinggi menunjukkan tingginya kemampuan perusahaan untuk memenuhi atau menyelesaikan utang jangka pendek. Tingkat liquiditas yang tinggi menunjukkan kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan sehat dan tidak memiliki masalah mengenai arus kas, sehingga mampu menanggung biaya-biaya yang muncul seperti pajak.

Oler dan Picconi (2014) menguji pengaruh liquiditas terhadap *tax avoidance* secara tidak langsung. Mereka meneliti apakah *insufficient cash* atau *excess cash* memengaruhi keberlangsungan perusahaan di masa mendatang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *insufficient cash* atau *excess cash* memengaruhi *return* dan beban pajak (*tax burden*) perusahaan. Semakin besar perusahaan maka semakin besar pula beban pajak yang harus dibayar. Lebih lanjut, Fernández-Rodríguez dan Martínez-Arias (2012) menunjukkan bahwa perusahaan yang mempunyai beban pajak besar cenderung melakukan upaya *tax avoidance*.

Fajar Adisamartha dan Noviani (2015) dan Indradi (2018) menunjukkan hasil bahwa liquiditas mempunyai berpengaruh dan signifikan terhadap *tax aggressiveness/tax avoidance*. Menurut Indradi (2018), liquiditas menunjukkan kemampuan perusahaan untuk membayar kewajiban jangka pendek. Indradi menggunakan rasio lancar untuk menghitung liquiditas, yaitu rasio antara asset lancar dan utang lancar. Hasil penelitian menunjukkan korelasi positif liquiditas terhadap *tax avoidance*. Liquiditas memengaruhi tingkat *tax avoidance*. Hal ini sejalan dengan Fernández-Rodríguez dan Martínez-Arias, (2012) yang meneliti karakteristik bisnis yang memengaruhi *tax avoidance (effective tax rate)*. Hasil penelitian menunjukkan *intensity inventory* berpengaruh signifikan terhadap *tax*

avoidance. Liquiditas berhubungan erat dengan *intensity inventory* karena *inventory*/persediaan masuk ke dalam komponen asset lancar yang menjadi komponen dalam penghitungan liquiditas.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, hipotesis ketiga penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₅: Liquiditas memengaruhi tax avoidance

E.4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap potensi *tax avoidance*

Penelitian Fernández-Rodríguez dan Martínez-Arias (2012) menunjukkan hubungan positif antara ukuran perusahaan dengan beban pajak (*tax burden*). Perusahaan yang mempunyai beban pajak yang besar tanpa disertai *corporate governance* yang baik cenderung melakukan *tax avoidance* (Angueira, 2018). Ukuran perusahaan mempunyai hubungan positif dan memengaruhi *tax avoidance*.

Alfina et al. (2018) menunjukkan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi tindakan *tax avoidance* perusahaan. Hasil yang sama ditunjukkan oleh penelitian Darmawan dan Sukartha (2014). Hasil penelitian memperlihatkan bahwa terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak. Irianto (2017) menunjukkan hasil yang sama yaitu ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *effective tax rate*, semakin besar ukuran perusahaan maka semakin tinggi *tax avoidance*. Pratama dan Padjadjaran (2017) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan signifikan berpengaruh terhadap tindakan *tax avoidance*. Kim dan Im (2017) juga menyimpulkan hal yang sama bahwa ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*.

Turyatini (2017) melakukan penelitian hubungan ukuran perusahaan dengan *tax avoidance* dan mendapatkan hasil bahwa ukuran perusahaan mempunyai

pengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Perusahaan yang menjadi sampel adalah perusahaan yang bergerak di bidang *property* dan *real estate* selama tahun 2012 sampai dengan tahun 2015.

Rinaldi dan Cheisviyanny (2015), Musyarofah (2016) dan Marfu'ah (2015) menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Kurniasih dan Sari (2013) bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Ukuran perusahaan berhubungan dengan aset yang dimiliki. Sebagian besar asset perusahaan adalah berupa aset tetap. Semakin besar aset tetap maka semakin besar pula beban penyusutan. Beban penyusutan akan mengurangi laba bersih perusahaan dan memperkecil beban pajak yang dibayarkan. Pembayaran pajak linear dengan ETR. Semakin kecil beban pajak maka semakin besar ETR dan begitu juga sebaliknya. Jadi secara tidak langsung ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*.

Munandar et al. (2016) menyatakan bahwa kestabilan dan kemampuan perusahaan untuk melakukan aktivitas ekonominya ditunjukkan melalui ukuran perusahaan. Semakin besar ukuran perusahaan akan menjadikan manajer cenderung patuh atau agresif terhadap pemenuhan kewajiban perpajakan karena pemerintah akan semakin memperhatikan perusahaan yang bersangkutan. Ukuran perusahaan diprosikan ke dalam ukuran atau jumlah aset. Aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun akan dibebankan perusahaan melalui mekanisme penyusutan. Semakin besar aset atau ukuran perusahaan, maka semakin besar beban penyusutan dan hal ini menyebabkan beban pajak perusahaan menjadi berkurang.

Berdasarkan penelitian sebelumnya dan pertimbangan penulis, ditentukan hipotesis keempat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H₆: Ukuran Perusahaan memengaruhi tax avoidance



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

A.1. Pendekatan penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Pendekatan kuantitatif dalam penelitian ini berusaha menjawab permasalahan yang ada berdasarkan analisis informasi statistika. Oleh karena itu diperlukan pengukuran yang cermat terhadap variabel-variabel yang sedang diteliti untuk menghasilkan kesimpulan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

A.2. Desain penelitian

Desain dalam penelitian ini adalah sebuah model yang menghubungkan antara variabel bebas (X) dengan variabel dependen (Y). Variabel independen terdiri dari: struktur modal (X_1), *good corporate governance* (X_2, X_3, X_4), likuiditas (X_5), ukuran perusahaan (X_6). Variabel dependen adalah *tax avoidance* (Y).

B. Sumber Informasi

B.1. Sumber data

Data Penelitian ini bersumber dari Bursa Efek Indonesia. Penelitian dilakukan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan fokus pada perusahaan manufaktur selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017. Data sekunder penelitian ini adalah laporan keuangan (*financial report*) dan laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang di dalamnya memuat data-data yang diperlukan untuk mendukung penelitian, seperti: laporan laba rugi, neraca, laporan

arus kas, catatan atas laporan keuangan, struktur organisasi, struktur kepemilikan, dewan direksi, dewan komisaris dan informasi terkait lainnya.

B.2. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dengan mempelajari, mengkaji dan menelaah beberapa literatur berupa buku, jurnal, berita dan sumber lain yang mendukung, dengan tujuan untuk mengetahui dan mengkaji lebih jauh relevansi teori-teori yang ada dengan permasalahan di dalam penelitian. Studi kepustakaan digunakan sebagai pembanding, pendukung informasi dan pelengkap data-data dalam rangka menganalisis masalah yang sedang diteliti, yaitu pengaruh struktur modal, *good corporate governance*, liquiditas dan ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*.

Selanjutnya, peneliti mengumpulkan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang dipilih menjadi sampel penelitian. Secara khusus peneliti memilih data-data keuangan sesuai proksi yang telah ditentukan dalam variabel penelitian.

C. Instrumen Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yang diperoleh dari Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan analisis regresi linier berganda karena variabel independen dalam penelitian ini lebih dari satu. Analisis regresi linier berganda merupakan uji yang digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Semua data dianalisis menggunakan *software E-views*.

D. Prosedur Pengumpulan Data

Teknik pengambilan sampel menggunakan pendekatan *non-probability sampling*, dengan tidak memberi peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Lebih lanjut peneliti melakukan *purposive sampling*, dengan memilih sampel menggunakan kriteria atau pertimbangan berdasarkan tujuan penelitian. Sampel penelitian berada dalam sebuah populasi yang mengacu pada keseluruhan obyek atau data yang ingin diinvestigasi oleh peneliti. Populasi penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) antara tahun 2013 – 2017. Seluruh data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan diambil dari laporan keuangan (*financial report*) dan laporan tahunan (*annual report*) perusahaan yang terdaftar di BEI tahun 2013 – 2017.

Kriteria atau pertimbangan pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini ditentukan sebagai berikut:

- 1). Perusahaan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) sebelum tanggal 31 Desember 2013 dan tidak *delisting* selama periode pengamatan tahun 2013 – 2017.
- 2). Perusahaan menerbitkan laporan keuangan dan laporan tahunan secara rutin kepada Bursa Efek Indonesia dan dipublikasikan secara resmi di website BEI.
- 3). Laporan keuangan sudah diaudit per 31 Desember setiap tahun, konsisten dan memiliki data keuangan yang lengkap terutama tentang variabel yang diteliti, dan perusahaan tidak dalam kondisi rugi.

- 4). Jenis perusahaan yang dipilih adalah perusahaan manufaktur dan selama periode penelitian tidak mengalami rugi usaha. Hal ini dimaksudkan untuk keperluan penghitungan proksi *tax avoidance* (ETR), yaitu jumlah pajak terutang yang dibebankan perusahaan.

E. Metode Analisis Data

Penelitian dilakukan untuk menjawab permasalahan apakah struktur modal, *good corporate governance*, liquiditas dan ukuran perusahaan memengaruhi potensi *tax avoidance*.

Pengujian dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut; 1). Pengujian asumsi klasik, 2). Koefisien korelasi parsial, 3). Koefisien determinasi serta 4). Pengujian hipotesis. Pengujian tersebut dilakukan dengan bantuan *software E-views*. Secara rinci, tahapan pengujian tersebut dijelaskan sebagai berikut:

E.1. Pengujian asumsi klasik

Pengujian ini digunakan untuk menguji apakah model regresi yang digunakan dalam penelitian ini layak diuji atau tidak. Uji asumsi klasik digunakan untuk memastikan bahwa multikolinearitas, autokorelasi dan heteroskedastisitas tidak terdapat dalam model yang digunakan dan data yang dihasilkan terdistribusi normal (uji normalitas). Jika keseluruhan syarat tersebut terpenuhi, berarti model analisis telah layak digunakan. Uji asumsi klasik dijabarkan sebagai berikut:

E.1.1. Uji normalitas

Data yang telah dikumpul dan siap diolah perlu dilakukan uji normalitas agar dapat dibuktikan bahwa data tersebut memenuhi syarat distribusi normal. Pengujian normalitas dilakukan dengan metode *Kolmogorov-smirnov test*. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah normal, sedangkan Jika probabilitas $<$

0,05 maka distribusi dari populasi adalah tidak normal. Uji normalitas dapat dilihat dengan memperlihatkan penyebaran data (titik-titik) pada normal *P plot of regression standazzed residual* variabel dependen, dimana: 1). Jika data menyebar di sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas, 2). Jika data menyebar jauh dari garis diagonal dan atau tidak mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi tidak memenuhi asumsi normalitas. Model regresi yang baik adalah yang mempunyai distribusi data normal atau mendekati normal.

E.1.2. Uji multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah pada model regresi ditemukan korelasi antar variabel independen (Ghozali, 2011). Model regresi yang baik adalah tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Salah satu cara untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas pada suatu model regresi adalah dengan melihat nilai *tolerance* dan VIF (*variance inflation factor*). Jika nilai *tolerance* > 0.10 dan VIF < 10 , maka tidak ada multikolinearitas pada penelitian tersebut. Jika nilai *tolerance* < 0.10 dan VIF > 10 , maka dapat diartikan terjadi gangguan multikolinearitas pada penelitian tersebut.

E.1.3. Uji autokorelasi

Uji autokorelasi bertujuan untuk menguji apakah dalam suatu model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan periode $t-1$ (sebelumnya). Jika terjadi korelasi maka dinamakan ada problem autokorelasi. Model regresi yang baik adalah yang bebas autokorelasi.

Untuk mendeteksi autokorelasi, dapat dilakukan dengan uji Durbin Watson (dW test). Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi ditentukan sebagai

berikut: Jika nilai durbin Watson (dW) berada di antara nilai dU hingga $4-dU$ berarti asumsi tidak terjadinya autokorelasi terpenuhi. Sementara apabila nilai $dW < dL$ terjadi autokorelasi yang positif dan apabila nilai $dW > 4-dL$ terjadi autokorelasi negatif. Sementara apabila nilai dW berada di antara dL sampai dengan dU ($dL < dW < dU$) atau nilai dW berada di antara $4-dU$ sampai dengan $4-5dL$ ($4-dU < dW < 4-dL$) maka hal ini menunjukkan tidak ada kesimpulan (Kemala, 2011).

E.1.4. Uji heteroskedastisitas

Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah dalam sebuah model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual antara satu pengamatan dengan pengamatan yang lain berbeda. Jika berbeda maka disebut sebagai heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah tidak terjadi heteroskedastisitas.

Heteroskedastisitas diuji dengan menggunakan uji koefisien korelasi *Rank Spearman* yaitu mengkorelasikan antara absolut residual hasil regresi dengan semua variabel bebas. Bila signifikansi hasil korelasi lebih kecil dari 0,05 (5%) maka persamaan regresi tersebut mengandung heteroskedastisitas, dan jika menghasilkan sebaliknya maka disebut non heteroskedastisitas atau homokedastisitas

E.2. Analisis regresi

Analisis linier berganda digunakan untuk mengetahui hubungan fungsional variabel Y (variabel dependen) dan variabel $X_1, X_2, X_3, X_4, X_5, X_6$ (variabel independen), bisa dinyatakan dalam sebuah persamaan:

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 (DER_{it}) + \beta_2 (KA_{it}) + \beta_3 (DI_{it}) + \beta_4 (KI_{it}) + \beta_5 (LIQ_{it}) + \beta_6 (SIZE_{it}) + e$$

Dimana:

ETR = *Effective Tax Ratio (Tax avoidance/Penghindaran pajak)*

α = Konstanta

β_1 s.d. β_6 = Koefisien regresi

DER = *Debt to Equity Ratio (Capital Structure/Struktur modal)*

KA = *Kualitas Audit (proksi Good Corporate Governance)*

DI = *Direktur Independen (proksi Good Corporate Governance)*

KI = *Komisaris Independen (proksi Good Corporate Governance)*

LIQ = *Liquidity/liquiditas*

SIZE = *Ukuran Perusahaan*

e = *Tingkat kesalahan (error)*

Persamaan di atas adalah persamaan linier berganda. Disebut linier karena pangkat dari semua parameternya adalah satu, dan disebut berganda karena jumlah variabel independennya lebih dari dua.

E.3. Analisis korelasi

Analisis korelasi adalah analisis yang membahas derajat hubungan antara variabel X dan variabel Y, sedangkan ukuran yang digunakan untuk mengetahui seberapa kuat hubungan yang terjadi antara variabel-variabel tersebut dinamakan sebagai koefisien korelasi. Korelasi parsial digunakan untuk analisis atau pengujian hipotesis bila peneliti bermaksud mengetahui pengaruh atau hubungan variabel independen, dimana salah satu variabel independennya dikendalikan (dibuat tetap). Nilai korelasi I berkisar antara 1 sampai -1. Jika nilai mendekati 1 atau -1 maka hubungan antar variabel tersebut semakin kuat. Jika mendekati 0 maka hubungan

antara dua variabel tersebut semakin lemah. Nilai positif menunjukkan hubungan searah (X naik maka Y naik) dan nilai negatif menunjukkan hubungan terbalik (X naik maka Y turun).

E.4. Analisis Koefisien Determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengukur proporsi variasi dari variabel *tax avoidance* (Y) yang dapat dijelaskan oleh variabel struktur modal (X_1), *good corporate governance* (X_2, X_3, X_4), liquiditas (X_4), dan ukuran perusahaan (X_5) atau ukuran yang menyatakan kontribusi dari variabel independen dalam menjelaskan pengaruhnya terhadap variabel dependen. Untuk melihat pengaruh masing-masing maka digunakan kuadrat dari korelasi parsialnya (koefisien determinasi) sebagai berikut: $KD = r^2 \times 100\%$

E.5. Rancangan Pengujian Hipotesis

E.5.1. Penetapan Hipotesis

Penelitian ini menguji beberapa hipotesis apakah variabel independen memengaruhi variabel dependen pada masing-masing variabel, yaitu pengaruh struktur modal, *good corporate governance*, liquiditas, ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*. Rancangan pengujian hipotesis diawali dengan penetapan hipotesis nol. Hipotesis nol (H_0) dalam penelitian ini menunjukkan tidak adanya pengaruh yang signifikan sedangkan hipotesis penelitian (H_a) yang ditetapkan penulis menunjukkan adanya pengaruh yang signifikan, sebagai berikut:

H_{01} : Struktur modal tidak memengaruhi *tax avoidance*.

H_{a1} : Struktur modal memengaruhi *tax avoidance*.

H_{02-4} : *Good corporate governance* tidak memengaruhi *tax avoidance*.

H_{a2-4} : *Good corporate governance* memengaruhi *tax avoidance*.

H_{05} : Liquiditas tidak memengaruhi *tax avoidance*.

H_{a5} : Liquiditas memengaruhi *tax avoidance*.

H_{06} : Ukuran perusahaan tidak memengaruhi *tax avoidance*.

H_{a6} : Ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*.

E.5.2. Pengujian Hipotesis secara Parsial (Uji t)

Uji parsial (uji t) digunakan untuk menguji apakah suatu variabel bebas berpengaruh atau tidak terhadap variabel tidak bebas. Langkah-langkah yang dilakukan adalah:

i). Menentukan hipotesis

$H_{01} : \beta_1 = 0$: Struktur modal tidak memengaruhi *tax avoidance*.

$H_{a1} : \beta_1 \neq 0$: Struktur modal memengaruhi *tax avoidance*.

$H_{02-4} : \beta_{2-4} = 0$: *Good corporate governance* tidak memengaruhi *tax avoidance*.

$H_{a2-4} : \beta_{2-4} \neq 0$: *Good corporate governance* memengaruhi *tax avoidance*.

$H_{03} : \beta_5 = 0$: Liquiditas tidak memengaruhi *tax avoidance*.

$H_{a3} : \beta_5 \neq 0$: Liquiditas memengaruhi *tax avoidance*.

$H_{04} : \beta_6 = 0$: Ukuran perusahaan tidak memengaruhi *tax avoidance*.

$H_{a4} : \beta_6 \neq 0$: Ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*.

ii). Menentukan tingkat signifikansi sebesar 5% ($\alpha = 0,05$) dengan derajat

kebebasan: $df = n - k - 1$

dimana:

n = Jumlah sampel

k = Jumlah variabel independent

iii). Mengambil kesimpulan

jika P value $< 0,05$ maka H_0 ditolak (signifikan)

jika P value $> 0,05$ maka H_0 diterima (tidak signifikan)

Jika penghitungan menunjukkan hipotesis nol (H_0) ditolak, maka hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen (struktur modal, *good corporate governance*, likuiditas, ukuran perusahaan) yang digunakan dalam penelitian ini berpengaruh cukup signifikan terhadap variabel dependen (*tax avoidance*). Namun jika penghitungan menunjukkan hipotesis nol (H_0) diterima, maka hal ini berarti bahwa variabel-variabel independen (struktur modal, *good corporate governance*, likuiditas, ukuran perusahaan) yang digunakan dalam penelitian ini tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen (*tax avoidance*).

E.5.3. Penetapan tingkat signifikan

Tingkat signifikansi (*level of significance*) yang dipilih adalah 95%, angka ini merupakan tingkat signifikan yang umum dipakai dan dinilai tepat untuk penelitian ilmu-ilmu social dan dianggap cukup kuat mewakili hubungan antara variabel-variabel yang diteliti. Artinya jika H_0 benar, maka probabilitas melakukan kesalahan menolak hipotesis sebesar 0,05.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Obyek Penelitian

Penelitian ini menguji pengaruh struktur modal, *good corporate governance*, liquiditas dan ukuran perusahaan terhadap potensi *tax avoidance*. Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dengan periode penelitian selama 5 tahun (2013-2017). Peneliti menggunakan *purposive sampling* untuk mendapatkan sampel yang sesuai dengan kriteria penelitian. Kelompok perusahaan manufaktur yang tercatat di BEI terbagi menjadi 3 sektor besar, yaitu; sektor aneka industri, sektor industri dasar dan kimia, dan sektor industri barang konsumsi.

Ketiga sektor tersebut kemudian dibagi lagi menjadi beberapa sub sektor. Sektor aneka industri terdiri atas sub sektor mesin dan alat berat, sub sektor otomotif dan komponen, sub sektor tekstil dan garmen, sub sektor alas kaki, sub sektor kabel, dan sub sektor elektronika. Sektor industri dasar dan kimia terdiri dari sub sektor semen, sub sektor keramik porselen dan kaca, sub sektor logam dan sejenisnya, sub sektor kimia, sub sektor plastik dan kemasan, sub sektor pakan ternak, sub sektor industri kayu, sub sektor bubur kertas, sub sektor lainnya. Sektor industri barang konsumsi terdiri dari sub sektor makanan dan minuman, sub sektor pabrik tembakau, sub sektor farmasi, sub sektor kosmetik dan barang keperluan rumah tangga, sub sektor peralatan rumah tangga, dan sub sektor lainnya.

Peneliti memperoleh data sekunder berupa laporan tahunan dan laporan keuangan yang di-*publish* secara umum oleh perusahaan. Semua perusahaan yang

terdaftar atau tercatat di BEI diwajibkan melakukan publikasi terkait informasi-informasi penting yang dimiliki perusahaan, termasuk kewajiban publikasi laporan tahunan dan laporan keuangan perusahaan secara berkala. Oleh karena itu peneliti mengumpulkan data melalui situs BEI dan situs atau website resmi perusahaan yang berhubungan langsung dengan tujuan kegiatan penelitian.

Setelah memilih dan memilah data yang telah dikumpulkan, peneliti mendapatkan 48 perusahaan manufaktur sesuai kriteria yang dipersyaratkan dalam penelitian. Ringkasan pemilihan sampel dapat dilihat pada tabel 4.1 dibawah ini:

Tabel 4.1
Pemilihan Sampel

Kriteria	Jumlah
Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di BEI (per 13/09/2019)	177
Perusahaan manufaktur yang <i>delisting</i> atau <i>relisting</i> selama periode 2013 – 2017	43
Perusahaan manufaktur yang tidak menggunakan mata uang rupiah selama periode 2013 – 2017	8
Perusahaan manufaktur yang mengalami kerugian selama periode 2013 – 2017	79
Jumlah Sampel	48

Selanjutnya, pengujian dilakukan terhadap sampel yang diperoleh menggunakan uji klasik dan dianalisis menggunakan uji analisis regresi linear *ordinary least square* (OLS) berganda (berganda karena memiliki lebih dari 1 variabel bebas). Keseluruhan proses ini untuk menjawab beberapa masalah yang telah dirumuskan sebelumnya, yaitu apakah struktur modal, *good corporate governance* (kualitas audit, direktur independen, komisaris independen), liquiditas, dan ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*.

B. Hasil Analisis Data

B.1. Hasil Analisis Statistik deskriptif

Pengolahan dan pengujian data menggunakan alat bantu program statistik E Views. Pemilahan dan pengolahan data pertama kali dilakukan dengan menghitung jumlah sampel, nilai minimum, nilai maksimum, rata-rata dan standar deviasi masing-masing variabel. Hasil pemilahan dan pengolahan data ditampilkan ke dalam tabel 4.2 di bawah ini:

Tabel 4.2
Nilai Minimum, Nilai Maksimum, Rata-rata dan Standar Deviasi

Variabel	N	Min	Max	Mean	St. Dev
Struktur Modal (DER)	240	0,15	7,44	0,96	0,971
Kualitas Audit (KA)	240	0	1	0,49	0,500
Direktur Independen (DI)	240	0,07	0,50	0,22	0,102
Komisaris Independen (KI)	240	0,20	0,83	0,41	0,106
Liquiditas (LIQ)	240	0,40	8,64	2,41	1,577
Ukuran Perusahaan (SIZE)	240	25,30	33,32	28,62	1,726
Tax Avoidance (ETR)	240	0,01	0,93	0,27	0,100

Tabel diatas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Diketahui bahwa nilai minimum DER adalah 0,15 dan nilai maksimumnya 7,44 dengan nilai rata-rata sebesar 0,96 serta standar deviasinya sebesar 0,971663. Nilai KA (kualitas audit) adalah *dummy* 0 dan 1. Nilai minimum 0 dan maksimum 1. Nilai minimum DI (direktur independen) adalah 0,07 dan nilai maksimumnya 0,50 dengan nilai rata-rata sebesar 0,22 serta standar deviasinya sebesar 0,102.

Nilai minimum KI (komisaris independen) adalah 0,20 dan nilai maksimumnya 0,83 dengan nilai rata-rata sebesar 0,41 serta standar deviasinya sebesar 0,1069.

Nilai minimum LIQ (liquiditas) adalah 0,40 dan nilai maksimumnya 8,64 dengan nilai rata-rata sebesar 2,41 serta standar deviasinya sebesar 1,577.

Nilai minimum SIZE (ukuran perusahaan) adalah 25,30 (Rp 96.711.678.255) dan nilai maksimumnya 33,32 (Rp 295.591.633.159.645) dengan nilai rata-rata sebesar 28,62 (Rp 2.688.487.812.530) serta standar deviasinya sebesar 1,7265. Diketahui bahwa nilai minimum ETR adalah 0,01 dan nilai maksimumnya 0,93 dengan nilai rata-rata sebesar 0,27 serta standar deviasinya sebesar 0,101.

B.2. Hasil Uji Asumsi Klasik

Penelitian ini menggunakan Metode *Ordinary Least Square* (OLS), yaitu merupakan salah satu metode dalam analisis regresi berganda untuk mengetahui pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Metode *Ordinary Least Square* akan menghasilkan estimasi yang terbaik dibanding dengan metode lain jika semua asumsi klasik terpenuhi. Sebaliknya, jika asumsi klasik tidak terpenuhi akan menghasilkan estimator yang jelek. Oleh karena itu peneliti memastikan bahwa semua hasil uji asumsi klasik dalam penelitian ini terpenuhi.

B.2.1. Hasil Uji Normalitas

Sesuai metodologi penelitian pada bab 3, persamaan atau model yang akan dibentuk dalam penelitian ini adalah:

$$ETR_{it} = \alpha + \beta_1 (DER_{it}) + \beta_2 (KA_{it}) + \beta_3 (DI_{it}) + \beta_4 (KI_{it}) + \beta_5 (LIQ_{it}) + \beta_6 (SIZE_{it}) + e$$

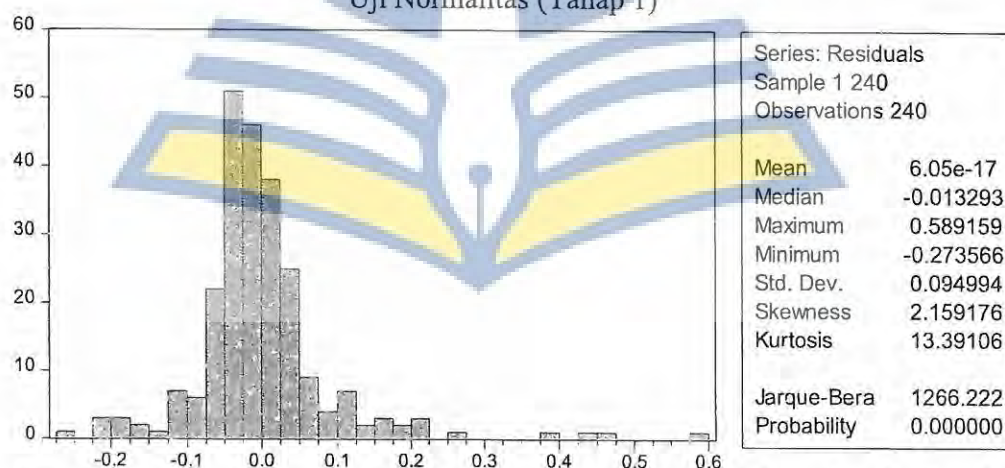
Persamaan tersebut menghasilkan regresi linear OLS (hasil pengolahan menggunakan program e views) sebagai berikut:

Gambar 4.1
Hasil Regresi Linear OLS

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,3616	0,1614	2,2392	0,0261
DER	0,0108	0,0080	1,3513	0,1779
KA	-0,0053	0,0172	-0,3088	0,7577
DI	0,1615	0,0873	1,8495	0,0656
KI	0,1002	0,0633	1,5828	0,1148
LIQ	-0,0025	0,0047	-0,5313	0,5957
SIZE	-0,0059	0,0051	-1,1547	0,2494
R-squared	0,10723	Mean dependent var		0,2693
Adjusted R-squared	0,08424	S.D. dependent var		0,1005
S.E. of regression	0,09621	Akaike info criterion		-1,8158
Sum squared resid	2,15671	Schwarz criterion		-1,7143
Log likelihood	224,900	Hannan-Quinn criter.		-1,7749
F-statistic	4,66462	Durbin-Watson stat		1,9712
Prob(F-statistic)	0,00016			

Selanjutnya dilakukan uji normalitas. Pengujian normalitas residual dilakukan dengan metode uji Jarque Bera, sebagai alat pembuktian bahwa data tersebut memenuhi syarat distribusi normal. Jika probabilitas $> 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah normal, sedangkan Jika probabilitas $< 0,05$ maka distribusi dari populasi adalah tidak normal seperti ditunjukkan pada gambar 4.2 di bawah ini:

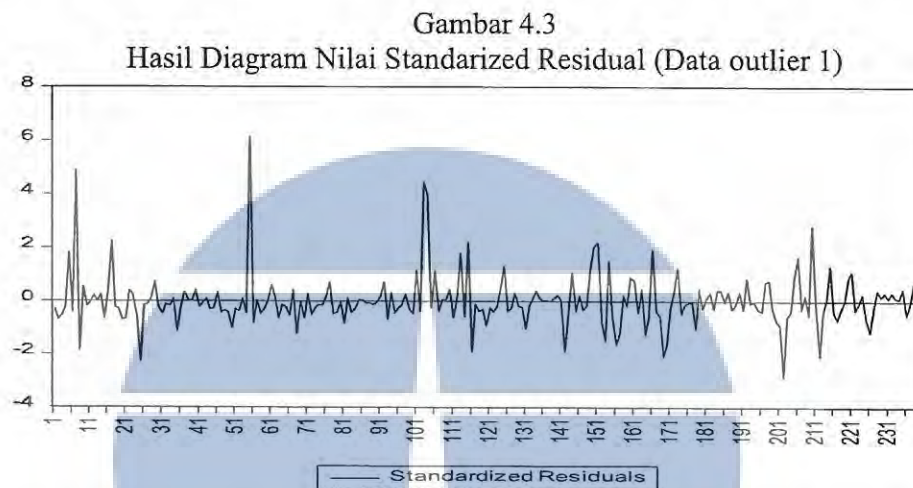
Gambar 4.2
Uji Normalitas (Tahap 1)



Pengujian normalitas menggunakan aplikasi e-views didapatkan hasil nilai probabilitas uji jarque bera sebesar 0,000000 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti residual berdistribusi tidak normal. Salah satu penyebab terjadinya non

normalitas adalah adanya nilai *extreme* atau data pencilan, yang disebut juga dengan outlier.

Data outlier dideteksi menggunakan diagram nilai *standardized residuals* (Gambar 4.2). Jika nilai *standardized residual* > 3 atau < -3 maka ada data outlier.



Gambar di atas menunjukkan adanya outlier sebab terdapat sampel dengan nilai Absolut *standardized residual* > 3 . Kesimpulan hasil pengujian tahap awal ini adalah terdapat Outlier.

Pelanggaran Normalitas dan Outlier dapat diatasi dengan cara *trimming*, transformasi dan *winsorizing*. Penelitian ini menggunakan *winsorizing* pada ETR agar tidak kehilangan data pada variable terikat. *Winsorizing* adalah upaya melakukan transformasi data yang outlier dengan batasan $> 95\%$ percentile dan $< 5\%$ percentile. Jadi sampel yang nilainya $> 95\%$ diubah menjadi senilai 95% percentile. Sampel dengan nilai $< 5\%$ percentile diubah menjadi senilai 5% percentile. Hasil pengujian *winsorizing* dapat dilihat pada lampiran 2.

Tahap selanjutnya adalah melakukan regresi linear OLS menggunakan ETR yang telah dilakukan *winsorizing* dengan model atau persamaan:

$$\text{ETR} = \alpha + \beta_1 (\text{DER}) + \beta_2 (\text{KA}) + \beta_3 (\text{DI}) + \beta_4 (\text{KI}) + \beta_5 (\text{LIQ}) + \beta_6 (\text{SIZE}) + e$$

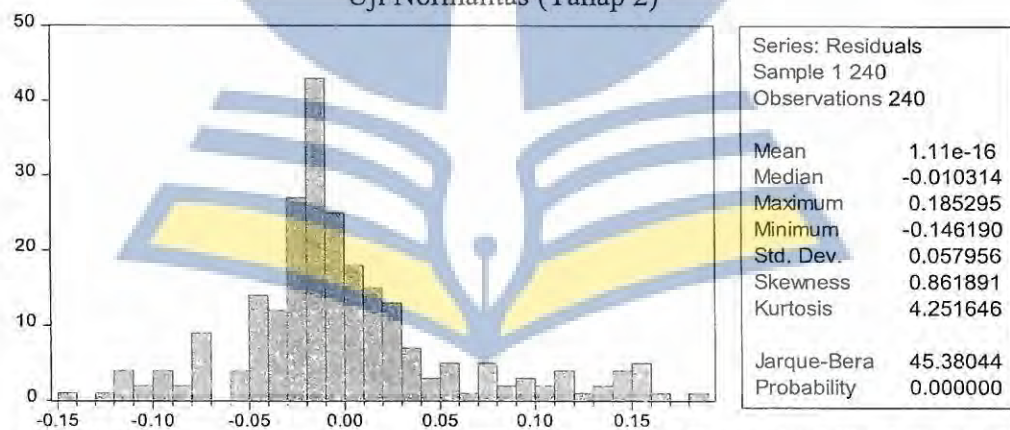
Persamaan tersebut menghasilkan regresi linear OLS seperti tercantum pada Gambar 4.4:

Gambar 4.4
Hasil Regresi Linear OLS setelah *winsorizing*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,4383	0,0985	4,4487	0,0000
DER	0,0110	0,0049	2,2488	0,0255
KA	-0,0053	0,0105	-0,5060	0,6133
DI	0,0049	0,0532	0,0936	0,9255
KI	0,0173	0,0386	0,4495	0,6534
LIQ	-6,2134	0,0028	-0,0021	0,9983
SIZE	-0,0066	0,0031	-2,1181	0,0352
R-squared	0,0931	Mean dependent var		0,2637
Adjusted R-squared	0,0697	S.D. dependent var		0,0608
S.E. of regression	0,0586	Akaike info criterion		-2,8041
Sum squared resid	0,8027	Schwarz criterion		-2,7025
Log likelihood	343,49	Hannan-Quinn criter.		-2,7631
F-statistic	3,9881	Durbin-Watson stat		2,0894
Prob(F-statistic)	0,0008			

Kemudian dilakukan uji normalitas tahap kedua, didapatkan hasil sebagai berikut:

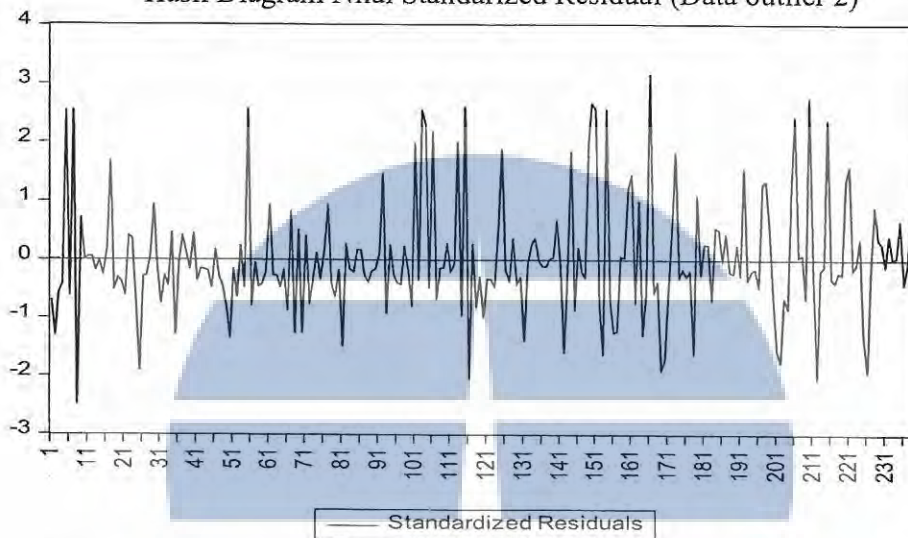
Gambar 4.5
Uji Normalitas (Tahap 2)



Setelah dilakukan *winsorizing* pada ETR, nilai Jarque Bera turun drastis menjadi 45,38044. Nilai P Value uji jarque bera masih $< 0,05$ yaitu 0,000000 yang berarti bahwa residual berdistribusi tidak normal. Salah satu penyebab terjadinya non normalitas adalah adanya nilai *extreme* atau data pencilan atau yang disebut juga dengan outlier.

Gambar di bawah ini adalah deteksi Outlier dengan melihat diagram nilai *standardized residuals*. Hasil diagram menunjukkan masih ada outlier karena nilai *standardized residual* > 3 atau < -3.

Gambar 4.6
Hasil Diagram Nilai Standarized Residual (Data outlier 2)



Oleh karena masih terdapat outlier sehingga menyebabkan pelanggaran normalitas (meskipun sudah dilakukan *winsorizing*), maka dilakukan langkah selanjutnya yaitu transformasi LOG pada variabel ETR, DER, DI, KI dan SIZE serta transformasi kuadrat pada LIQ. Variabel KA tidak dilakukan transformasi dikarenakan variabel tersebut memakai nilai *dummy*. Analisis regresi menggunakan ETR yang sudah dilakukan *winsorizing* dan transformasi pada beberapa variabel, menggunakan persamaan atau model:

$$\text{Log ETR} = \alpha + \beta_1 (\text{Log DER}) + \beta_2 (\text{KA}) + \beta_3 (\text{Log DI}) + \beta_4 (\text{Log KI}) + \beta_5 (\text{LIQ}^2) + \beta_6 (\text{Log SIZE}) + e$$

Persamaan tersebut menghasilkan regresi linear OLS sebagai berikut:

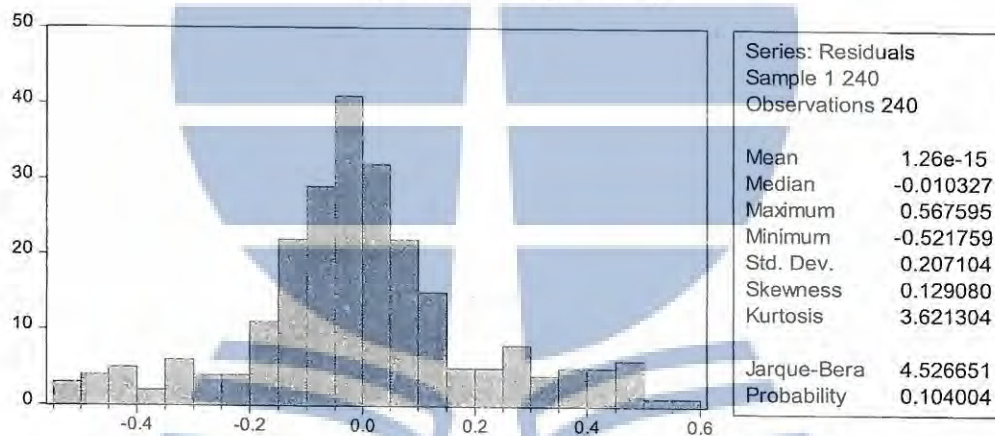
Gambar 4.7
Hasil Regresi Linear OLS setelah dilakukan transformasi

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
----------	-------------	------------	-------------	-------

C	1,6961	1,0866	1,5608	0,1199
LOG(DER)	0,0721	0,0245	2,9384	0,0036
KA	-0,0166	0,0379	-0,4374	0,6622
LOG(DI)	-0,0448	0,0419	-1,0686	0,2863
LOG(KI)	0,0658	0,0598	1,1002	0,2724
LIQ^2	0,0021	0,0015	1,4083	0,1604
LOG(SIZE)	-0,9094	0,3340	-2,7224	0,0070
R-squared	0,1048	Mean dependent var	-1,3572	
Adjusted R-squared	0,0818	S.D. dependent var	0,2189	
S.E. of regression	0,2097	Akaike info criterion	-0,2570	
Sum squared resid	10,251	Schwarz criterion	-0,1555	
Log likelihood	37,843	Hannan-Quinn criter.	-0,2161	
F-statistic	4,5493	Durbin-Watson stat	2,0145	
Prob(F-statistic)	0,0002			

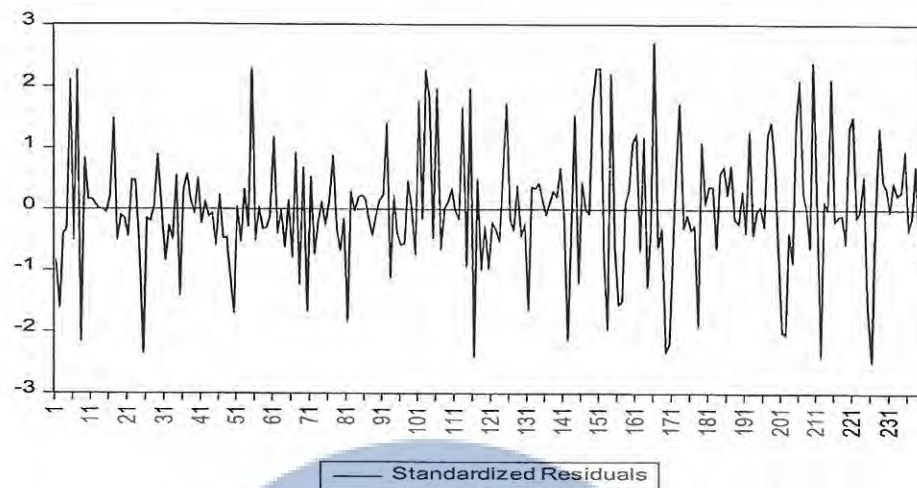
Selanjutnya dilakukan uji normalitas tahap ketiga untuk mendapatkan data yang terdistribusi normal dan siap untuk diolah lebih lanjut.

Gambar 4.8
Uji Normalitas (Tahap 3)



Hasil uji normalitas pada tahap 3 ini menunjukkan nilai probabilitas Jarque-Bera sebesar 0,104004 atau lebih besar dari 0,05 sehingga disimpulkan data terdistribusi normal. Peneliti melakukan pengujian pada diagram nilai *standardized residuals* untuk mendapatkan keyakinan bahwa data outlier tidak ada lagi:

Gambar 4.9
Hasil Diagram Nilai *Standardized Residual* (Data outlier 3)



Tabel di atas menunjukkan bahwa tidak terdapat outlier, sebab tidak ada sampel dengan nilai absolut *standardized residual* lebih dari 3 atau kurang dari -3, sehingga dihasilkan kesimpulan bahwa tidak terdapat outlier pada data/variabel yang telah dilakukan *winsorizing* dan transformasi tersebut di atas.

B.2.2. Hasil Uji Multikolinearitas

Hipotesis untuk pengujian ini adalah : H_0 : tidak ada multikolinearitas, dan H_a : ada multikolinearitas. Dengan ketentuan : Jika $VIF > 10$ maka H_a diterima, Jika $VIF < 10$ maka H_0 diterima.

Gambar 4.10
Hasil Uji Multikolinearitas

Variable	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
C	1,1808	6441.4	NA
LOG(DER)	0,0006	2,3996	1,9756
KA	0,0014	3,8309	1,9633
LOG(DI)	0,0017	27,321	2,1303
LOG(KI)	0,0035	18,018	1,0804
LIQ^2	2,3734	2,6795	1,7940
LOG(SIZE)	0,1115	6842,61	2,1480

Berdasarkan tabel 4.3 diketahui bahwa seluruh variabel memiliki nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) kurang dari batas maksimal 10 yang artinya variabel dalam penelitian ini tidak memiliki masalah multikolinearitas, sehingga H_0 diterima.

B.2.3. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Uji Heteroskedastisitas dengan metode Glejser, yaitu dengan cara meregresikan antara variabel bebas dengan absolut residual. Jika semua nilai Sig. t parsial $> 0,05$ dan p value uji f $> 0,05$, maka tidak ada gejala heteroskedastisitas.

Hasil pengujian tabel di bawah menunjukkan bahwa tidak ada gejala heteroskedastisitas karena sebagian besar nilai Sig. t parsial $> 0,05$ dan p value uji f: $0,050381 > 0,05$ atau Obs*R-squared: 12,50171 dengan p value atau Prob. Chi-Square(6): $0,0517 > 0,05$.

Gambar 4.11
Hasil Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey				
F-statistic	2,1340	Prob. F(6,233)	0,0504	
Obs*R-squared	12,501	Prob. Chi-Square(6)	0,0517	
Scaled explained SS	15,443	Prob. Chi-Square(6)	0,0171	
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	0,0935	0,3540	0,2642	0,7919
LOG(DER)	0,0081	0,0079	1,0194	0,3090
KA	-0,0077	0,0123	-0,6300	0,5293
LOG(DI)	0,0187	0,0136	1,3732	0,1710
LOG(KI)	-0,0070	0,0195	-0,3592	0,7197
LIQ^2	-0,0002	0,0005	-0,4420	0,6589
LOG(SIZE)	-0,0054	0,1088	-0,0503	0,9599
R-squared	0,0520	Mean dependent var	0,0427	
Adjusted R-squared	0,0276	S.D. dependent var	0,0692	
S.E. of regression	0,0683	Akaike info criterion	-2,5000	
Sum squared resid	1,0879	Schwarz criterion	-2,3985	
Log likelihood	307,01	Hannan-Quinn criter.	-2,4591	
F-statistic	2,1340	Durbin-Watson stat	1,8890	
Prob(F-statistic)	0,0503			

Hipotesis pengujian ini adalah : H_0 : tidak ada heteroskedastisitas, dan H_a : ada heteroskedastisitas. Dengan ketentuan: Jika signifikan $< 0,05$ maka H_a diterima. Jika signifikan $> 0,05$ maka H_0 diterima. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui bahwa tidak ada masalah heteroskedastisitas. Hal ini karena semua variabel independen memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05, sehingga hipotesis H_0 diterima.

B.2.4. Hasil Uji Autokorelasi

Uji serial korelasi dengan metode *Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test*, yaitu dengan cara meregresikan semua variabel bebas ditambah dengan lag 1 residual dan lag 2 residual terhadap residual. Tabel di bawah menunjukkan nilai $Obs \cdot R$ -squared sebesar 0,491551 dengan *Probability value* atau Prob. Chi-Square(2): 0,7821 $> 0,05$, sehingga tidak terdapat serial korelasi.

Gambar 4.12
Hasil Uji Autokorelasi

Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test:				
F-statistic	0,2370	Prob. F(2,231)	0,7891	
Obs*R-squared	0,4915	Prob. Chi-Square(2)	0,7821	
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-0,0940	1,0987	-0,0856	0,9318
LOG(DER)	0,0024	0,0249	0,0980	0,9220
KA	0,0014	0,0381	0,0367	0,9707
LOG(DI)	0,0007	0,0421	0,0180	0,9856
LOG(KI)	-0,0078	0,0617	-0,1266	0,8993
LIQ^2	5,3343	0,0015	0,0345	0,9725
LOG(SIZE)	0,0261	0,3373	0,0775	0,9382
RESID(-1)	-0,0101	0,0672	-0,1507	0,8803
RESID(-2)	0,0456	0,0682	0,6693	0,5039
R-squared	0,0020	Mean dependent var	1,2654	
Adjusted R-squared	-0,0325	S.D. dependent var	0,2071	
S.E. of regression	0,2104	Akaike info criterion	-0,2424	
Sum squared resid	10,230	Schwarz criterion	-0,1118	
Log likelihood	38,089	Hannan-Quinn criter.	-0,1898	
F-statistic	0,0592	Durbin-Watson stat	1,9801	
Prob(F-statistic)	0,9998			

Hipotesis untuk pengujian ini adalah: H_0 : tidak autokorelasi, dan H_a : ada autokorelasi. Dengan ketentuan: Jika $DW > d_u$ dan $(4-DW) > d_u$ maka H_0 diterima. Jika $DW < d_u$ dan $(4-DW) < d_u$ maka H_a diterima. Berdasarkan tabel 4.5 diketahui nilai Durbin-Watson (DW) sebesar 1.908280, akan dibandingkan dengan nilai tabel DW. Berdasarkan tabel DW dengan jumlah sampel 48 dan jumlah variabel independen 6 maka nilai tabel DW adalah $d_l = 1,2709$ $d_u = 1,8265$. Karena nilai $DW = 1,908280 > d_u$ dan nilai $(4-DW) = 2,09172 > d_u$ dapat disimpulkan jika tidak terdapat autokorelasi, sehingga hipotesis H_0 diterima.

B.3. Analisis Regresi

Penelitian ini dilakukan untuk menjawab beberapa permasalahan sesuai rumusan masalah, yaitu menguji apakah variabel independen (struktur modal, GCG, liquiditas, dan ukuran perusahaan) memengaruhi variabel dependen (*tax avoidance*) secara parsial. Selain itu penelitian ini juga untuk menguji hipotesis penelitian yang telah dibangun pada bab sebelumnya, yaitu bahwa masing-masing variabel independen memengaruhi variabel dependen.

Untuk menentukan lebih lanjut pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen, di bawah ini dilakukan beberapa pengujian sebagai berikut:

B.3.1. Uji Kebaikan Model

Tabel 4.13
Hasil Uji Kebaikan Model

Weighted Statistics			
R-squared	0,1048	Mean dependent var	1,3572
Adjusted R-squared	0,0818	S.D. dependent var	0,2189
S.E. of regression	0,2097	Sum squared resid	10,251
F-statistic	4,5493	Durbin-Watson stat	2,0145
Prob(F-statistic)	0,0002		

Nilai Adjusted R-squared: 0,081815 dimana $< 0,5$ sehingga kemampuan variabel independen (struktur modal, *good corporate governance*, liquiditas, dan ukuran perusahaan) secara serentak/simultan dalam menjelaskan variabel dependen (*tax avoidance*) lemah. Besarnya kemampuan menjelaskan tersebut adalah sebesar 0,081815 atau 8,18%. Maka faktor lain di luar penelitian yang memengaruhi variabel dependen (LOG ETR) adalah sebesar 100% dikurangi 8,18% yaitu 91,82%.

B.3.2. Uji Parsial (Uji t)

Hasil uji parsial dapat dilihat pada gambar 4.7 yang menunjukkan hasil regresi dengan menggunakan model *Random Effect* (RE), dimana ada dua variabel independen yang memiliki nilai probabilitas kurang dari 0,05 yaitu DER (struktur modal) dan SIZE (ukuran perusahaan). Oleh karena masing-masing variabel independen tersebut memiliki nilai probabilitas kurang dari 0,05, maka hanya kedua variabel independen tersebut yang secara signifikan memengaruhi variabel dependen ETR (*tax avoidance*).

Secara rinci pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen dijabarkan sebagai berikut:

a. Pengaruh struktur modal terhadap potensi *tax avoidance*

Hipotesis pertama (H_1) dalam penelitian ini adalah ada pengaruh struktur modal (DER) terhadap *tax avoidance*. Berdasarkan tabel, variabel DER memiliki nilai probabilitas sebesar 0,0036, atau lebih kecil dari 0,05, hal ini berarti struktur modal memengaruhi potensi *tax avoidance*. Tanda positif pada koefisien sebesar +0,072119 menggambarkan adanya hubungan yang positif antara struktur modal dengan potensi *tax avoidance*.

Oleh karena itu **hipotesis pertama (H₁)** penelitian ini, yaitu struktur modal (DER) memengaruhi *tax avoidance*, **diterima**.

b. Pengaruh GCG (kualitas audit) terhadap potensi *tax avoidance*

Hipotesis kedua (**H₂**) dalam penelitian ini adalah ada pengaruh *good corporate governance* (kualitas audit) terhadap *tax avoidance*. Nilai probabilitas variabel Kualitas Audit (KA) adalah sebesar 0,5659 atau lebih besar dari 0,05, dan koefisien sebesar -0,016603. Hal ini berarti bahwa kualitas audit tidak memengaruhi potensi *tax avoidance*. Tanda negatif pada koefisien menggambarkan adanya hubungan yang negatif antara kualitas audit dengan potensi *tax avoidance*.

Oleh karena itu **hipotesis kedua (H₂)** penelitian ini, yaitu *good corporate governance* (kualitas audit) memengaruhi *tax avoidance*, **ditolak**.

c. Pengaruh GCG (direktur independen) terhadap potensi *tax avoidance*

Hipotesis ketiga (**H₃**) penelitian ini adalah ada pengaruh *good corporate governance* (direktur independen) terhadap *tax avoidance*. Variabel Direktur Independen (DI) memiliki nilai probabilitas sebesar 0,2928 atau lebih besar dari 0,05, hal ini berarti bahwa direktur independen tidak memengaruhi potensi *tax avoidance*. Tanda negatif pada koefisien sebesar -0,044830 menggambarkan adanya hubungan yang negatif antara direktur independen dan potensi *tax avoidance*.

Oleh karena itu **hipotesis ketiga (H₃)** penelitian ini, yaitu *good corporate governance* (direktur independen) memengaruhi *tax avoidance*, **ditolak**.

d. Pengaruh GCG (komisaris independen) terhadap potensi *tax avoidance*

Hipotesis keempat (**H₄**) penelitian ini adalah ada pengaruh *good corporate governance* (komisaris independen) terhadap *tax avoidance*. Nilai probabilitas variabel Komisaris Independen (KI) sebesar 0,2437 atau lebih besar dari 0,05 dan dengan nilai koefisien sebesar -0,035857. Hal ini berarti komisaris independen tidak memengaruhi potensi *tax avoidance*. Tanda positif pada koefisien menggambarkan adanya hubungan yang positif antara komisaris independen dengan potensi *tax avoidance*.

Oleh karena itu **hipotesis keempat (H₄)** penelitian ini, yaitu *good corporate governance* (komisaris independen) memengaruhi *tax avoidance*, **ditolak**.

e. Pengaruh liquiditas terhadap potensi *tax avoidance*

Hipotesis kelima (**H₅**) penelitian ini adalah ada pengaruh liquiditas terhadap *tax avoidance*. Nilai probabilitas variabel Liquiditas (LIQ) sebesar 0,1716 adalah lebih besar dari 0,05, dan hal ini berarti bahwa liquiditas tidak memengaruhi potensi *tax avoidance*. Tanda positif pada koefisien sebesar 0,002166 menggambarkan adanya hubungan yang positif antara liquiditas dengan **potensi *tax avoidance***.

Oleh karena itu **hipotesis kelima (H₅)** penelitian ini, yaitu bahwa liquiditas memengaruhi *tax avoidance*, **ditolak**.

f. Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Potensi *Tax Avoidance*

Hipotesis keenam (**H₆**) penelitian ini adalah ada pengaruh liquiditas terhadap *tax avoidance*. Nilai probabilitas variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) sebesar 0,0005 atau lebih kecil dari 0,05, dan koefisiennya sebesar -0,909435 berarti bahwa ukuran perusahaan memengaruhi potensi *tax avoidance*. Tanda negatif

pada koefisien menggambarkan adanya hubungan yang negatif antara ukuran perusahaan dengan potensi *tax avoidance*.

Oleh karena itu **hipotesis keenam (H₆)** penelitian ini, yaitu bahwa ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*, **diterima**.

C. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah struktur modal, *good corporate governance*, liquiditas, dan ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance*.

Berdasarkan data penelitian yang diolah kemudian dianalisis, uraian hasil penelitian dijabarkan sebagai berikut di bawah ini:

C.1. Pengaruh Struktur modal terhadap *tax avoidance*

Hasil uji regresi menunjukkan bahwa struktur modal, yang diproksikan dengan DER (*debt to equity ratio*), memengaruhi *tax avoidance* karena memiliki nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05. Hasil uji regresi menunjukkan koefisien sebesar 0,072119. Tanda plus (+) pada nilai tersebut menggambarkan adanya pengaruh positif antara struktur modal terhadap potensi *tax avoidance*, yaitu semakin tinggi nilai DER maka semakin besar potensi *tax avoidance*.

Sesuai teori *trade off*, perusahaan akan berutang pada tingkat optimal tertentu untuk keperluan pembebanan biaya bunga. Praktek *tax avoidance* pembebanan bunga utang ini berkaitan erat dengan transaksi antar pihak-pihak atau perusahaan yang mempunyai afiliasi dengan perusahaan MNC (*multinational corporation*). Antar pihak-pihak yang mempunyai hubungan afiliasi dapat mengatur pada level berapa mereka berutang untuk keperluan penghindaran pajak secara legal melalui pembebanan biaya bunga utang/*tax avoidance* (Bawono, 2019).

Hasil penelitian ini sejalan dengan Suyanto dan Supramono (2012) yang menghasilkan kesimpulan *leverage* (DER) berpengaruh positif terhadap *tax aggressiveness/tax avoidance*. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Turyatini (2017), Alfina et al. (2018) dan Nabilla dan Fikri, (2018) yang menyatakan bahwa keputusan perusahaan untuk berutang memengaruhi keputusan perusahaan melakukan upaya *tax avoidance*.

C.2. Pengaruh *Good Corporate Governance* terhadap *tax avoidance*

Good Corporate Governance pada penelitian ini diproksikan ke dalam 3 jenis variabel, yaitu kualitas audit, direktur independen, dan komisaris independen. Hasil uji regresi secara parsial menunjukkan bahwa ketiga proksi *good corporate governance* tersebut tidak memengaruhi potensi *tax avoidance* karena mempunyai nilai probabilitas lebih dari 0,05. Nilai koefisien kualitas audit dan direktur independen menunjukkan angka minus sebesar -0,016603 dan -0.044830 yang berarti ada hubungan negatif antara kualitas audit dan direktur independen dengan *tax avoidance*, sedangkan koefisien untuk proksi komisaris independen bernilai positif sebesar 0,100299.

Kualitas audit dalam penelitian ini dinyatakan ke dalam nilai *dummy* 0 dan 1, dimana ketika perusahaan diaudit oleh KAP *the big four* (Price Waterhouse Cooper – PWC, Deloitte, Touche Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young) maka akan diberi skor 1, dan jika diaudit selain KAP *the big four* tersebut diberikan skor 0. Hasil uji regresi menunjukkan bahwa kualitas audit tidak memengaruhi potensi *tax avoidance*. Nilai koefisien menunjukkan hubungan negatif yang berarti bahwa potensi *tax avoidance* bernilai rendah ketika perusahaan diaudit oleh KAP *the big four*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Kanagaretnam (2016), Tandean (2016),

yang menyatakan bahwa kualitas audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Kanagaretnam (2016) menyebutkan dalam penelitiannya kualitas audit tidak memengaruhi *tax aggressiveness* dengan kondisi sebagai berikut; jaminan kepada investor tinggi, risiko litigasi auditor tinggi, lingkungan audit yang baik, dan tekanan pasar modal yang tinggi.

Pemerintah mencanangkan tahun 2015 sebagai tahun pembinaan wajib pajak, tahun 2016 sebagai tahun penegakan hukum, dan tahun 2017 sebagai tahun rekonsiliasi. Program-program yang dijalankan tersebut memberikan konsekuensi kepada wajib pajak untuk lebih patuh memenuhi kewajibannya. Tahun 2016 diterbitkan UU nomor 11 tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak (*tax amnesty*) yang memberikan kesempatan pada wajib pajak untuk mengungkap dan melapor kewajiban pajak yang selama ini disembunyikan, dengan tujuan repatriasi modal dan menumbuhkan iklim investasi yang adil di Indonesia. Dimana setiap wajib pajak mempunyai hak yang sama untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.

Hasil uji regresi menunjukkan hasil (pengaruh) yang sama untuk variabel direktur independen. Potensi *tax avoidance* tidak dipengaruhi oleh komposisi direktur independen yang ada dalam perusahaan. Koefisien regresi menunjukkan nilai minus (-) yang menunjukkan hubungan negatif antara direktur independen dan *tax avoidance*. Hasil penelitian ini sejalan dengan Puspita dan Harto (2014), yang menyatakan bahwa direktur independen tidak memengaruhi *tax avoidance*.

Penelitian juga menunjukkan hasil uji yang sama untuk variabel komisaris independen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa komisaris independen tidak memengaruhi potensi *tax avoidance* karena memiliki nilai probabilitas lebih besar dari 0,05. Hal ini sejalan dengan Annisa (2008), Tandean dan Jonathan (2016),

Jamei (2017), Nugroho dan Agustia (2017), Turyatini (2017), yang menghasilkan kesimpulan bahwa komisaris independen tidak memengaruhi *tax avoidance*. Sesuai Pasal 20 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, ada kewajiban jumlah komisaris independen minimal 30% dari jumlah seluruh anggota dewan komisaris.

C.3. Pengaruh liquiditas terhadap *tax avoidance*

Hasil uji regresi data panel menunjukkan probabilitas liquiditas (LIQ) adalah sebesar 0,1716 atau lebih besar dari 0,05. Hal ini berarti bahwa liquiditas tidak berpengaruh pada adanya potensi *tax avoidance*. Tanda positif (+) pada koefisien sebesar 0,002166 merupakan hubungan yang bersifat positif antara liquiditas dan *tax avoidance*.

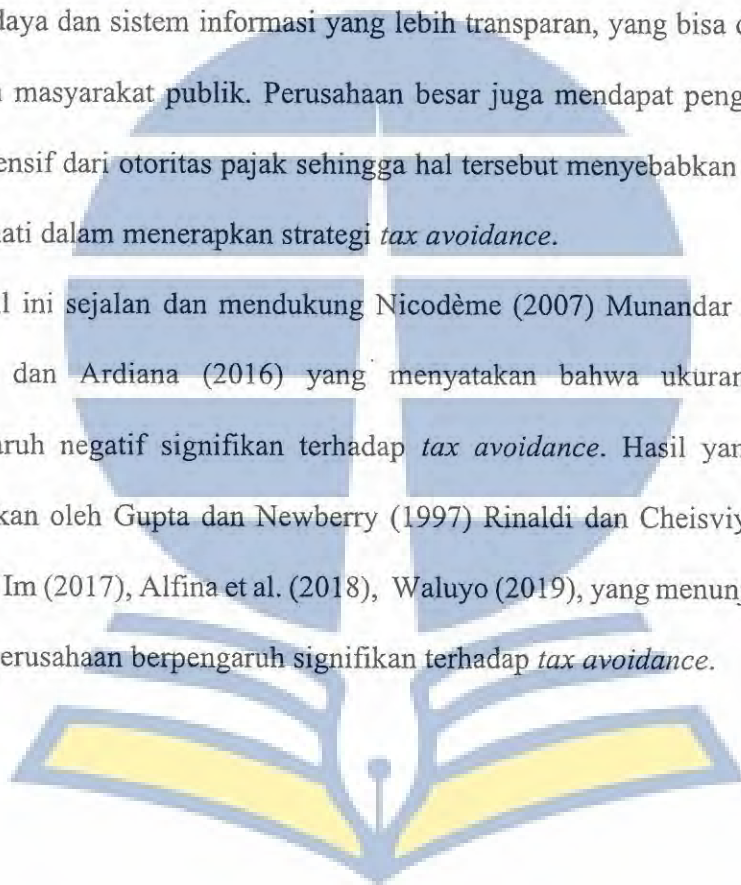
Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Stanfield (2011) yang di awal penelitian menduga perusahaan yang memiliki kekurangan kas (*insufficient cash*) cenderung melakukan *tax avoidance*. Setelah dilakukan uji penelitian, tidak ada pengaruh antara masalah liquiditas dengan *tax avoidance*. Meskipun pemenuhan kewajiban perpajakan adalah kewajiban pembayaran pajak yang bersifat jangka pendek, hasil penelitian kami juga menunjukkan bahwa tidak ada pengaruh masalah liquiditas dengan potensi *tax avoidance*. Penelitian Putri (2014) dan Cahyanti et al. (2018) juga yang menyimpulkan hasil yang sama bahwa liquiditas tidak berpengaruh pada *tax avoidance*.

C.4. Pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance*

Uji regresi data panel menghasilkan nilai probabilitas variabel Ukuran Perusahaan (SIZE) sebesar 0,0005 atau lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti bahwa

ukuran perusahaan signifikan memengaruhi *tax avoidance*. Koefisien menunjukkan tanda minus (-) sebesar -0,909435 sehingga ukuran perusahaan memengaruhi *tax avoidance* secara negatif. Perusahaan yang mempunyai ukuran semakin besar cenderung patuh terhadap peraturan perpajakan dan menghindari *tax avoidance*. Sebaliknya, semakin kecil ukuran perusahaan maka semakin tidak patuh dan cenderung melakukan upaya *tax avoidance*. Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya dan sistem informasi yang lebih transparan, yang bisa diakses setiap saat oleh masyarakat publik. Perusahaan besar juga mendapat pengawasan yang lebih intensif dari otoritas pajak sehingga hal tersebut menyebabkan mereka lebih berhati-hati dalam menerapkan strategi *tax avoidance*.

Hasil ini sejalan dan mendukung Nicodème (2007) Munandar et al. (2016), Dharma dan Ardiana (2016) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap *tax avoidance*. Hasil yang sama juga ditunjukkan oleh Gupta dan Newberry (1997) Rinaldi dan Cheisviyanny (2015), Kim dan Im (2017), Alfina et al. (2018), Waluyo (2019), yang menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa secara simultan struktur modal, *good corporate governance* (kualitas audit, direktur independen, komisaris independen), liquiditas, dan ukuran perusahaan terbukti signifikan memengaruhi *tax avoidance*. Namun secara parsial dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Variabel struktur modal (DER) berpengaruh positif terhadap potensi *tax avoidance*. Artinya semakin tinggi nilai DER, maka semakin tinggi potensi *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis pertama (H₁) dalam penelitian ini diterima.
- Variabel kualitas audit (KA) tidak memengaruhi potensi *tax avoidance*. Artinya tinggi rendahnya kualitas audit tidak memengaruhi potensi *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis kedua (H₂) dalam penelitian ini ditolak.
- Variabel direktur independen (DI) tidak memengaruhi potensi *tax avoidance*. Artinya tinggi rendahnya persentase jumlah direktur independen terhadap total jumlah direktur, tidak memengaruhi potensi *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis ketiga (H₃) penelitian ini ditolak.
- Variabel komisaris independen (KI) tidak memengaruhi potensi *tax avoidance*. Artinya tinggi rendahnya persentase jumlah komisaris independen terhadap total jumlah komisaris tidak memengaruhi *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis keempat (H₄) dalam penelitian ini ditolak.

- Variabel liquiditas (LIQ) tidak memengaruhi potensi *tax avoidance*. Artinya tinggi rendahnya nilai liquiditas tidak memengaruhi potensi *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis kelima (H₅) penelitian ini ditolak.
- Variabel ukuran perusahaan (SIZE) berpengaruh negatif terhadap potensi *tax avoidance*. Artinya semakin besar ukuran perusahaan maka semakin rendah potensi *tax avoidance*. Dengan demikian hipotesis keenam (H₆) penelitian ini diterima.

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan sebagai berikut:

1. Data yang ada di dalam sampel penelitian memiliki data ekstrim atau data outlier yang menyebabkan data tidak terdistribusi normal, sehingga untuk menormalkan data tersebut dilakukan proses winsorizing dan transformasi log dan kuadrat pada variabel-variabel bebas. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan data tersebut layak dan memenuhi syarat untuk diolah lebih lanjut.
2. Hasil penelitian menunjukkan faktor-faktor struktur modal, *good corporate governance*, liquiditas, dan ukuran perusahaan secara serentak memengaruhi *tax avoidance* hanya sebesar 8,18%. Ada faktor lain di luar penelitian yang memengaruhi *tax avoidance* sebesar 91,82%.
3. Rentang waktu penelitian hanya periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017.

B. Saran

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi tambahan referensi bagi perorangan/institusi yang sedang melakukan penelitian. Adapun beberapa saran yang dapat diberikan terkait penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Peneliti selanjutnya agar memilih data sampel yang lebih spesifik dan tidak memiliki data ekstrim atau data outlier, sehingga data sampel terdistribusi

normal dan dapat diolah lebih lanjut tanpa dilakukan proses winsorizing, transformasi log, dan kuadrat.

2. Peneliti selanjutnya dapat menambah beberapa variabel yang relevan dan *up to date* terkait praktek *tax avoidance*, yang tidak tercakup dalam penelitian ini karena hasil penelitian menunjukkan ada faktor/variabel lain di luar penelitian yang memengaruhi *tax avoidance* sebesar 91,82%..
3. Rentang waktu penelitian dapat diperpanjang lebih dari 5 tahun ke belakang karena beberapa undang-undang perpajakan di Indonesia belum ada perubahan selama lebih dari 5 tahun terakhir, sehingga informasi hasil penelitian dapat lebih akurat dan relevan.
4. Bagi pemerintah agar dapat memaksimalkan pengawasan pelaksanaan PMK 169/PMK.010/2015 tentang Penentuan Besarnya Perbandingan antara Utang dan Modal Perusahaan untuk Keperluan Penghitungan Pajak Penghasilan, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perbandingan antara utang dan modal (*debt to equity ratio/DER*) memengaruhi potensi *tax avoidance*. Sesuai aturan di dalam PMK tersebut, rasio utang terhadap modal dibatasi sebesar 4 : 1 untuk keperluan pembebanan biaya bunga atas utang.
5. Bagi perusahaan/wajib pajak agar dapat menentukan strategi *tax avoidance* yang tepat terkait struktur modal (DER) yaitu dengan memaksimalkan pembebanan bunga atas utang sesuai PMK 169/PMK.010/2015 (rasio 4 : 1), karena upaya penghindaran pajak tersebut masih legal dan tidak melanggar hukum perpajakan. Selain itu perusahaan/wajib pajak dapat melakukan strategi *tax avoidance* yang tepat dalam hal ukuran perusahaan, misalnya ketika akan membentuk sebuah unit/badan usaha yang baru.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfina, I. T., Nurlaela, S., & Wijayanti, A. (2018). The Influence of Profitability , Leverage , Independent Commissioner , and Company Size to Tax Avoidance. *Proceeding: The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018*. Surakarta: 5 Mei 2018, Hal.102–106.
- Alnajjar, M. I. M. (2015). Business Risk Impact on Capital Structure : A Case of Jordan Industrial Sector. *Global Journal of Management and Business Reseach: C Finance*, Vol.15, No.1, 1–7. Diunduh 5 Oktober 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1590/0034-7167.2016690304i>
- Annisa, N. A., & Kurniasih, L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing* Vol.8, No.2, 95-189.
- Aritonang, L. R. (2014). *Metode Penelitian Bisnis* (Edisi Ke-2; S. Nurhayati, Ed.). Tangerang Selatan: Penerbit Universitas Terbuka.
- Armstrong, C. S., Blouin, J. L., Jagolinzer, A. D., & Larcker, D. F. (2015). Corporate governance, incentives, and tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, Vol.60, No.1, 1–17. Diunduh 23 September 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2015.02.003>
- Baker, M., & Wurgler, J. (2002). Market Timing and Capital Structure. *The Journal of American Finance Association*, Vol.57, No.1. Diunduh 23 September 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1111/1540-6261.00414>
- Bawono, K. (2019). Menelaah Aturan Rasio Utang dan Modal. Diakses 6 April 2019, dari situs website: <https://pemeriksaanpajak.com>
- Brigham, E. F., & Houston, J. F. (2011). *Dasar-dasar Manajemen Keuangan Terjemahan* Edisi Ke-10. Jakarta: Salemba Empat.
- Buettner, T., Overesch, M., Schreiber, U., & Wamser, G. (2009). Taxation and capital structure choice-Evidence from a panel of German multinationals. *Economics Letters*, Vol.105, No.3, 309–311. Diunduh 15 Agustus 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1016/j.econlet.2009.09.001>
- Cadbury. (1992). *Report of the Committee on the Financial Aspects of Corporate Governance (the Cadbury Report)*. United Kingdom: Cambridge Judge Business School.
- Cahyanti, I. S., Muhsin, & Suharto, A. B. (2018). Profitabilitas, Leverage, Likuiditas dan Tax Avoidance Kasus: Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index. *Jurnal Ekubis*. Vol.2, No.1, 159-171.
- Copeland. (1996). *Manajemen Keuangan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Darmawan, I., & Sukartha, I. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Roa, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.9, No.1, 143–161.
- Darsono, & Ashari. (2010). *Pedoman Praktis Memahami Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Andi.

- Databoks. (2019). *Berapa pelanggan streaming netflix di indonesia*. Diakses 12 November 2019, dari situs World Wide Web: <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/>
- Dechow, P. M., Sloan, R. G., Sweeney, A. P., Sloan, R. G., & Sweeney, A. P. (2015). Detecting Earnings Management. *Asian Financial Statement Analysis*, Vol.70, No.2, 73–105. Diunduh 23 September 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1002/9781119204763.ch4>
- Desai, & Dharmapala. (2006). Corporate Tax Avoidance and High Powered Incentives. *Journal of Financial Economics*, Vol.79, No.1, 145–179.
- Detik. (2019). Sri Mulyani Curhat Belum Bisa Kejar Pajak Netflix cs. Diakses 12 Nopember 2019, dari situs website: <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/>
- Dharma, I. M. S., & Ardiana, P. A. (2016). 17463-1-39245-1-10-20160422. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.15, No.1, 584–613.
- Donaldson, G. (1961). *Corporate Debt Capacity. A Study of Corporate Debt Policy and the Determinant of Corporate Debt Capacity*. Washington, D.C. U.S.A: Beard Books.
- Dyreng. (2010). The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance. *The Accounting Review*, Vol.85, 1163–1189.
- Dyreng, S. D., Hanlon, M., & Maydew, E. L. (2008). Long-run corporate tax avoidance. *Accounting Review*, Vol.83, No.1, 61–82. Diunduh 10 Agustus 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.2308/accr.2008.83.1.61>
- Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Competitive*, Vol.1, 1–20.
- Fadhilah, R. (2014). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2009-2011). *Jurnal Akuntansi Universitas Negeri Padang*. Vol.2, No.1, 658-683.
- Fajar Adisamartha, I., & Noviani, N. (2015). Pengaruh Likuiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap Pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.13, No.3, 973–1000.
- Fama, E. F., & Jensen, M. C. (1983). Corporations and Private Property: A Conference Sponsored by the Hoover Institution. *Journal of Law and Economics*, Vol.26, No. 2, 301–325. Diunduh 10 Nopember 2019, dari situs website: <http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3728530.pdf>
- Fernández-Rodríguez, E., & Martínez-Arias, A. (2012). Do business characteristics determine an effective tax rate? *Chinese Economy*, Vol.45, No.6, 60–83. Diunduh 5 Oktober 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.2753/CES1097-1475450604>
- Friese, A., Link, S. P., & Mayer, S. (2011). Taxation and Corporate Governance. *SSRN Electronic Journal*, 1–99. <https://doi.org/10.2139/ssrn.877900>
- Gallemore, J., & Labro, E. (2015). The importance of the internal information

- environment for tax avoidance. *Journal of Accounting and Economics*, Vol.60, No.1, 149–167. Diunduh 10 Nopember 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2014.09.005>
- Ghazouani, T. (2013). The Capital Structure Through the Trade-Off Theory: Evidence from Tunisian Firm. *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol.3, No.3, 625–636.
- Ghozali, I. (2011). *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Gillan, S. L. (2006). Recent Developments in Corporate Governance: An Overview. *Journal of Corporate Finance*, Vol.12, No.3, 381–402. Diunduh 5 Oktober 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1016/j.jcorpfin.2005.11.002>
- Gupta, S., & Newberry, K. (1997). Determinants of the variability in corporate effective tax rates: Evidence from longitudinal data. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol.16, No.1, 1–34. Diunduh 10 Agustus 2019, dari situs website: [https://doi.org/10.1016/S0278-4254\(96\)00055-5](https://doi.org/10.1016/S0278-4254(96)00055-5)
- Hani, S. (2015). *Teknik Analisa Laporan Keuangan*. Medan: Umsu Press.
- Hanlon, M., & Heitzman, S. (2010). A review of tax research. *Journal of Accounting and Economics*, Vol.50, No.2–3, 127–178. Diunduh 10 Agustus 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1016/j.jacceco.2010.09.002>
- Harahap. (2013). *Analisis Kritis atas Laporan Keuangan*. Jakarta: Penerbit Rajawali Pers.
- Harjito, D. A. (2011). Teori Pecking Order dan Trade-Off dalam Analisis Struktur Modal di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Siasat Bisnis*, Vol.15, No.2, 187–196. Diunduh 05 Oktober 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.20885/jsb.vol15.iss2.art3>
- Harrington, C., & Smith, W. (2012). Tax avoidance and corporate capital structure. *Journal of Finance and Accountancy*, Vol.11, No.144–164.
- Hartono, J. (2008). *Teori Portofolio dan Analisis Investasi Edisi Ke-5*. Yogyakarta: BPFE.
- Hastuti. (2011). *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance Secara Internal dan Eksternal Terhadap Kinerja Keuangan*. Semarang: Skripsi Universitas Diponegoro Semarang.
- Horne, J. C. Van, & Wachowicz, J. M. (2009). *Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan* (Alih bahasa). Jakarta: Salemba Empat.
- Indradi, D. (2018). Pengaruh Likuiditas, Capital Intensity terhadap Agresivitas Pajak. *Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia*, Vol.1, No.1, 147–167.
- Indriani, T. D. W. (2014). *Pengaruh Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, Solvabilitas, Jenis Industri dan Ukuran Kantor Akuntan Publik Terhadap Audit Delay*. Yogyakarta: Skripsi Universitas Negeri Yogyakarta.
- Irianto, D. B. S., & S.Ak, A. W. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. *International Journal of Accounting and Taxation*, Vol.5, No.2, 33–41. Diunduh 16 November 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.15640/ijat.v5n2a3>

- Jamei, R. (2017). Intellectual Capital and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. *International Journal of Economics and Financial Issues*, Vol.7, No.5, 86–92.
- Jensen, M.C. and Meckling, W. H. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, Vol.3, 305–360.
- Jiménez-Angueira, C. E. (2018). The effect of the interplay between corporate governance and external monitoring regimes on firms' tax avoidance. *Advances in Accounting*, Vol.41, 7–24. Diunduh 10 Agustus 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1016/j.adiac.2018.02.004>
- Kanagaretnam, K., Lee, J., Lim, C. Y., & Lobo, G. J. (2016). Relation between auditor quality and tax aggressiveness: Implications of cross-country institutional differences. *Auditing*, Vol.35, No.4, 105–135. Diunduh 10 November 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.2308/ajpt-51417>
- Kasmir. (2010). *Pengantar Manajemen Keuangan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Kerr, J. N., Price, R., & Roman, F. J. (2016). *The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence From Governance Reform*. (646). Diunduh 5 November 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1027/1864-1105/a000183>
- Khan, M., Srinivasan, S., & Tan, L. (2017). Institutional ownership and corporate tax avoidance: New evidence. *Accounting Review*, Vol.92, No.2, 101–122. Diunduh 5 November 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.2308/accr-51529>
- Khoirunnisa. (2015). *Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia*. Lampung: Skripsi Universitas Lampung.
- Kim, J. H., & Im, C. C. (2017). The study on the effect and determinants of small-and medium-sized entities conducting tax avoidance. *Journal of Applied Business Research*, Vol.33, No.2, 375–390.
- Kompas. (2016). *Terkuak, Modus Penghindaran Pajak Perusahaan Jasa Kesehatan Asal Singapura*. Diakses 5 November 2019, dari situs website: <https://money.kompas.com/>
- Kurniasih, T., & Ratna Sari, M. (2013). Pengaruh Return on Assets, Leverage, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Pada Tax Avoidance. *Buletin Studi Ekonomi*, Vol.18, No.1, 58–66.
- Lanis, R., & Richardson, G. (2018). Outside directors, corporate social responsibility performance, and corporate tax aggressiveness: An empirical analysis. *Journal of Accounting, Auditing and Finance*, Vol.33, No.2, 228–251. Diunduh 10 November 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1177/0148558X16654834>
- Mahidin, I., & Danastri, N. D. (2017). Analisis Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Keluarga, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Perusahaan Food

- and Beverages yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2012-2013). *Media Riset Akuntansi*, Vol.5, No.2, Hal-40.
- Mardiasmo. (2018). *Perpajakan Edisi Pertama*. Penerbit Andi.
- Marfu'ah, L. (2015). Pengaruh Return On Asset, Leverage, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Koneksi Politik Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Dan Perpajakan*, Vol.2, No.1, 54–68.
- Mashayekhi, B., & Bazaz, M. S. (2010). The effects of corporate governance on earnings quality: Evidence from Iran. *Asian Journal of Business and Accounting*, Vol.3, No.2, 71–100.
- Merdeka. (2013). Penghindaran Pajak Perusahaan Global di Dunia. Diakses 26 November 2019, dari situs website: <https://www.merdeka.com/>
- Merslythalia, R., & Lasmana, M. S. (2016). Pengaruh Kompetensi Eksekutif, Ukuran Perusahaan, Komisaris Independen, dan Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, Vol.11, No.2. Diunduh 16 September 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.24843/JIAB.2016.v11.i02.p07>
- Modigliani, F., & Miller, M. H. M. (1963). American Economic Association Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. *American Economic Review*, Vol.53, No.3, 433–443. Diunduh 10 Nopember 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1126/science.151.3712.867-a>
- Monks, Robert AG, N. M. (2001). *Corporate governance-United States*. New York: Blackwell Publishing.
- Mulyani, S., Wijayanti, A., & Masitoh, E. (2018). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance (Perusahaan Pertambangan yang terdaftar di BEI). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, Vol.3, No.1, 322–340. Diunduh 10 Nopember 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.31093/jraba.v3i1.91>
- Munandar, R. T., Nazar, M. R., & Sc, M. (2016). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage, dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Kasus pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Otomotif yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2010-2014) The Influence of Company Size to Tax Avoidance. *e-Proceeding of Management*. Jakarta: Desember 2016, Vol.3, No.3, 3417–3424.
- Munawir. (2007). *Analisa Laporan Keuangan Edisi Ke-4*. Yogyakarta: Liberty.
- Musyarofah, E. (2016). *Pengaruh Derivatif Keuangan, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghidaran Pajak (Tax Avoidance)*. Jakarta: Skripsi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Myers, S. C. (2001). Capital structure. *Journal of Economic Perspectives*, Vol.15, No.2, 81–102. Diunduh 10 Nopember 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1257/jep.15.2.81>
- Myers, S. C., & Majluf, N. S. (1984). Corporate financing and investment decisions when firms have information that investors do not have. *Journal of Financial Economics*, Vol.13, No.2, 187–221. Diunduh 5 Oktober 2019, dari situs website: [https://doi.org/10.1016/0304-405X\(84\)90023-0](https://doi.org/10.1016/0304-405X(84)90023-0)

- Nabilla, S. S., & Fikri, I. Z. (2018). Pengaruh Risiko Perusahaan, Leverage (Debt To Equity Ratio) Dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). *Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan 2018 Buku II*. Jakarta: 2018, Hal. 1179–1182. Diunduh 31 Agustus 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.24961/j.tek.ind.pert.2017.27.2.141>
- Nicodème, G. J. A. (2007). Do Larges Companies Have Lower Effective Corporate Tax Rates? A European Survey. *Université Libre de Bruxelles (ULB)*, Vol.7, No.1, 1-32. Diunduh 5 Agustus 2019, dari situs website: https://dipot.ulb.ac.be/dspace/bitstream/2013/53920/1/RePEc_sol_wpaper_07-001.pdf
- Nugroho, W. C., & Agustia, D. (2017). Corporate Governance, Tax Avoidance, and Firm Value. *AAFEBI Accounting Review*, Vol.2, No.2, 15–29.
- OECD. (2015). *Limiting Base Erosion Involving Interest Deductions and Other Financial Payments, Action 4 - 2015 Final Report*. Diunduh 31 September 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1787/9789264241176-en>
- Oktariani, F., & Lembut, P. I. (2019). Tax Avoidance Sebagai Latar Belakang Dalam Memanfaatkan Tax Deductible Expense (Studi pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI). *InFestasi*, Vol.14, No.2, 154. Diunduh 31 September 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.21107/infestasi.v14i2.4860>
- Oler, D. K., & Picconi, M. P. (2014). Implications of insufficient and excess cash for future performance. In *Contemporary Accounting Research*. Vol. 31, No.1, 253-283. Diunduh 31 September 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1111/1911-3846.12012>
- Pohan, C. A. (2013). *Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak* (Revisi). Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Pratama, A., & Padjadjaran, U. (2017). Company Characteristics, Corporate Governance and Aggressive Tax Avoidance Practice: A Study of Indonesian Companies. *Review of Integrative Business and Economics Research Online CDROM*, Vol.6, No.4, 2304–1013.
- Prima, B., & Kartika, H. (2019). Tax justice laporkan bentoel lakukan penghindaran pajak indonesia rugi Rp 14 juta. Diakses 25 Desember 2019, dari situs website: <https://nasional.kontan.co.id/>
- Puspita, S. R., & Harto, P. (2014). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak. *Pengaruh Tata Kelola Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*, Vol.3, No.2, 1077–1089.
- Putri, A., Rohman, A., & Chariri, A. (2016). Tax avoidance, earnings management, and corporate governance mechanism (an evidence from Indonesia). *International Journal of Economic Research*, Vol.13, No.4, 1931–1943.
- Putri, L. T. Y. (2014). Pengaruh Likuiditas, Manajemen Laba dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan (Studi Empiris Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di BEI Periode 2008-2012). *Jurnal Akuntansi*, Vol.2, No.1.
- Putri, V. R., & Putra, B. I. (2017). Pengaruh Leverage, Profitability, Ukuran Perusahaan dan Proporsi Kepemilikan Institusional Terhadap Tax Avoidance.

- Jurnal Manajemen Dayasaing*, Vol.19, No.1, 1. Diunduh 31 Agustus 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.23917/dayasaing.v19i1.5100>
- R. Murhadi, W. (2013). Pengaruh Idiosyncratic Risk Dan Likuiditas Saham Terhadap Return Saham. *Jurnal Manajemen Dan Kewirausahaan*, Vol.15, No.1, 33–39. Diunduh 13 September 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.9744/jmk.15.1.33-40>
- Rambe, M. F. (2016). *Manajemen Keuangan Edisi Ke-4*. Bandung: Citapustaka Media.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, Vol.26, No.6, 689–704. Diunduh 10 Agustus 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1016/j.jaccpubpol.2007.10.003>
- Richardson, G., Wang, B., & Zhang, X. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. *Journal of Contemporary Accounting and Economics*, Vol.12, No.2, 141–158. Diunduh 10 September 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1016/j.jcae.2016.06.003>
- Rinaldi, & Cheisviyanny, C. (2015). Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan Dan Kompensasi Rugi Fiskal Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2010-2013). *Seminar Nasional Ekonomi Manajemen Dan Akuntansi (Snema) Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang*. Padang: 10 Oktober 2015, 472–483.
- Riyanto, B. (2010). *Dasar-dasar Pembelanjaan Perusahaan Edisi ke-4*. Yogyakarta: BPFE.
- Ross L. Watts, & Zimmerman, J. L. (1986). *Positive Accounting Theory*. New York: Prentice-Hall.
- Sartono, A. (2008). *Manajemen Keuangan Teori dan Aplikasi Edisi ke-4*. Yogyakarta: BPFE.
- Sejati, A. R. T. (2017). Cukup kuatkah indonesia menghadapi thin capitalization. Diakses 13 Agustus 2019, dari situs website: <https://www.pajak.go.id/artikel/>
- Siegel, J. G., & Shim, J. K. (2008). *Financial Management Edisi ke-3*. U.S: Barron's Educational Series.
- Siegfried, J. J. (1972). *The relationship between economic structure and the effect of political influence: Empirical evidence from the federal corporation income tax*. Madison USA: Thesis (Ph.D.) University of Wisconsin.
- Singh, A., & Hamid, J. (1992). Corporate financial structures in developing countries. *IFC Technical Paper - World Bank*, Vol.1, 1992.
- Stanfield, J. W. (2011). *Cash Liquidity, Holdings, and Performance as Determinants of Corporate Tax Avoidance*. Indiana: Dissertation, Purdue University (Purdue e-Pubs)
- Subramanyam. (2012). *Analisis Laporan Keuangan Edisi ke-10*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sugiono, A. (2009). *Sugiono, Arief, 2009. Manajemen Keuangan Untuk Praktisi*

Keuangan. Jakarta: Grasindo.

- Suwito, E., & Herawaty, A. (2005). Analisis Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Tindakan Perataan Laba yang Dilakukan oleh Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Jakarta. *Simposium Nasional Akuntansi VII Solo*. Solo: 15-16 September 2005, 136–146.
- Suyanto, K. D., & Supramono, S. (2012). Likuiditas, Leverage, Komisaris Independen, Dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan*, Vol.16, No.2, 167-177.
- Syamsuddin, L. (2013). *Manajemen Keuangan Perusahaan, Konsep Aplikasi dalam: Perencanaan, Pengawasan, dan Pengambilan Keputusan*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Tandean, V. A. (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing Companies Listed in IDX period 2010-2013. *Asian Journal of Accounting Research*, Vol.1, No.1, 28–38. Diunduh 10 Agustus 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1108/ajar-2016-01-01-b004>
- Tandean, V.A., & Jonathan. (2016). Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Profitabilitas Sebagai Variabel Pemoderasi. *Prosiding Seminar Nasional Multi Disiplin Ilmu & Call For Papers Unisbank*, Semarang: 28 Juli 2016. Hal.703–708.
- Timothy, Y. C. K. (2010). Effects Of Corporate Governance On Tax Avoidance. *Hong Kong Baptist University*. Hongkong: An Honours Degree Project Submitted to the School of Business in Partial Fulfilment of the Graduation Requirement for the Degree of Bachelor of Business Administration (Honours). Diunduh 10 Agustus 2019, dari situs website: [https:// http://lib-sca.hkbu.edu.hk/trsimage/hp/07014341.pdf](https://http://lib-sca.hkbu.edu.hk/trsimage/hp/07014341.pdf)
- Torang, S. (2012). *Metode Riset Struktur & Perilaku Organisasi*. Bandung: Alfabeta.
- Turyatini, T. (2017). The Analysis of Tax Avoidance Determinant on The Property and Real Estate Companies. *Jurnal Dinamika Akuntansi*, Vol.9, No.2, 143–153. Diunduh 6 Oktober 2019, dari situs Website: <https://doi.org/10.15294/jda.v9i2.10385>
- Wahab, E. A. A., Ariff, A. M., Marzuki, M. M., & Sanusi, Z. M. (2017). Political connections, corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. *Asian Review of Accounting*, Vol.25, No.3, 424–451. Diunduh 5 Oktober 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1108/ARA-05-2016-0053>
- Wahyudi. (2014). Dampak Penerapan Good Corporate Governance terhadap Kepatuhan Pajak Perusahaan. Diakses 29 April 2019, dari situs website: <https://bppk.kemenkeu.go.id/>
- Waluyo, W. (2019). the Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: Empirical Study of the Indonesian Banking Company. *The Accounting Journal of Binaniaga*, Vol.2, No.02, 1–10. Diunduh 5 Oktober 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.33062/ajb.v2i02.92>
- Whipple, H. (2018). Value Engineering and the Lean Start-Up. *2016 Value Summit*:

The Power of VE.

- Winarno, S. H. (2017). Penilaian Kinerja Keuangan Perusahaan Melalui Analisis Rasio Profitabilitas. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, Vol.IV, No.2, 45–51.
- Winata, F. (2014). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2013. *Tax & Accounting Review*, Vol.4, No.1, 162-172.
- Xia, C., Cao, C., & Chan, K. C. (2017). Social trust environment and firm tax avoidance: Evidence from China. *North American Journal of Economics and Finance*, Vol.42, 374–392. Diunduh 6 Oktober 2019, dari situs website: <https://doi.org/10.1016/j.najef.2017.07.013>
- Zimmerman, J. L. (1983). Taxes and firm size. *University of Rochester, Rochester, NY 14627, USA*, Vol.5, 119–149. Diunduh 10 Agustus 2019, dari situs website: [https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0165-4101\(83\)90008-3](https://doi.org/https://doi.org/10.1016/0165-4101(83)90008-3)



Lampiran 1
Penelitian Sebelumnya (Jurnal)
Matriks Hubungan Variabel X₁, X₂, X₃, X₄, X₅ dan X₆ Terhadap Variabel Y (Tax Avoidance)

No.	Pengarang, Judul Jurnal, Edisi dan Halaman	Hasil Tulisan / Pernyataan	Hubungan Variabel	Note
	Struktur Modal / DER (X₁)			
1.1	Buettner, T., Overesch, M., Schreiber, U. (2006). Taxation and Capital Structure Choice – Evidence from a Panel of German Multinationals. <i>Discussion Paper</i> No. 06-067	The empirical analysis of the capital structure choice of multinationals confirms that the local tax burden exerts important effects on the affiliate's leverage.	X ₁ ---→ Y Positif	
1.2	Richardson, G. Wang, B., Zhang, X. (2016). Ownership structure and corporate tax avoidance: Evidence from publicly listed private firms in China. <i>Journal of Contemporary Accounting & Economics</i> . 12 (2016) 141–158	The research also find a significantly positive association between pyramidal ownership structure and tax avoidance due to the entrenchment effect.	X ₁ ---→ Y Positif	
1.3	Ghazouani, T. (2013). The Capital Structure through the Trade-Off Theory: Evidence from Tunisian Firm. <i>International Journal of Economics and Financial Issues</i> Vol. 3, No. 3, 2013, pp.625-636 ISSN: 2146-4138.	The results of the static model show that the profitability and asset structure are the main explanatory variables of the level of leverage of Tunisian firms. While for the dynamic model, the most remarkable result is manifested at the level of the adjustment costs that are relatively high which engendered a slow adjustment towards the optimal ratio.	X ₁ ---→ Y Positif	Capital structure affect the leverage. Higher leverage affect tax avoidance with it's interest expense

1.4	Richardson, G. and Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. <i>Journal of Accounting and Public Policy</i> 26 (2007) 689-704	Corporate effective tax rates are associated with several major firm-specific characteristics, including firm size, capital structure (leverage) and asset mix (capital intensity, inventory intensity and R&D intensity). While the Ralph Review tax reform had a significant impact on many of these associations, corporate effective tax rates continue to be associated with firm size, capital structure and asset mix after the tax reform.	$X_1 \dashrightarrow Y$ Associated with	
1.5	Oktariani, F. dan Lembut, P.I. (2018) Tax Avoidance Sebagai Latar Belakang dalam Memanfaatkan Tax Deductible Expense. <i>Jurnal InFestasi Vol. 14 No. 2</i> Desember 2018. Hal. 154 – 168	Berdasarkan hasil pengujian penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa bahwa perusahaan akan selalu menggunakan tax deductible expense dalam usahanya untuk melakukan tax avoidance berapapun tarif pajak yang dikenakan oleh pemerintah.	$X_1 \dashrightarrow Y$ Positif	Perusahaan yang menggunakan utang dalam struktur modalnya akan mempunyai biaya/beban bunga pinjaman yang secara pajak boleh dibebankan (tax deductible expense). Pembebanan biaya bunga tersebut akan mengecilkan pajak terutang, dan kecilnya pajak terutang menyebabkan CETR (tax avoidance) menjadi besar. Jadi secara tidak langsung struktur modal memengaruhi tax avoidance.

1.6	Harrington, C. and Smith, W. (1989). Tax avoidance and corporate capital structure. <i>Journal of Finance and Accountancy</i>	Firms with ongoing focus of general tax avoidance may be willing to have higher leverage and accept higher costs associated with the risk of financial distress to maintain lower CETR.	$X_1 \text{ ---} \rightarrow Y$ Positif	
1.7	Alnajjar, M.I.M (2015). Business Risk Impact on Capital Structure: A Case of Jordan Industrial Sector. <i>Global Journal of Management and Business Research: C Finance</i> Volume 15 Issue 1 Version 1.0 Year 2015	This research study results show that industrial sectors firm's managers are risk averse, whereas sales growth and firm size are positively related to financial policy decision. Keterangan: Perusahaan cenderung menggunakan struktur modal yang mempunyai manfaat pengurangan pajak (<i>tax shields benefit</i>) terbesar. Nilai dari <i>tax shield</i> benefit ini dihitung melalui perkalian pengurangan dengan <i>effective tax rate</i> (<i>tax avoidance</i>). Jadi secara tidak langsung struktur modal memengaruhi perilaku <i>tax avoidance</i> perusahaan.	$X_1 \text{ ---} \rightarrow Y$ Positif	
1.8	Alfandia, N.,S. (2018). Pajak dan Struktur Modal Perusahaan Manufaktur di Indonesia. <i>Jurnal berkala Akuntansi dan Keuangan Indonesia</i> , Vol. 03, No. 01 (2018): 17-34	Berdasarkan pengujian yang dilakukan, diketahui bahwa <i>Effective Tax Rate</i> (ETR) dapat memengaruhi kebijakan utang perusahaan (struktur modal).	$X_1 \text{ ---} \rightarrow Y$ Positif	
1.9	Nabila, S.S. dan ZulFikri, I. (2018). Pengaruh Risiko Perusahaan, Leverage (Debt to Equity Ratio) dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance). (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur subsektor makanan dan minuman yang Terdaftar di BEI	Hasil analisis menunjukkan bahwa risiko perusahaan, leverage (<i>debt to equity ratio</i>) dan pertumbuhan penjualan berpengaruh positif terhadap <i>tax avoidance</i> .	$X_5 \text{ ---} \rightarrow Y$ Berpengaruh Positif	

	Tahun 2014-2017). <i>Seminar Nasional Cendekiawan ke 4 Tahun 2018</i> .			
I.10	Adisamartha, IBPF. And Noviani, N. (2015). Pengaruh Liquiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. <i>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana</i> Vol.13.3 Desember (2015): 973-1000	faktor leverage dan intensitas aset tetap tidak berpengaruh signifikan pada tingkat agresivitas wajib pajak badan.	$X_5 \text{ ---} \rightarrow Y$ Tidak berpengaruh	
I.11	Cahyanti, E.S., Muhsin, Suharto, AKM.B. (2017). Profitabilitas, Leverage, Liquiditas dan Tax Avoidance. Kasus: Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index. <i>Jurnal Ekubis</i> Volume 2, No. 1, September 2017, ISSN: 2541-1950	The results of this study indicate that only the profitability proportion has a positive effect on tax avoidance, but profitability, leverage and liquidity has significantly effect to tax avoidance simultaneously.	$X_5 \text{ ---} \rightarrow Y$ Negatif	Leverage dalam penelitian tersebut diprosikan melalui debt to equity ratio (DER)
I.12	Irianto, B.S., Sudiby, Y.A. and Wafiri, A. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. <i>International Journal of Accounting and Taxation</i> December 2017, Vol. 5, No. 2, pp. 33-41. ISSN: 2372-4978. Published by American Research Institute for Policy Development.	The results showed that the size positive influence on the effective tax rate. While leverage, profitability and capital intensity ratio does not significantly influence the tax avoidance	$X_5 \text{ ---} \rightarrow Y$ Negatif	
I.13	Alfina, IT., Nurlaela, S. and Wijayanti, A. (2018). The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance. <i>The 2nd International</i>	The results of this research show that leverage, independent Commissioner of the company and the size effect on tax avoidance . While profitability has no effect on tax avoidance.	$X_5 \text{ ---} \rightarrow Y$ Positif	

	<i>Conference on Technology, Education, and Social Science 2018 (The 2nd ICTESS 2018)</i>			
1.14	Turyantini (2017). The Analysis of Tax Avoidance Determinant on The Property and Real Estate Companies. <i>Jurnal Dinamika Akuntansi (licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License)</i> Vol. 9, No. 2, September 2017, pp. 143-153	The results show that leverage and company size have significant effect on tax avoidance . Sales growth, institutional ownership and independent commissioners do not have significant effect on tax avoidance.	$X_5 \text{ ---} \rightarrow Y$ Positif	Leverage in this research is proxied by debt to equity ratio (DER)
1.15	Suyanto, K.D. and Supramono (2012). Liquiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. <i>Jurnal Keuangan dan Perbankan</i> , Vol.16, No.2 Mei 2012, hlm. 167–177 (Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License)	The result of the hypothesis was that it failed to find significant relation between liquidity and tax aggressiveness. Independent commissioners had a negative impact to tax aggressiveness, but leverage and earning management had a positive impact to tax aggressiveness .	$X_5 \text{ ---} \rightarrow Y$ Positive impact	
1.16	Munandar, R.T., Nazar, M.R., and Khairunnisa (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. <i>e-Proceeding of Management</i> : Vol.3, No.3 December 2016, Page 3417	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage, dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Secara parsial, ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan <i>leverage</i> dan kompensasi rugi fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance .	$X_5 \text{ ---} \rightarrow Y$ Tidak berpengaruh	Leverage diproksikan ke dalam rasio <i>Total debt to Total equity</i> (DER)

	Good Corporate Governance (X ₂ , X ₃ , X ₄)			
2.1	Darmawan, I.G.H. dan Sukartha, I Made. (2014). Pengaruh Penerapan Corporate Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. <i>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana</i> . 9.1 (2014): 143-161	Terdapat pengaruh antara <i>corporate governance</i> dengan penghindaran pajak	X ₂ ---→ Y Positif	
2.2	Ayu, N. dan Kurniasih, A.L. (2012). Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance. <i>Jurnal Akuntansi dan Auditing Universitas Sebelas Maret</i> vol. 8, no. 2, pp. 123-136, May. 2012	Corporate governance that consist of audit quality and audit committee significantly influence the activity of tax avoidance as measured using proxy book tax gap	X ₂ ---→ Y Positif	
2.3	Armstrong, C.S, Blouin, J.L., and Jagolinzer, A.D., Larcker, D.F.. (2015). Corporate Governance, Incentives, and Tax Avoidance. <i>Accounting Papers Scholarly Commons University of Pennsylvania</i> .	These results indicate that governance attributes have a stronger relation with more extreme levels of tax avoidance. Positive relation between board independence and financial sophistication for low levels of tax avoidance, but a negative relation for high levels of tax avoidance	X ₂ ---→ Y Stronger relation – Negatif	
2.4	Păunescu, R.A., Vintilă, G. and Gherghina, S.C. (2016). Exploring the Link between Corporate Governance Characteristics and Effective Corporate Tax Rate: A Panel Data Approach on U.S. Listed Companies. <i>IBIMA Publishing Journal of Financial Studies & Research</i> Vol. 2016 (2016), Article ID 857506	Board independence and board size have a statistically significant negative impact on effective corporate tax rate . It is also important to note that board independence Granger cause corporate taxation.	X ₂ ---→ Y Negatif	

2.5	Kerr, J.N., Price, R. and Roman F.J. (2016). The Effect of Corporate Governance on Tax Avoidance: Evidence from Governance Reform. <i>Proceeding Zicklin School of Business Baruch College – City University of New York</i>	Tax avoidance decreases significantly following the implementation of the governance reform.	$X_2 \text{ ---} \rightarrow Y$ Positif	
2.6	Tandean, V.A. and Winnie (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing. <i>Asian Journal of Accounting Research</i> 1 (2016) 28 – 38	Audit committee has a positive effect on tax avoidance in partial but the executive compensation, executive character, company size, institutional ownership, boards of commissioners' proportion, audit committee and audit quality have simultaneous effect to define tax avoidance.	$X_2 \text{ ---} \rightarrow Y$ Positif	
2.7	Jamei, R. (2017). Tax Avoidance and Corporate Governance Mechanisms: Evidence from Tehran Stock Exchange. <i>International Journal of Economics and Financial Issues</i> , ISSN: 2146-4138, 2017	There is no significant relationship between number of board members, proportion of non-duty members, institutional ownership and tax avoidance. Furthermore, there is no significant relationship between managerial ownership and tax avoidance.	$X_2 \text{ ---} \rightarrow Y$ Negatif	
2.8	Masripah, Diyanty, V. and Fitriyanti, D. (2016). Controlling Shareholder and Tax Avoidance: Family Ownership and Corporate Governance. <i>International Research Journal of Business Studies</i> . ISSN: 2089-6271 e-ISSN: 2338-4565. Vol.8 No.3 2016	Board of commissioner and committee effectiveness proved to weaken the relationship between entrenchment effect of controlling shareholder and tax avoidance	$X_2 \text{ ---} \rightarrow Y$ Negatif	
2.9	Gallemore, J. and Labro, E. (2015). The importance of the internal information	That the internal information environment of the firm is important for understanding its tax avoidance outcomes.	$X_2 \text{ ---} \rightarrow Y$ Positif	

	environment for tax avoidance. <i>Journal of Accounting and Economics</i> 60 (2015) 149-167			
2.10	Xia, C. and Cao, C., Chan, K.C. (2017). Social trust environment and firm tax avoidance: Evidence from China. <i>North American Journal of Economics and Finance</i> . 42 (2017) 374-392	Social trust and its interactions with corporate governance and state ownership are important internal and external determinants on the variations in tax avoidance.	$X_2 \text{ ---} \rightarrow Y$ Positif	
2.11	Nugroho, W.C and Agustia, D. (2017). Corporate Governance, Tax Avoidance, and Firm Value. <i>AFEBI Accounting Review (AAR)</i> Vol.02 No.02, December 2017	that (1) institutional ownership significantly influence tax avoidance (2) independent commissioners have no influence on tax avoidance; (3) institutional ownership does not influence the firm value; (4) independent commissioner and tax avoidance have significant effect to firm value; (5) tax avoidance does not mediate the institutional ownership relationship to firm value.	$X_2 \text{ ---} \rightarrow Y$ Positif	
2.12	Yee, C.S, Sapiei, N.S, Abdullah, M. (2018). Tax Avoidance, Corporate Governance and Firm Value in The Digital Era. <i>Journal of Accounting and Investment</i> , 19(2), 160-175.	Corporate governance has moderator effect on the relationship of tax avoidance and firm value.	$X_2 \text{ ---} \rightarrow Y$ Positif	
2.13	Sari, D.K., Utama, S., Rossieta, H. (2017). Tax Avoidance, Related Party Transaction, Corporate Governance and The Corporate Cash Dividend Policy. <i>Journal of Indonesian Economy and Business</i> Volume 32, Number 3, 2017, 190 – 208	The impact of the implementation of strong Corporate Governance will weaken the positive relationship between corporate tax avoidance and the company's RPT size.	$X_2 \text{ ---} \rightarrow Y$ Negatif	
2.14	Wahab, E.A.A., Ariff, A.M., Marzuki, M.M., Sanusi, Z.M. (2016). Political connections,	the study finds no evidence to suggest that corporate governance mitigates the influence of political	$X_2 \text{ ---} \rightarrow Y$	

	corporate governance, and tax aggressiveness in Malaysia. <i>Asian Review of Accounting</i> Vol. 25 No. 3, 2017 pp. 424-451	connections in promoting tax aggressiveness behavior.	Negatif	
2.15	Putri, A., Rohman, A., Chariri, A. (2016). Tax Avoidance, Earning Manajemen, And Corporate Management Mechanism (An Evidence from Indonesia). <i>IJER © Serials Publications</i> 13(4), 2016: 1931-1943 ISSN: 0972-9380	The research proved that the manufacturing company in Indonesia applies tax avoidance in earning management. These results also showed that among the three indicators of the corporate governance mechanism used only institutional ownership is capable of reducing the effect of tax avoidance on earnings management; while, the board of commissioners and the independent commissioner are not.	$X_2 \text{ ---} \rightarrow Y$ Positif & Negatif	Institutional ownership \rightarrow Positif Board of commissioner & independent commissioner \rightarrow negatif
2.16	Lanis, R. and Richardson, G. (2018) Outside Directors, Corporate Social Responsibility Performance, and Corporate Tax Aggressiveness: An Empirical Analysis. <i>Journal of Accounting, Auditing & Finance</i> 2018, Vol. 33(2) 228-251	The presence of outside directors on the board magnifies the negative association between CSR performance and tax aggressiveness.	$X_2 \text{ ---} \rightarrow Y$ Negative association	
2.17	Bayar, O., Huseynov, F. and Sardarli, S. (2018). Corporate Governance, Tax Avoidance, and Financial Constraints. <i>Financial Management Fall 2018</i> , pages 651 – 677	that tax avoidance is a less useful source of financing for constrained firms when they are plagued with potential agency problems and opaque information environments. Stronger governance mechanisms can help firms mitigate the negative consequences of tax avoidance.	$X_2 \text{ ---} \rightarrow Y$ Positif	
2.18	Angueira, C.E.J. (2018). The effect of the interplay between corporate governance and	The study adds to the corporate tax avoidance literature by providing evidence regarding the	$X_2 \text{ ---} \rightarrow Y$ Positif	

	external monitoring regimes on firms' tax avoidance. <i>Advances in Accounting</i> 2018	importance of considering external monitoring regimes in the study of the relationship between corporate governance and tax avoidance.		
2.19	Pratama, A. (2017). Company Characteristics, Corporate Governance and Aggressive Tax Avoidance Practice: A Study of Indonesian Companies. <i>Review of Integrative Business and Economics Research</i> , Vol. 6, Issue 4	This research showed that several company characteristics proxies, namely age, profit and size, significantly affected tax avoidance practices. Several corporate governance proxies , audit firm, audit quality and size of the board of commissioners, were also found to affect tax avoidance.	$X_2 \rightarrow Y$ Positif	
2.20	Alfina, IT., Nurlaela, S. and Wijayanti, A. (2018). The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance. <i>The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018 (The 2nd ICTESS 2018)</i>	The results of this research show that leverage, independent Commissioner of the company and the size effect on tax avoidance. While profitability has no effect on tax avoidance.	$X_2 \rightarrow Y$ Positif	Independent commissioner is one of a part of good corporate governance.
2.21	Turyantini (2017). The Analysis of Tax Avoidance Determinant on The Property and Real Estate Companies. <i>Jurnal Dinamika Akuntansi (licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License)</i> Vol. 9, No. 2, September 2017, pp. 143-153	The results show that leverage and company size have significant effect on tax avoidance. Sales growth, institutional ownership and independent commissioners do not have significant effect on tax avoidance.	$X_2 \rightarrow Y$ Negatif	Good corporate governance in this research proxied by institutional ownership and independent commissioner
2.22	Friese, A., Link, S. and Mayer, S. (2006). Taxation and Corporate Governance. <i>Working paper Max Planck Institute for Intellectual Property, Competition and Tax Law, Munich, Germany, 19 January 2006</i>	Actual corporate governance structures in place have an impact on the way companies manage their tax affairs.	$X_2 \rightarrow Y$ Positif	

2.23	Eksandy, A. (2017). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, dan Kualitas Audit terhadap Penghindaran Pajak (<i>Tax Avoidance</i>). <i>Competitive Jurnal Akuntansi dan Keuangan</i> 1 (1), 1-20	Komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif terhadap tax avoidance, komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Secara simultan komisaris independen, komite audit dan kualitas audit berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).	$X_2 \rightarrow Y$ Positif Negatif	Komisaris independen dan kualitas audit berpengaruh positif, sedangkan komite audit tidak berpengaruh secara signifikan.
	Liquiditas (X₅)			
3.1	Chen, Y., Ge, R., Louis, H., Zolotoy, L. (2014). Stock Liquidity and Corporate Tax Avoidance. <i>JEL Classification: G10, G30, M40</i>	Firms with liquid stocks are less likely to have either extremely high or extremely low effective tax rates, suggesting that stock liquidity mitigates extreme tax avoidance	$X_3 \rightarrow Y$ Positif	
3.2	Indradi, D. (2018). Pengaruh Liquiditas, Capital Intensity Terhadap Agresivitas Pajak (Studi empiris perusahaan Manufaktur sub sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI tahun 2012-2016). <i>Jurnal Akuntansi Berkelanjutan Indonesia</i> Vol.1, No.1, Januari 2018	Liquidity effect on tax aggressiveness, Capital intensity has no effect on tax aggressiveness. While simultaneously Liquidity and Capital Intensity have an effect on Aggressiveness of Tax.	$X_3 \rightarrow Y$ Positif	
3.3	Adisamartha, IBPF. And Noviani, N. (2015). Pengaruh Liquiditas, Leverage, Intensitas Persediaan Dan Intensitas Aset Tetap pada Tingkat Agresivitas Wajib Pajak Badan. <i>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana</i> Vol.13.3 Desember (2015): 973-1000	Hasil penelitian yang diperoleh adalah faktor liquiditas dan intensitas persediaan berpengaruh positif dan signifikan pada tingkat agresivitas pajak.	$X_3 \rightarrow Y$ Berpengaruh Positif	

3.4	Cahyanti, E.S., Muhsin, Suharto, AKM.B. (2017). Profitabilitas, Leverage, Liquiditas dan Tax Avoidance. Kasus: Perusahaan Pertambangan yang Terdaftar di Jakarta Islamic Index. <i>Jurnal Ekubis</i> Volume 2, No. 1, September 2017, ISSN: 2541-1950	The results of this study indicate that only the profitability proportion has a positive effect on tax avoidance, but profitability, leverage and liquidity has significantly effect to tax avoidance simultaneously.	$X_3 \dashrightarrow Y$ Tidak berpengaruh	
3.5	Rodríguez, E.F. and Arias, A.M. (2014). Determinants of the Effective Tax Rate in the BRIC Countries. <i>Emerging Markets Finance & Trade</i> /May–June 2014, Vol. 50, Supplement 3, pp. 214–228.	The results show that the ETR for one year depends on the tax burden borne the previous year. The only variable that is significant in all the BRIC countries is inventory intensity. Firm size, leverage, and profitability affect the tax burden in three of the four countries considered but with certain differences.	$X_3 \dashrightarrow Y$ Positif	Inventory intensity significantly affect the tax burden. Inventory is one of a part of current asset, which is used to count liquidity. ETR depend on the tax burden, so the tax burden affect the tax avoidance
3.6	Stanfield, Jason W. (2011). Cash liquidity, holdings, and performance as determinants of corporate tax avoidance. <i>Purdue University, ProQuest Dissertations Publishing</i> , 2011. 3481156.	Liquidity are not robust for all measures, and insufficient cash is no longer significantly associated with the cash effective tax rate	$X_3 \dashrightarrow Y$ Negatif	
3.7	Oler, D. and Picconi, M. (2010). Implications of Insufficient and Excess Cash for Future Performance. <i>Social Science Research Network (SSRN)</i> .	Investment strategies based on estimated insufficient and excess cash produce fairly consistent positive abnormal returns, are complimentary to an investment strategy based on accruals, and are strongest for firms with high accruals.	$X_3 \dashrightarrow Y$ Berpengaruh Positif	Insufficient or excess cash affect the tax burden. Bigger corporate pays a huge taxes that can push manajemen to do tax avoidance

3.8	Roychowdhury, S. (2006). Earnings Management through Real Activities Manipulation. <i>Forthcoming at the Journal of Accounting and Economics</i> . Social Science Research Network (SSRN)	I find evidence consistent with managers manipulating real activities to avoid reporting annual losses to improve reported margins among firms reporting small annual profits.	$X_3 \text{ ---} \rightarrow Y$ Negatif	After controlling for real activities-based earnings management, as measured, the results for liquidity are not robust for all measures, and insufficient cash is no longer significantly associated with the cash effective tax rate.
3.9	Suyanto, K.D. and Supramono (2012). Liquiditas, Leverage, Komisaris Independen, dan Manajemen Laba Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. <i>Jurnal Keuangan dan Perbankan</i> , Vol.16, No.2 Mei 2012, hlm. 167–177 (Licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License)	The result of the hypothesis was that it failed to find significant relation between liquidity and tax aggressiveness . Independent commissioners had a negative impact to tax aggressiveness, but leverage and earning management had a positive impact to tax aggressiveness.	$X_3 \text{ ---} \rightarrow Y$ Tidak Berpengaruh	
3.10	Putri, L.,T.,Y. (2014). Pengaruh Liquiditas,Manajemen Laba dan Corporate Governance Terhadap Agresivitas Pajak Perusahaan. <i>Jurnal Elektronik Universitas Negeri Padang</i> , Vol 2, No.1 2014.	liquiditas yang diukur dengan <i>current ratio</i> (LIQ) memiliki pengaruh negatif yang tidak signifikan terhadap agresivitas pajak	$X_3 \text{ ---} \rightarrow Y$ Tidak Berpengaruh	
	Ukuran Perusahaan (X₆)			
4.1	Darmawan, I.G.H. dan Sukartha, I Made (2014). Pengaruh Penerapan Corporate	Terdapat pengaruh antara ukuran perusahaan dengan penghindaran pajak	$X_4 \text{ ---} \rightarrow Y$ Positif	

	Governance, Leverage, Return on Assets, dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. <i>E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana</i> . 9.1 (2014): 143-161			
4.2	Irianto, B.S., Sudibyo, Y.A. and Wafirli, A. (2017). The Influence of Profitability, Leverage, Firm Size and Capital Intensity Towards Tax Avoidance. <i>International Journal of Accounting and Taxation</i> December 2017, Vol. 5, No. 2, pp. 33-41. ISSN: 2372-4978. Published by American Research Institute for Policy Development.	The results showed that the size positive influence on the effective tax rate . While leverage, profitability and capital intensity ratio does not significantly influence the tax avoidance	X ₄ ----> Y Positif	
4.3	Aminah, Chairina, and Sari, Y.Y. (2017). The Influence of Company Size, Fixed Asset Intensity, Leverage, Profitability, and Political Connection To Tax Avoidance. <i>AFEBI Accounting Review (AAR)</i> Vol.02 No.02, December 2017	The result showed that the profitability and political connections have influences to tax avoidance. While company size, intensity fixed assets and leverage do not influence tax avoidance.	X ₄ ----> Y Negatif	
4.4	Alfina. IT., Nurlaela, S. and Wijayanti, A. (2018). The Influence of Profitability, Leverage, Independent Commissioner, and Company Size to Tax Avoidance. <i>The 2nd International Conference on Technology, Education, and Social Science 2018 (The 2nd ICTESS 2018)</i>	The results of this research show that leverage, independent Commissioner of the company and the size effect on tax avoidance . While profitability has no effect on tax avoidance.	X ₄ ----> Y Positif	

4.5	Pratama, A. (2017). Company Characteristics, Corporate Governance and Aggressive Tax Avoidance Practice: A Study of Indonesian Companies. <i>Review of Integrative Business and Economics Research</i> , Vol. 6, Issue 4	This research showed that several company characteristics proxies, namely age, profit and size, significantly affected tax avoidance practices.	$X_4 \rightarrow Y$ Positif	
4.6	Rodríguez, E.F. and Arias, A.M. (2014). Determinants of the Effective Tax Rate in the BRIC Countries. <i>Emerging Markets Finance & Trade</i> May–June 2014, Vol. 50, Supplement 3, pp. 214–228.	The results show that the ETR for one year depends on the tax burden borne the previous year. The only variable that is significant in all the BRIC countries is inventory intensity. Firm size, leverage, and profitability affect the tax burden in three of the four countries considered but with certain differences.	$X_4 \rightarrow Y$ Positif	Firm size affect the tax burden in three of the four countries considered but with certain differences. ETR depend on the tax burden, so the tax burden affect the tax avoidance
4.7	Turyantini (2017). The Analysis of Tax Avoidance Determinant on The Property and Real Estate Companies. <i>Jurnal Dinamika Akuntansi (licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License)</i> Vol. 9, No. 2, September 2017, pp. 143-153	The results show that leverage and company size have significant effect on tax avoidance. Sales growth, institutional ownership and independent commissioners do not have significant effect on tax avoidance.	$X_4 \rightarrow Y$ Positif	
4.8	Munandar, R.T., Nazar, M.R., and Khairunnisa (2015). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Leverage dan Kompensasi Rugi Fiskal terhadap Tax Avoidance. <i>E-Proceeding of Management</i> : Vol.3, No.3 December 2016, Page 3417	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, leverage, dan kompensasi rugi fiskal secara simultan berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance. Secara parsial, ukuran perusahaan berpengaruh negatif signifikan terhadap tax avoidance, sedangkan leverage dan kompensasi rugi	$X_4 \rightarrow Y$ Negatif	

		fiskal tidak berpengaruh signifikan terhadap tax avoidance.		
4.9	Tandean, V.A. and Winnie (2016). The Effect of Good Corporate Governance on Tax Avoidance: An Empirical Study on Manufacturing. <i>Asian Journal of Accounting Research</i> 1 (2016) 28 – 38	Audit committee has a positive effect on tax avoidance in partial but the executive compensation, executive character, company size , institutional ownership, boards of 115ommissioners' proportion, audit committee and audit quality have simultaneous effect to define tax avoidance .	$X_4 \text{ ---} \rightarrow Y$ Does not effect	
4.10	Richardson, G. and Lanis, R. (2007). Determinants of the variability in corporate effective tax rates and tax reform: Evidence from Australia. <i>Journal of Accounting and Public Policy</i> 26 (2007) 689-704	Corporate effective tax rates are associated with several major firm-specific characteristics, including firm size , capital structure (leverage) and asset mix (capital intensity, inventory intensity and R&D intensity). While the Ralph Review tax reform had a significant impact on many of these associations, corporate effective tax rates continue to be associated with firm size, capital structure and asset mix after the tax reform.	$X_4 \text{ ---} \rightarrow Y$ Associated with	
4.11				
4.12	Kim, J.H. and Im, C.C. (2017). The Study On The Effect And Determinants Of Small - And Medium-Sized Entities Conducting Tax Avoidance. <i>Journal of Applied Business Research; Laramie</i> Vol. 33, Iss. 2, (Mar-Apr 2017): 375-390.	The result shows that firm size (SIZE) , profitability (ROA), leverage (LEV), operating cash flow(CFO), capital intensity (PPE), R&D intensity (RNDS), and growth rate (GS) all influence the corporate tax avoidance of SME. Our result also suggests that there is variation in the determinants among the SME with high corporate tax avoidance.	$X_4 \text{ ---} \rightarrow Y$ Berpengaruh Positif	

4.13	Sari, G.,M. (2014). Pengaruh Corporate Governance, Ukuran Perusahaan, Kompensasi Rugi Fiskal Dan Struktur Kepemilikan Terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI tahun 2008-2012). <i>Jurnal Elektronik Universitas Negeri Padang</i> , Vol 2, No.3 2014.	Ukuran perusahaan yang diukur dengan log total aset memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap <i>Tax avoidance</i>	X ₄ ---→ Y Berpengaruh Positif	
4.14	Prawira, Y., M. (2018). Pengaruh Return on Assets, Corporate Governance, Ukuran Perusahaan Terhadap Tax Avoidance. <i>Jurnal Elektronik Universitas Negeri Padang</i> , Vol 6, No 1 (2018): Seri D.	The results showed that return on assets (X1) had a significant negative effect on tax avoidance (Y), while corporate governance (X2) and firm size (X3) did not affect tax avoidance	X ₄ ---→ Y Tidak berpengaruh	



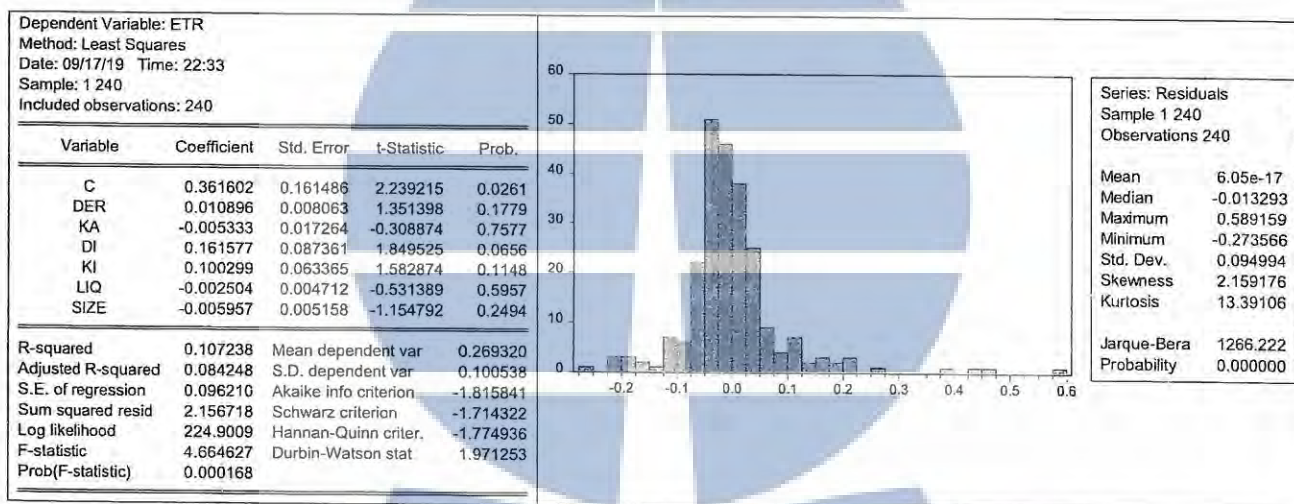
Lampiran 2
 Proses Winsorizing pada variabel ETR

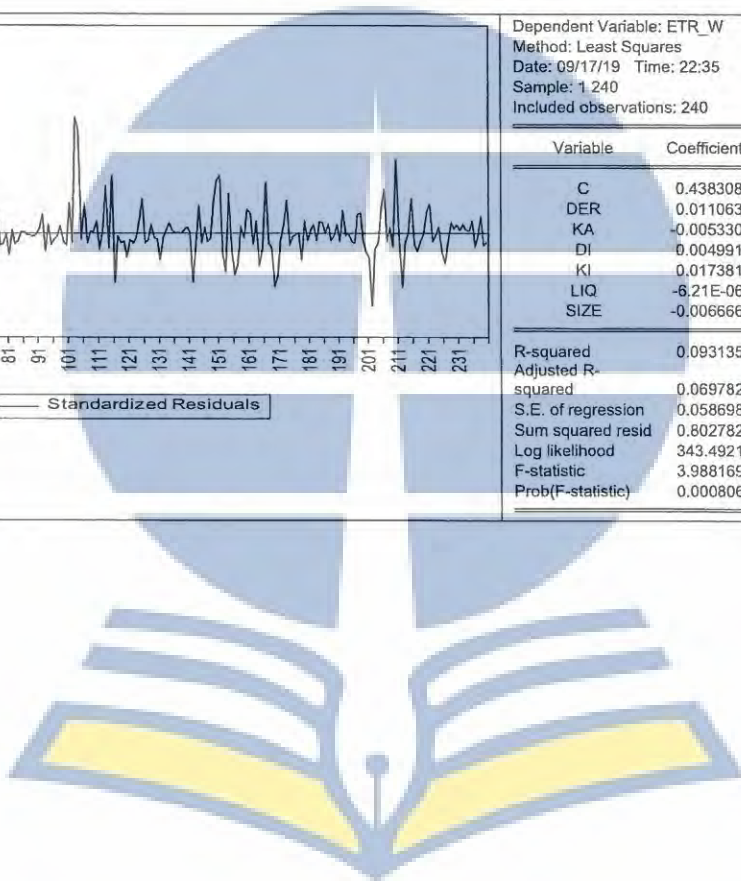
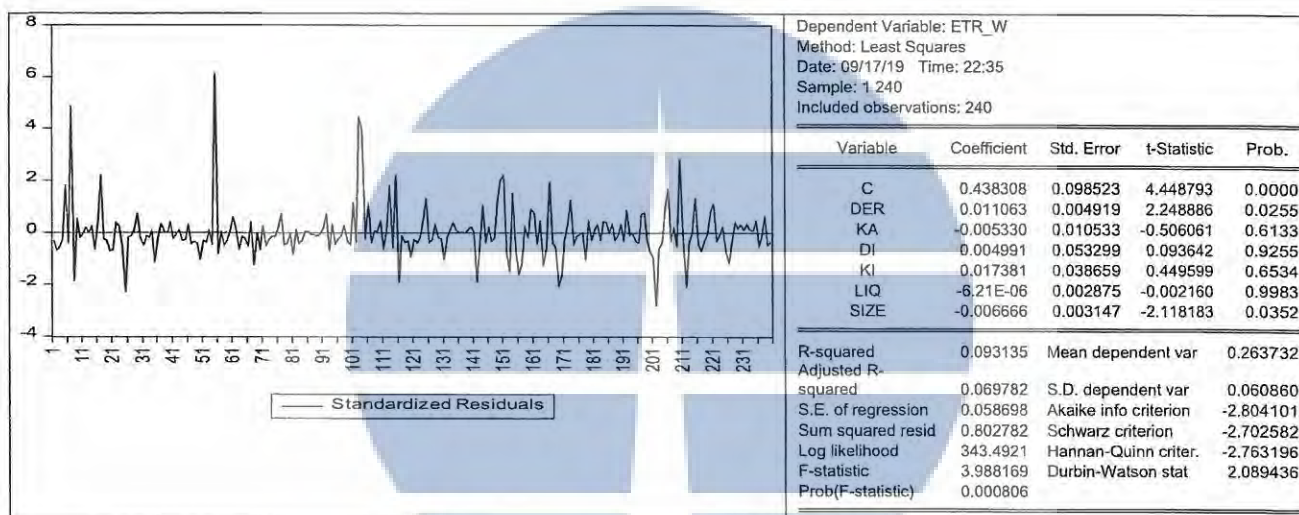
```
Last updated: 09/17/19 - 22:34
Modified: 1 240 =>
    out =
@recode(in<=0.161878600055863
,0.161878600055863,in)
    Modified: 1 240 =>
    out =
@recode(in>=0.430076101970317
,0.430076101970317,out)
```

1	0.1898775569523671	27	0.2452536550158033	53	0.2961919006203644	79	0.2260652135673586	105	0.2311106455241437
2	0.166000580165284	28	0.247287318123755	54	0.2460616947125721	80	0.2539336805454641	106	0.4057384870850084
3	0.2569325548086661	29	0.2940947837043595	55	0.430076101970317	81	0.1880915126883799	107	0.2277855174960639
4	0.2351039930604735	30	0.2572797402572696	56	0.2800881686926453	82	0.300004724618715	108	0.2281685993775263
5	0.430076101970317	31	0.2194973635726452	57	0.2566379715692436	83	0.2639765272781102	109	0.2265424355111851
6	0.2364528403703483	32	0.2504193792400202	58	0.2510691858074513	84	0.2449347653895264	110	0.2647572604321258
7	0.430076101970317	33	0.2558974254227139	59	0.2452921198647798	85	0.2495690732355643	111	0.2544579073163216
8	0.2016237965277821	34	0.3107505720080235	60	0.2232283573179844	86	0.257846544968877	112	0.2524730250473532
9	0.3009065569361396	35	0.198617646130753	61	0.2921382245833063	87	0.2490090708673954	113	0.430076101970317
10	0.2804809039740927	36	0.2555246363867466	62	0.2330132542802518	88	0.2356717993681586	114	0.2127079697147537
11	0.276913936205196	37	0.261492361111579	63	0.2489489777821636	89	0.2505615281469448	115	0.430076101970317
12	0.2400034934741478	38	0.2543968142712708	64	0.2306436324214348	90	0.2325179429702958	116	0.161878600055863
13	0.2263021318415651	39	0.2566184393009644	65	0.3244954220675698	91	0.2666700302607894	117	0.2905678955896295
14	0.2493494219672415	40	0.2842581939244369	66	0.2172860392789122	92	0.3681065738129316	118	0.1968024585953538
15	0.2515154985176773	41	0.2410312296504723	67	0.3255564408589037	93	0.2065744168242584	119	0.2482423815031884
16	0.2680880184761519	42	0.234038853678348	68	0.2099367476922875	94	0.271957372955126	120	0.2296604005684124
17	0.430076101970317	43	0.2522538608261865	69	0.3059386474085476	95	0.2524240343096416	121	0.2566157328805886
18	0.2383442759300916	44	0.2710762198024468	70	0.1710602040293033	96	0.2567301413215151	122	0.2510829195989737
19	0.2600510502594898	45	0.2306207128642838	71	0.2893369531509279	97	0.204636761589404	123	0.2324263302104461
20	0.2644053313232521	46	0.2663758508206425	72	0.232656284127133	98	0.2557565106689176	124	0.2709688714730572
21	0.2411629024598989	47	0.2523021989135622	73	0.252704102527041	99	0.2653949506273191	125	0.346718602909584
22	0.2673294637173521	48	0.2541365969871884	74	0.2789888433764052	100	0.2097077864787217	126	0.2644618190215107
23	0.284961052383679	49	0.1820903244881366	75	0.2409643703009936	101	0.3987941404722575	127	0.2378926439612552
24	0.2368363734988558	50	0.161878600055863	76	0.2528626740736871	102	0.2535593491012965	128	0.2847652471303808
25	0.161878600055863	51	0.2630204985815339	77	0.2927263163456587	103	0.430076101970317	129	0.2513392128321547
26	0.2482195665250788	52	0.2212099743924668	78	0.2628901924927994	104	0.430076101970317	130	0.2669996628265387

131	0.1877955896906933	172	0.2721755597129351	213	0.2577089318399622
132	0.2534341481905684	173	0.3429477058798997	214	0.2331040435174563
133	0.2527355527183558	174	0.256067705611179	215	0.3900169234421837
134	0.2561851146128474	175	0.2476086494307758	216	0.2613224063571088
135	0.2634359138107491	176	0.2426512891371658	217	0.2515510323906448
136	0.2530037239305957	177	0.2682410771644144	218	0.2498328701595453
137	0.2517717143636134	178	0.1796093287057016	219	0.2418349856231159
138	0.24373976774494	179	0.3330561158775179	220	0.319479210941733
139	0.2650054456554615	180	0.2387786158031836	221	0.3281939384379871
140	0.3222500185812361	181	0.2528742144336398	222	0.2572740755721846
141	0.2515761994213992	182	0.2497858059928706	223	0.2542112975224527
142	0.161878600055863	183	0.2222451650756219	224	0.2728124660996187
143	0.2522421624754382	184	0.2907122090138203	225	0.1851501294412655
144	0.3880700249286322	185	0.2909149742357569	226	0.161878600055863
145	0.1775490945041118	186	0.2394883185556139	227	0.2513352640796533
146	0.255022676593102	187	0.2841727384103051	228	0.3060205256609402
147	0.2583718625451123	188	0.2703785677341492	229	0.2569024018752625
148	0.2370314551023385	189	0.2412722520140539	230	0.2500337677745456
149	0.3993168351855481	190	0.2682742124957651	231	0.255114399289438
150	0.430076101970317	191	0.2544612999357784	232	0.2825523565171311
151	0.430076101970317	192	0.3717231757708914	233	0.2623955600284903
152	0.2451316959223406	193	0.2065693930675435	234	0.243100870761108
153	0.161878600055863	194	0.2305755011686444	235	0.2969480492135074
154	0.4254144087316539	195	0.2608561337747961	236	0.2575068469513715
155	0.22522922579471	196	0.2293106941349193	237	0.2509785306905357
156	0.161878600055863	197	0.3584152377958738	238	0.3030161020137226
157	0.161878600055863	198	0.3496886739533509	239	0.2525805190776747
158	0.2528022354767172	199	0.3100528431167636	240	0.2529772511825762
159	0.2621352923039341	200	0.2532461051969505		
160	0.3292854309502194	201	0.1630060445994964		
161	0.3880460988465439	202	0.161878600055863		
162	0.2254557014886418	203	0.2186947246756463		
163	0.3365029916045538	204	0.1868844747065721		
164	0.2043460647072963	205	0.3121356469632162		
165	0.2343894960889268	206	0.3934642784129331		
166	0.430076101970317	207	0.2648555209770562		
167	0.2150599781463903	208	0.2614119477533263		
168	0.2601430010897214	209	0.2608496440760251		
169	0.161878600055863	210	0.430076101970317		
170	0.161878600055863	211	0.2585236389064769		
171	0.2217976038439952	212	0.161878600055863		

Lampiran 3
Printout Hasil Pengolahan E views





Dependent Variable: LOG(ETR_W)					Breusch-Godfrey Serial Correlation LM Test				
Method: Least Squares					F-statistic 0.237044 Prob. F(2,231) 0.7891				
Date: 09/17/19 Time: 22:38					Obs*R-squared 0.491551 Prob. Chi-Square(2) 0.7821				
Sample: 1 240									
Included observations: 240					Test Equation:				
					Dependent Variable: RESID				
					Method: Least Squares				
					Date: 09/18/19 Time: 03:14				
					Sample: 1 240				
					Included observations: 240				
					Presample missing value lagged residuals set to zero.				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	1.696161	1.086663	1.560889	0.1199	C	-0.094075	1.098777	-0.085618	0.9318
LOG(DER)	0.072119	0.024543	2.938426	0.0036	LOG(DER)	0.002449	0.024985	0.098006	0.9220
KA	-0.016603	0.037955	-0.437441	0.6622	KA	0.001401	0.038135	0.036747	0.9707
LOG(DI)	-0.044830	0.041950	-1.068654	0.2863	LOG(DI)	0.000760	0.042116	0.018038	0.9856
LOG(KI)	0.065861	0.059862	1.100216	0.2724	LOG(KI)	-0.007823	0.061765	-0.126653	0.8993
LIQ^2	0.002166	0.001538	1.408305	0.1604	LIQ^2	5.33E-05	0.001545	0.034517	0.9725
LOG(UP)	-0.909435	0.334045	-2.722494	0.0070	LOG(UP)	0.026171	0.337324	0.077585	0.9382
R-squared	0.104866	Mean dependent var	-1.357278		RESID(-1)	-0.010139	0.067278	-0.150703	0.8803
Adjusted R-squared	0.081815	S.D. dependent var	0.218900		RESID(-2)	0.045690	0.068258	0.669363	0.5039
S.E. of regression	0.209754	Akaike info criterion	-0.257032		R-squared	0.002048	Mean dependent var	1.26E-15	
Sum squared resid	10.25122	Schwarz criterion	-0.155513		Adjusted R-squared	-0.032513	S.D. dependent var	0.207104	
Log likelihood	37.84379	Hannan-Quinn criter.	-0.216127		S.E. of regression	0.210444	Akaike info criterion	-0.242415	
F-statistic	4.549359	Durbin-Watson stat	2.014553		Sum squared resid	10.23023	Schwarz criterion	-0.111891	
Prob(F-statistic)	0.000220				Log likelihood	38.08981	Hannan-Quinn criter.	-0.189823	
					F-statistic	0.059261	Durbin-Watson stat	1.980142	
					Prob(F-statistic)	0.999886			

Heteroskedasticity Test: Breusch-Pagan-Godfrey					Variance Inflation Factors			
F-statistic					Date: 09/18/19 Time: 03:15			
Obs*R-squared					Sample: 1 240			
Scaled explained SS					Included observations: 240			
Prob. F(6,233)					Coefficient			
0.0504					Variance			
Prob. Chi-Square(6)					Uncentered			
0.0517					VIF			
Prob. Chi-Square(6)					Centered			
0.0171					VIF			
Test Equation:								
Dependent Variable: RESID^2								
Method: Least Squares								
Date: 09/18/19 Time: 03:15								
Sample: 1 240								
Included observations: 240								
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Variable	Coefficient	Uncentered	Centered
C	0.093531	0.354013	0.264201	0.7919	C	1.180837	6441.416	NA
LOG(DER)	0.008151	0.007996	1.019450	0.3090	LOG(DER)	0.000602	2.399686	1.975629
KA	-0.007790	0.012365	-0.630015	0.5293	KA	0.001441	3.830904	1.963339
LOG(DI)	0.018768	0.013667	1.373255	0.1710	LOG(DI)	0.001760	27.32161	2.130397
LOG(KI)	-0.007007	0.019502	-0.359284	0.7197	LOG(KI)	0.003583	18.01802	1.080479
LIQ^2	-0.000221	0.000501	-0.442046	0.6589	LIQ^2	2.37E-06	2.679561	1.794099
LOG(UP)	-0.005482	0.108825	-0.050373	0.9599	LOG(SIZE)	0.111586	6842.612	2.148053
R-squared	0.052090	Mean dependent var	0.042713					
Adjusted R-squared	0.027681	S.D. dependent var	0.069299					
S.E. of regression	0.068334	Akaike info criterion	-2.500098					
Sum squared resid	1.087989	Schwarz criterion	-2.398579					
Log likelihood	307.0117	Hannan-Quinn criter.	-2.459193					
F-statistic	2.134008	Durbin-Watson stat	1.889062					
Prob(F-statistic)	0.050381							

Lampiran 4
Tabulasi Data Mentah

No.	Kode Perusahaan	Nama Perusahaan	TAHUN	VARIABEL						
				Y	X1	X2 - X4			X5	X6
				ETR	DER	GCG			Liquiditas	Ukuran Perusahaan
				Kualitas Audit	Direktur Independen	Komisaris Independen				
1	ASII	Astra International Tbk	2013	0,19	1,02	1	0,13	0,30	1,24	33,00
	ASII		2014	0,18	0,96	1	0,13	0,36	1,31	33,09
	ASII		2015	0,20	0,94	1	0,10	0,36	1,38	33,13
	ASII		2016	0,18	0,87	1	0,09	0,33	1,24	33,20
	ASII		2017	0,21	0,89	1	0,11	0,33	1,23	33,32
2	AUTO	Astra Otoparts Tbk	2013	0,17	0,32	1	0,11	0,40	1,89	30,17
	AUTO		2014	0,13	0,42	1	0,11	0,30	1,33	30,30
	AUTO		2015	0,26	0,41	1	0,13	0,33	1,32	30,29
	AUTO		2016	0,26	0,39	1	0,13	0,38	1,51	30,31
	AUTO		2017	0,23	0,37	1	0,13	0,38	1,72	30,32
3	NIPS	Nipress Tbk	2013	0,26	2,40	0	0,33	0,33	1,05	27,41
	NIPS		2014	0,26	1,07	0	0,33	0,33	1,29	27,82
	NIPS		2015	0,27	1,54	0	0,33	0,33	1,05	28,07
	NIPS		2016	0,26	1,11	0	0,33	0,33	1,22	28,21
	NIPS		2017	0,26	1,16	0	0,33	0,33	1,17	28,27
4	SMSM	Selamat Sempurna Tbk	2013	0,24	0,72	1	0,20	0,33	0,97	28,17
	SMSM		2014	0,22	0,57	1	0,20	0,33	0,97	28,19
	SMSM		2015	0,21	0,54	1	0,20	0,33	1,17	28,43
	SMSM		2016	0,24	0,43	1	0,20	0,33	1,33	28,44
	SMSM		2017	0,23	0,34	1	0,20	0,50	1,88	28,52
5	RICY	Ricky Putra Globalindo T	2013	0,46	1,92	0	0,25	0,33	1,77	27,74
	RICY		2014	0,30	2,00	0	0,25	0,33	1,33	27,79
	RICY		2015	0,40	1,99	0	0,25	0,33	1,19	27,81
	RICY		2016	0,40	2,12	0	0,25	0,33	1,15	27,88
	RICY		2017	0,36	2,19	0	0,25	0,33	1,19	27,95
6	TRIS	Trisula International Tbk	2013	0,24	0,57	0	0,25	0,33	2,38	26,89
	TRIS		2014	0,25	0,69	0	0,33	0,33	2,02	26,98
	TRIS		2015	0,25	0,74	0	0,33	0,33	1,89	27,08
	TRIS		2016	0,47	0,85	0	0,25	0,33	1,64	27,18
	TRIS		2017	0,35	0,53	0	0,25	0,33	1,92	27,02
7	UNIT	Nusantara Inti Corpora T	2013	0,81	0,90	0	0,50	0,50	0,40	26,85
	UNIT		2014	0,93	0,82	0	0,50	0,50	0,45	26,81
	UNIT		2015	0,77	0,90	0	0,50	0,50	0,60	26,86
	UNIT		2016	0,55	0,77	0	0,50	0,50	0,65	26,79
	UNIT		2017	0,31	0,74	0	0,50	0,50	0,74	26,78
8	JECC	Jembo Cable Company T	2013	0,20	7,44	0	0,25	0,67	0,98	27,85
	JECC		2014	0,28	5,40	0	0,25	0,67	1,03	27,69
	JECC		2015	0,71	2,69	0	0,25	0,67	1,05	27,94
	JECC		2016	0,25	2,37	0	0,25	0,67	1,14	28,09
	JECC		2017	0,25	2,52	0	0,25	0,67	1,06	28,29
9	KBLI	KMI Wire & Cable Tbk	2013	0,30	0,51	1	0,17	0,33	2,55	27,92
	KBLI		2014	0,26	0,42	1	0,17	0,40	3,33	27,92
	KBLI		2015	0,23	0,51	1	0,17	0,40	2,85	28,07
	KBLI		2016	0,13	0,42	1	0,33	0,40	3,41	28,26
	KBLI		2017	0,16	0,69	1	0,20	0,33	1,97	28,73
10	KLBM	Kabelindo Murni Tbk	2013	0,28	1,43	0	0,33	0,33	0,96	27,21
	KLBM		2014	0,25	1,23	0	0,33	0,33	1,04	27,20
	KLBM		2015	0,41	1,21	0	0,33	0,33	1,06	27,21
	KLBM		2016	0,43	0,99	0	0,25	0,33	1,30	27,18
	KLBM		2017	0,01	0,56	0	0,33	0,33	1,26	27,84
11	SCCO	Supreme Cable Manufac	2013	0,28	1,49	0	0,25	0,33	1,39	28,20
	SCCO		2014	0,25	1,04	0	0,25	0,33	1,57	28,14
	SCCO		2015	0,23	0,92	0	0,20	0,33	1,67	28,20

12	SCCO	Indoement Tunggal Pra	2016	0,23	1,01	0	0,33	0,33	1,69	28,53
	SCCO		2017	0,22	0,47	0	0,33	0,33	1,74	29,02
	INTP		2013	0,24	0,17	1	0,11	0,43	6,15	30,91
	INTP		2014	0,22	0,18	1	0,11	0,43	4,93	30,99
	INTP		2015	0,23	0,16	1	0,11	0,43	4,89	30,95
	INTP		2016	0,07	0,15	1	0,11	0,43	4,53	31,04
13	INTP	Semen Indonesia (Perse	2017	0,19	0,18	1	0,11	0,43	3,70	30,99
	SMGR		2013	0,23	0,41	1	0,14	0,33	1,88	31,06
	SMGR		2014	0,29	0,37	1	0,14	0,43	2,21	31,17
	SMGR		2015	0,23	0,39	1	0,14	0,29	1,60	31,27
	SMGR		2016	0,11	0,45	1	0,14	0,29	1,27	31,42
14	SMGR	Asahimas Flat Glass Tbk	2017	0,31	0,73	1	0,14	0,29	1,57	31,12
	AMFG		2013	0,25	0,32	1	0,09	0,33	4,18	28,90
	AMFG		2014	0,23	0,27	1	0,09	0,33	5,68	29,00
	AMFG		2015	0,26	0,26	1	0,09	0,33	4,65	29,08
	AMFG		2016	0,25	0,53	1	0,09	0,33	2,02	29,34
15	AMFG	Arwana Citramulia Tbk	2017	0,39	0,77	1	0,09	0,33	2,01	29,47
	ARNA		2013	0,25	0,49	1	0,33	0,67	1,30	27,76
	ARNA		2014	0,25	0,38	1	0,33	0,67	1,61	27,86
	ARNA		2015	0,25	0,60	1	0,33	0,67	1,02	27,99
	ARNA		2016	0,26	0,63	1	0,33	0,33	1,35	28,06
16	ARNA	Surya Toto Indonesia Tbk	2017	0,26	0,56	1	0,33	0,50	1,63	28,10
	TOTO		2013	0,27	0,69	1	0,09	0,25	2,19	28,19
	TOTO		2014	0,23	0,65	1	0,09	0,40	2,11	28,34
	TOTO		2015	0,25	0,64	1	0,09	0,40	2,41	28,52
	TOTO		2016	0,33	0,69	1	0,09	0,40	2,19	28,58
17	TOTO	Indal Aluminium Industr	2017	0,26	0,67	1	0,09	0,40	2,30	28,67
	INAI		2013	0,56	5,97	0	0,20	0,50	1,24	27,36
	INAI		2014	0,32	6,34	0	0,20	0,50	1,08	27,52
	INAI		2015	0,50	4,55	0	0,20	0,50	1,00	27,92
	INAI		2016	0,39	3,63	0	0,20	0,50	1,00	27,81
18	INAI	Lion Metal Works Tbk	2017	0,26	3,38	0	0,20	0,50	0,99	27,82
	LION		2013	0,24	0,20	0	0,25	0,33	6,73	26,94
	LION		2014	0,22	0,35	0	0,25	0,33	3,69	27,12
	LION		2015	0,21	0,41	0	0,25	0,33	3,80	27,18
	LION		2016	0,23	0,46	0	0,25	0,33	3,56	27,25
19	LION	Lionmesh Prima Tbk	2017	0,54	0,51	0	0,25	0,33	3,27	27,25
	LMSH		2013	0,26	0,33	0	0,33	0,33	3,90	25,68
	LMSH		2014	0,33	0,25	0	0,33	0,33	5,33	25,67
	LMSH		2015	0,49	0,19	0	0,33	0,33	8,09	25,62
	LMSH		2016	0,34	0,39	0	0,33	0,33	2,77	25,82
20	LMSH	Pelangi Indah Canindo T	2017	0,26	0,24	0	0,33	0,33	4,28	25,81
	PICO		2013	0,26	1,90	0	0,50	0,33	1,31	27,16
	PICO		2014	0,21	1,72	0	0,50	0,33	1,66	27,16
	PICO		2015	0,14	1,45	0	0,50	0,33	1,59	27,13
	PICO		2016	0,20	1,40	0	0,50	0,33	1,34	27,18
21	PICO	Ekadharna Internationa	2017	0,13	1,58	0	0,50	0,33	1,51	27,30
	EKAD		2013	0,24	0,45	0	0,33	0,50	2,33	26,56
	EKAD		2014	0,31	0,51	0	0,33	0,50	2,33	26,74
	EKAD		2015	0,29	0,33	0	0,33	0,50	3,57	26,69
	EKAD		2016	0,23	0,19	0	0,33	0,50	4,89	27,28
22	EKAD	Charoen Pokphand Indo	2017	0,26	0,20	0	0,33	0,50	4,52	27,40
	CPIN		2013	0,27	0,57	1	0,14	0,33	3,79	30,38
	CPIN		2014	0,17	0,89	1	0,14	0,33	2,24	30,67
	CPIN		2015	0,20	0,97	1	0,14	0,33	2,11	30,84
	CPIN		2016	0,43	0,71	1	0,14	0,50	2,13	30,82
23	CPIN	Japfa Comfeed Indonesi	2017	0,23	0,56	1	0,14	0,33	2,32	30,83
	JPFA		2013	0,28	1,89	0	0,20	0,33	2,06	30,33
	JPFA		2014	0,29	2,04	0	0,20	0,33	1,77	30,39
	JPFA		2015	0,25	1,81	0	0,20	0,50	1,79	30,47
	JPFA		2016	0,22	1,05	1	0,20	0,40	2,07	30,59
24	JPFA	Kedawang Setia Industri	2017	0,39	1,15	1	0,20	0,50	2,35	30,68
KDSI	2013		0,24	1,42	0	0,25	0,40	1,44	27,47	

25	KDSI	Akasha Wira Internation	2014	0,23	1,40	0	0,25	0,33	1,37	27,58
	KDSI		2015	0,23	2,11	0	0,33	0,50	1,16	27,79
	KDSI		2016	0,26	1,72	0	0,33	0,50	1,23	27,76
	KDSI		2017	0,26	1,74	0	0,33	0,40	1,19	27,91
	ADES		2013	0,06	0,67	0	0,25	0,33	1,81	26,81
26	ADES	Wilmar Cahaya Indonesi	2014	0,25	0,71	0	0,25	0,33	1,54	26,95
	ADES		2015	0,26	0,99	0	0,25	0,33	1,39	27,21
	ADES		2016	0,09	1,00	0	0,33	0,33	1,64	27,37
	ADES		2017	0,25	0,99	0	0,50	0,33	1,20	27,46
	CEKA		2013	0,25	1,02	1	0,25	0,25	1,63	27,70
27	CEKA	Delta Djakarta Tbk	2014	0,28	1,39	1	0,25	0,50	1,47	27,88
	CEKA		2015	0,25	1,32	1	0,25	0,50	1,53	28,03
	CEKA		2016	0,13	0,61	1	0,25	0,50	2,19	27,99
	CEKA		2017	0,25	0,54	1	0,25	0,50	2,22	27,96
	DLTA		2013	0,25	0,30	1	0,20	0,40	4,66	27,49
28	DLTA	Indofood CBP Sukses Ma	2014	0,24	0,31	1	0,20	0,40	4,40	27,63
	DLTA		2015	0,23	0,22	1	0,20	0,40	6,42	27,67
	DLTA		2016	0,22	0,18	1	0,20	0,40	7,60	27,81
	DLTA		2017	0,24	0,17	1	0,20	0,40	8,64	27,92
	ICBP		2013	0,25	0,67	1	0,11	0,43	2,41	30,69
29	ICBP	Indofood Sukses Makmu	2014	0,25	0,72	1	0,11	0,43	2,19	30,85
	ICBP		2015	0,27	0,62	1	0,11	0,33	2,33	30,91
	ICBP		2016	0,27	0,56	1	0,11	0,50	2,41	30,99
	ICBP		2017	0,32	0,56	1	0,11	0,50	2,43	31,08
	INDF		2013	0,29	1,11	1	0,08	0,38	1,68	31,98
30	INDF	Multi Bintang Indonesia	2014	0,29	1,14	1	0,08	0,38	1,81	32,09
	INDF		2015	0,35	1,13	1	0,08	0,38	1,71	32,15
	INDF		2016	0,34	0,87	1	0,08	0,38	1,51	32,04
	INDF		2017	0,33	0,88	1	0,08	0,38	1,50	32,11
	MLBI		2013	0,26	0,80	1	0,25	0,43	0,98	28,21
31	MLBI	Mayora Indah Tbk	2014	0,26	3,03	1	0,25	0,50	0,51	28,43
	MLBI		2015	0,26	1,74	1	0,25	0,57	0,58	28,37
	MLBI		2016	0,26	1,77	1	0,25	0,57	0,68	28,45
	MLBI		2017	0,26	1,36	1	0,25	0,50	0,83	28,55
	MYOR		2013	0,22	1,50	0	0,20	0,40	2,40	29,90
32	MYOR	Nippon Indosari Corpind	2014	0,23	1,53	0	0,20	0,40	2,09	29,96
	MYOR		2015	0,24	1,18	0	0,20	0,40	2,37	30,06
	MYOR		2016	0,25	1,06	0	0,20	0,40	2,25	30,19
	MYOR		2017	0,25	1,03	0	0,20	0,40	2,39	29,81
	ROTI		2013	0,25	1,35	1	0,17	0,33	1,14	28,23
33	ROTI	Sekar Bumi Tbk	2014	0,25	1,25	1	0,17	0,33	1,37	28,39
	ROTI		2015	0,28	1,28	1	0,17	0,33	2,05	28,63
	ROTI		2016	0,24	1,02	1	0,17	0,33	2,96	28,70
	ROTI		2017	0,27	0,62	1	0,20	0,33	2,26	29,15
	SKBM		2013	0,26	1,47	0	0,17	0,33	1,33	26,93
34	SKBM	Sekar Laut Tbk	2014	0,19	1,12	0	0,17	0,33	1,48	27,20
	SKBM		2015	0,25	1,22	0	0,17	0,33	1,12	27,36
	SKBM		2016	0,27	1,72	0	0,13	0,33	1,11	27,63
	SKBM		2017	0,19	0,59	0	0,13	0,33	1,64	28,12
	SKLT		2013	0,31	1,28	0	0,33	0,33	1,23	26,44
35	SKLT	Siantar Top Tbk	2014	0,30	1,45	0	0,25	0,33	1,18	26,54
	SKLT		2015	0,27	1,48	0	0,25	0,33	1,19	26,66
	SKLT		2016	0,18	0,92	0	0,25	0,33	1,32	27,07
	SKLT		2017	0,16	1,07	0	0,20	0,33	1,26	27,18
	STTP		2013	0,20	1,13	0	0,33	0,50	1,14	28,02
36	STTP	Ultra Jaya Milk Industry a	2014	0,26	1,08	0	0,33	0,50	1,48	28,16
	STTP		2015	0,19	0,90	0	0,25	0,50	1,58	28,28
	STTP		2016	0,33	1,00	0	0,25	0,50	1,65	28,48
	STTP		2017	0,25	0,69	0	0,25	0,50	2,64	28,48
	ULTJ		2013	0,26	0,39	0	0,33	0,33	2,47	28,66
	ULTJ		2014	0,24	0,28	0	0,33	0,33	3,34	28,70
	ULTJ		2015	0,25	0,27	0	0,33	0,33	3,75	28,90
	ULTJ		2016	0,24	0,21	0	0,33	0,33	4,84	29,08

37	ULTJ	Gudang Garam Tbk	2017	0,31	0,23	0	0,33	0,33	4,19	29,28
	GGRM		2013	0,26	0,73	1	0,14	0,33	1,72	31,56
	GGRM		2014	0,25	0,76	1	0,14	0,50	1,62	31,70
	GGRM		2015	0,25	0,67	1	0,14	0,50	1,77	31,78
	GGRM		2016	0,25	0,59	1	0,14	0,50	1,94	31,77
38	HMSP	Hanjaya Mandala Sampo	2017	0,26	0,58	1	0,14	0,50	1,94	31,83
	HMSP		2013	0,25	0,94	1	0,14	0,50	1,75	30,94
	HMSP		2014	0,26	1,10	1	0,14	0,50	1,53	30,98
	HMSP		2015	0,26	0,19	1	0,14	0,40	6,57	31,27
	HMSP		2016	0,25	0,24	1	0,13	0,40	5,23	31,38
39	WIIM	Wisnilak Inti Makmur Tb	2017	0,25	0,26	1	0,13	0,40	5,27	31,40
	WIIM		2013	0,26	0,60	0	0,17	0,33	2,43	27,84
	WIIM		2014	0,25	0,58	0	0,17	0,33	2,27	27,92
	WIIM		2015	0,26	0,42	0	0,17	0,33	2,89	27,93
	WIIM		2016	0,22	0,37	0	0,17	0,33	3,39	27,93
40	DVLA	Darya Varia Laboratoria T	2017	0,26	0,25	0	0,17	0,33	5,36	27,83
	DVLA		2013	0,28	0,33	1	0,14	0,38	4,15	27,81
	DVLA		2014	0,24	0,31	1	0,14	0,38	4,91	27,85
	DVLA		2015	0,25	0,41	1	0,14	0,43	3,52	27,95
	DVLA		2016	0,29	0,42	1	0,13	0,43	2,85	28,06
41	KAEF	Kimia Farma Tbk	2017	0,28	0,47	1	0,13	0,43	2,66	28,13
	KAEF		2013	0,24	0,52	0	0,20	0,40	2,43	28,54
	KAEF		2014	0,25	0,64	0	0,20	0,40	2,39	28,72
	KAEF		2015	0,25	0,67	0	0,20	0,25	1,92	28,87
	KAEF		2016	0,29	1,03	0	0,20	0,25	1,71	29,16
42	KLBF	Kalbe Farma Tbk	2017	0,26	1,37	0	0,20	0,20	1,55	29,44
	KLBF		2013	0,23	0,33	1	0,20	0,33	2,84	30,06
	KLBF		2014	0,23	0,27	1	0,20	0,33	3,40	30,15
	KLBF		2015	0,24	0,25	1	0,20	0,43	3,70	30,25
	KLBF		2016	0,24	0,22	1	0,20	0,43	4,13	30,35
43	MERK	Merck Indonesia Tbk	2017	0,24	0,20	1	0,17	0,43	4,51	30,44
	MERK		2013	0,25	0,36	1	0,14	0,33	3,98	27,27
	MERK		2014	0,27	0,29	1	0,20	0,33	4,59	27,30
	MERK		2015	0,27	0,35	1	0,20	0,33	3,65	27,19
	MERK		2016	0,28	0,22	1	0,20	0,33	4,22	27,53
44	PYFA	Pyridam Farma Tbk	2017	0,30	0,27	1	0,20	0,33	3,08	27,71
	PYFA		2013	0,27	0,86	0	0,33	0,33	1,54	25,89
	PYFA		2014	0,37	0,79	0	0,33	0,33	1,63	25,88
	PYFA		2015	0,32	0,58	0	0,25	0,50	1,99	25,80
	PYFA		2016	0,27	0,58	0	0,25	0,50	2,19	25,84
45	TSPC	Tempo Scan Pacific Tbk	2017	0,26	0,47	0	0,33	0,50	3,52	25,80
	TSPC		2013	0,23	0,41	0	0,08	0,60	2,96	29,32
	TSPC		2014	0,21	0,37	0	0,09	0,75	3,00	29,36
	TSPC		2015	0,25	0,45	0	0,09	0,50	2,54	29,47
	TSPC		2016	0,24	0,42	0	0,10	0,50	2,65	29,52
46	TCID	Mandom Indonesia Tbk	2017	0,25	0,46	0	0,10	0,60	2,52	29,64
	TCID		2013	0,27	0,24	1	0,08	0,40	3,57	28,01
	TCID		2014	0,27	0,44	1	0,07	0,40	1,80	28,25
	TCID		2015	0,07	0,21	1	0,13	0,50	4,99	28,36
	TCID		2016	0,27	0,23	1	0,13	0,40	5,32	28,41
47	UNVR	Unilever Indonesia Tbk	2017	0,30	0,27	1	0,08	0,50	4,91	28,49
	UNVR		2013	0,25	2,12	1	0,10	0,80	0,67	30,17
	UNVR		2014	0,25	2,01	1	0,13	0,80	0,71	30,29
	UNVR		2015	0,25	2,26	1	0,11	0,83	0,65	30,39
	UNVR		2016	0,25	2,56	1	0,11	0,67	0,61	30,45
48	KICI	Kedaung Indah Can Tbk	2017	0,25	2,65	1	0,11	0,80	0,63	30,57
	KICI		2013	0,25	0,33	0	0,33	0,33	5,77	25,31
	KICI		2014	0,26	0,23	0	0,33	0,33	7,90	25,30
	KICI		2015	0,39	0,43	0	0,33	0,33	5,74	25,62
	KICI		2016	0,37	0,57	0	0,33	0,33	5,35	25,66
	KICI		2017	0,25	0,63	0	0,33	0,33	7,29	25,73